

PANDEMI COVID-19

menit setelah 12.9
19 (reagen

ALKE
KIRI



JURNALIS INVESTIGASI
MELAWAN KORUPSI SERIES I

KOMPILASI LIPUTAN KLUB JURNALIS INVESTIGASI MENGUNGKAP DUGAAN KORUPSI DI PROGRAM KARTU PRAKERJA DAN DARURAT COVID-19



JUNI 2024

COVID-19
/accine
:sension for injected

angka
h kare
esehatan Dunia
nsi China Food
ngan dalih itu
a di Manila
resmi yang
re.

Setelah muncul sangat menarik pernyataannya muncul, Presiden Rodrig harga Sansure terlalu wajarnya 1,75 juta peso (s

sakit. BPKP menaksir pemborosan uang negara Rp 39,2 miliar. Sementara ICW menaksir Rp 169,1 miliar.

Karikatur reagen covid-19 merek Sansure Biotech hasil pengadaan BNPB yang [Suara.com/Ema

RU
AAN
S COVID
BERPO

Pen
Pap
alat
keli
sed
kur
Sel
me
Ar



JURNALIS INVESTIGASI
MELAWAN KORUPSI SERIES I

KOMPILASI LIPUTAN KLUB JURNALIS INVESTIGASI MENGUNGKAP DUGAAN KORUPSI DI PROGRAM KARTU PRAKERJA DAN DARURAT COVID-19

MEDIA KOLABORASI

SUARA.COM
JARING.ID
ALINEA.ID
TEMPO

PENYUNTING

AGUNG SEDAYU
WANA ALAMSYAH

DIPUBLIKASIKAN OLEH



INDONESIA CORRUPTION WATCH
JALAN KALIBATA TIMUR IV/D NO.6,
JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA

2024

JURNALIS INVESTIGASI
MELAWAN KORUPSI
SERIES I

**KOMPILASI LIPUTAN
KLUB JURNALIS INVESTIGASI
MENGUNGKAP DUGAAN KORUPSI
DI PROGRAM KARTU PRAKERJA
DAN DARURAT COVID-19**



INDONESIA CORRUPTION WATCH

2024

DAFTAR ISI

Pengantar Koordinator ICW	1
Pengantar Umum	4
BAGIAN I: AKAL-AKALAN KARTU PRAKERJA	7
• Dari Lingkar Istana Hingga Perusahaan Anyar	9
• Aturan Luwes Program Kartu Prakerja	13
• ‘Mendadak Guru’, Melacak Lembaga Kursus Dadakan Pada Proyek Kartu Prakerja	19
• Program Kartu Prakerja dan Munculnya Lembaga Pelatihan Tak Kompeten	27
• Relasi Politis dan Bau Monopoli di Balik Layar Kartu Prakerja	33
BAGIAN II: PENYELEWENGAN PENGADAAN DARURAT	39
• Sengkarut Pengadaan Alat Tes Covid-19, Negara Berpotensi Rugi	41
• Distributor Blak-blakan soal Pengadaan Reagen Covid-19 BNPB yang Bermasalah	51
• Tumpukan Alat Tes Covid-19 yang Terbengkalai di Gudang	59
• Doni Monardo: Kalau Saya Tak Ambil Keputusan, Mau jadi Apa Negara Kita?	64
• Alkes Bermasalah Kiriman BNPB	68
• Satu Masalah di Tiga Negara	76
• Doni Monardo: Kami Pikir Semua Merek Sama	79
• Peti Pendingin Reagen Retur	82
• Doni Monardo: Pandemi Covid-19 Bukan Situasi yang Normal	86
• Segudang Problem di Balik Retur Ratusan Ribu Unit Reagen Covid-19	92
• Retur Reagen Covid-19	98
• Konco Doni Monardo di Proyek Penanganan Covid-19 BNPB	100
• Kisruh Pengadaan Alat Tes Covid-19 di BNPB	105
• Bagaimana Bisa Tes Covid-19 Negatif Tapi Hasilnya Positif	113
• Siapa Budiyanto A. Gani, Distributor Alat Tes Covid-19 Terbesar di BNPB	117
• Di Awal Pandemi Kami Bingung	122
• Bagaimana Budiyanto A. Gani Mendapat Proyek Alat Tes Covid-19 di BNPB?	125

PENGANTAR KOORDINATOR ICW

Terbongkarnya skandal *Panama Papers* yang memuat 11,5 juta dokumen rahasia dari firma hukum Mossack-Fonseca tahun 2016 telah menghebohkan dunia. Kehebohannya bukan saja dari sisi jumlah data yang melebihi kebocoran data era *Wikileaks* tahun 2010. Tetapi juga karena data yang termuat dalam *Panama Papers* mengandung informasi nama perusahaan maupun nama elit politik dan pemerintah, pengusaha bahkan atlet olahraga yang berupaya menyembunyikan aset dari jeratan pajak maupun upaya menyamarkan hasil pencucian uang dari berbagai tindak pidana.

Adalah ratusan jurnalis dari berbagai negara yang tergabung dalam konsorsium jurnalis investigasi atau *International Consortium Investigative Journalists* (ICIJ) yang bahu membahu membongkar skandal Panama tersebut. Efek pengungkapan itu menyebabkan beberapa nama yang tersangkut di dalamnya seperti Perdana Menteri Islandia dan Pakistan serta pejabat senior FIFA mengundurkan diri dari jabatan.

Tidak cukup itu saja, Konsorsium jurnalis ICIJ terus melanjutkan pengungkapan skandal yaitu *Paradise Papers* dan *Pandora Papers*. Keduanya hampir serupa, menyertakan jutaan dokumen yang berisi nama-nama politisi, pejabat publik dan pemimpin dari berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia serta daftar perusahaan yang telah dibentuk dengan struktur sedemikian rupa agar terhindar dari beban pajak.

Kolaborasi jurnalis investigasi dalam mengungkap data kepada publik merupakan fenomena yang secara global terus berkembang termasuk di Indonesia. Saat ini ICW juga terus mendorong pembentukan **Klub Jurnalis Investigasi (KJI)** di beberapa daerah di Indonesia.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pembentukan KJI. *Pertama*, karena adanya kesamaan tanggung jawab sebagai aktivis sosial dan insan pers untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara, memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada publik, menegakkan nilai-nilai demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia serta memperjuangkan keadilan kebenaran.

Faktor *kedua* adalah karena kerja-kerja jurnalis investigasi seringkali memakan waktu dan mahal karena kejahatan yang dilakukan melebihi batas-batas negara termasuk kecanggihan teknologi yang sering digunakan perusahaan, lembaga atau konsultan untuk melindungi dari jeratan pidana ataupun pajak. Oleh karena itu dibutuhkan kerja-kerja kolaborasi dari berbagai latar belakang kompetensi jurnalis untuk saling membantu menguak informasi dari data atau dokumen maupun sebuah peristiwa.

Faktor *ketiga* karena para jurnalis investigasi seringkali menghadapi situasi minimnya dukungan pendanaan dan pelatihan. Tidak jarang mereka juga menghadapi ancaman fisik, intimidasi, *hacking*, *doxing* serta kriminalisasi hukum. Sehingga, strategi membagi beban resiko mutlak dilakukan.

Hal ini setidaknya terkonfirmasi dari kondisi kebebasan pers tahun 2024 yang diterbitkan *Reporters Without Borders* (RSF) yang menjelaskan jika kebebasan pers di seluruh dunia tengah terancam oleh orang-orang yang seharusnya menjadi penjaminnya yaitu otoritas politik. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa, dari lima indikator yang digunakan untuk menyusun peringkat, indikator politik adalah yang paling banyak mengalami penurunan, dengan rata-rata penurunan global sebesar 7,6 poin.

Peringkat Indonesia dalam indeks kebebasan pers juga menurun dari peringkat 108 di tahun 2023 menjadi 111 di tahun 2024. RSF menempatkan Indonesia dalam kategori *difficult* berada di bawah Malaysia, Thailand dan Timor Leste. Kemudian RSF juga mencermati dua tantangan utama di Indonesia yaitu kekerasan terhadap jurnalis dan regulasi yang menghalangi kerja-kerja jurnalis.

Soal regulasi yang menghalangi kerja jurnalis tergambar dari revisi UU Penyiaran yang sempat digulirkan DPR. Menurut analisis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan LBH Pers, pemerintah menggunakan kekuasaan secara eksekutif melalui pasal-pasal pemberangus demokrasi berdalih perlindungan terhadap penghinaan dan pencemaran nama baik yang semakin dilegitimasi melalui RUU Penyiaran. Alih-alih mempersempit ruang kriminalisasi bagi jurnalis maupun masyarakat namun pasal elastis justru semakin diperluas penggunaannya. Meskipun Revisi UU Penyiaran akhirnya ditunda oleh Baleg DPR, namun potensi dihidupkan kembali pembahasannya selalu terbuka.

Situasi hari ini memang sedang tidak baik-baik saja, di mana hukum dijadikan instrumen untuk menekan lawan politik, bahkan demokrasi dan konstitusi telah

dikangkangi oleh ambisi kekuasaan lewat politik dinasti. Oleh karena itu konsistensi, kolaborasi untuk mengontrol kekuasaan oleh pers dan masyarakat sipil harus terus dilakukan untuk mencegah adanya kekuasaan yang cenderung korup. Seperti yang *Lord Acton* sampaikan, kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut.

Sidang pembaca yang terhormat, ini merupakan buku pertama yang berisi kompilasi liputan investigasi para jurnalis anggota KJI. Proses investigasi mereka berlangsung secara dinamis, kewaspadaan tinggi, keterbatasan biaya bahkan dalam situasi pembatasan sosial di masa darurat karena terkait dengan pengadaan alat tes Covid-19.

Namun itu semua bisa dilewati dengan baik oleh para jurnalis dan tentunya menghasilkan liputan yang luar biasa karena beberapa pelaku tindak pidana korupsi berhasil dijebloskan ke dalam penjara. Saya mewakili ICW memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras yang telah dilakukan semua jurnalis yang tergabung dalam liputan investigasi ini.

Selamat Membaca.

Agus Sunaryanto

Koordinator ICW

PENGANTAR UMUM

Kolaborasi Membongkar Korupsi

Pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemberantasan korupsi berjalan mundur. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini menjadi lembaga utama pemberantasan korupsi justru dilemahkan melalui perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK tidak hanya dilemahkan secara aturan dan wewenang, lembaga tersebut juga dipimpin oleh sejumlah figur yang bermasalah.

Dampaknya, komisi anti rasuah ini kerap kali menjadi alat kekuasaan. Pemberantasan korupsi pun menjadi tebang pilih, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Alhasil, komisi anti rasuah itu bukan hanya kehilangan taji tapi juga kepercayaan publik. Sementara itu, kondisi di lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan juga tidak jauh berbeda.

Di tengah kondisi buruknya kinerja pemberantasan korupsi tersebut, peran masyarakat sipil dalam melawan korupsi menjadi penting. Termasuk peran jurnalis dalam membongkar kejahatan korupsi yang menggerogoti segala lini kehidupan di negeri ini.

Berangkat dari kesadaran itu, sejumlah jurnalis yang memiliki komitmen melawan korupsi bekerja sama dengan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) membentuk **Klub Jurnalis Investigasi** atau **KJI**. Wadah kolaborasi para jurnalis untuk liputan investigasi terkait isu korupsi yang dibentuk pada awal 2020 itu diharapkan mampu meneguhkan peran pers sebagai alat kontrol kekuasaan sekaligus membangun narasi yang lebih kokoh dalam mendorong publik melawan korupsi.

Investigasi dan kolaborasi menjadi pilihan sebab membongkar kasus korupsi bukan persoalan mudah. Melalui metode jurnalisme investigasi, jurnalis bisa menggali informasi lebih untuk mengungkap skandal yang tersembunyi di balik lapisan-

lapisan kekuasaan. Kolaborasi dibutuhkan untuk meringankan kerja dan biaya, sebab liputan investigasi membutuhkan tenaga dan sumber daya yang lebih besar dibanding liputan biasa. Pun melalui kolaborasi, resonansi isu menjadi lebih luas karena diberitakan di sejumlah media sekaligus.

Melalui KJI kami menggabungkan sumber daya, keahlian, dan jaringan memburu fakta yang akurat, menggali bukti-bukti yang lebih lengkap, menganalisis data secara mendalam, dan menyusun laporan komprehensif. Hingga lahir karya jurnalistik yang berbobot sekaligus mampu meningkatkan kesadaran publik untuk melawan korupsi dan terus mendorong perubahan kebijakan.

Sepanjang 2020 hingga 2021, KJI telah melahirkan sejumlah liputan investigasi yang membongkar skandal korupsi besar. Seperti pada 2020, KJI menerbitkan laporan investigasi tentang dugaan penyelewengan program Kartu Prakerja.

Awalnya, Kartu Prakerja muncul bak juru selamat, persis saat banyak pekerja terkena PHK akibat wabah virus corona. Namun ternyata program menelan biaya hingga Rp20 triliun ini menyimpan berbagai persoalan dan dugaan penyelewengan.

Investigasi KJI menemukan bukti bagaimana akal-akalan dalam proyek Kartu Prakerja ini menyebabkan kerugian anggaran negara sekaligus masyarakat. Duit puluhan triliun rupiah yang dikucurkan pemerintah lebih banyak mengalir dan dinikmati oleh para penyelenggara program Kartu Prakerja. Sementara jutaan orang yang membutuhkan bantuan karena kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19 tetap merana.

Selanjutnya pada 2021 liputan investigasi KJI berhasil membongkar penyelewengan pengadaan alat uji Covid-19 di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Hasil penelusuran tim KJI menemukan berbagai pelanggaran di pengadaan alat uji Covid-19 oleh BNPB. Antara lain, perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan pengadaan alat tes Covid-19 ternyata tidak memiliki kompetensi dalam bidang pengadaan alat kesehatan. Proyek pengadaan tersebut mereka dapatkan lebih karena unsur kedekatan dengan petinggi di BNPB.

Akibat penyelewengan itu ratusan ribu unit reagen yang diadakan oleh BNPB tidak bisa digunakan. Dampaknya luar biasa, berdasarkan kajian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara ditafsir sekitar Rp39,2 miliar. Sedangkan berdasarkan perhitungan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) kerugian negara lebih besar lagi, sekitar Rp169,1 miliar.

Kerugian yang lebih besar dialami masyarakat. Tidak berfungsinya alat uji Covid-19 tersebut menjadi salah satu faktor terhambatnya upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Bagaimana tidak, alat uji Covid-19 itu justru memberikan hasil yang berkebalikan. Pengujian pada pasien yang positif Covid-19 hasilnya justru negatif Covid-19.

Liputan investigasi KJI ini mendapat pengakuan dari Dewan Pers. Pada 13 Desember 2022 berita *Majalah Tempo* bertajuk **“Mudarat Pengadaan Darurat”** yang merupakan bagian dari kolaborasi KJI terpilih sebagai **Karya Jurnalistik Cetak Terbaik Anugerah Dewan Pers 2022**.

PROGRAM KARTU PRAKERJA



Sejak diluncurkan pada Maret 2020, Kartu Prakerja mengundang polemik. Banyak yang belum bisa menjawab.

“M... kurang deta... informasi itu dari te... di (platform digital) yang... Kartu Prakerja,” ucap... Investiga...

LINGKAR ISTANA GGA PERUSAHAAN ANYAR

BAGIAN 1

AKAL-AKALAN KARTU PRAKERJA



PROGRAM KARTU PRAKERJA

RU', BAGA KURS ADA PROYEK KA

bak juru selamat, pekerja terkena PHK... rus corona. Tapi belakangan, disoal, dianggap tak menjawab, an angkatan kerja. Latar belakangnya pemberi kursus... nyakan

Jurnalis Suara.com yang tergabung dengan Klub Jurnalis Investigasi... dengan juru... Ali...

setelah 12.997 alat perca... (agen) tiba di Pap... is Oktav... did

2020 menjadi tahun bersejarah sekaligus masa yang berat. Tahun itu menjadi awal pandemi Covid-19 melanda berbagai negara, termasuk di Indonesia. Ketika itu perekonomian ambruk, perusahaan-perusahaan lumpuh, gelombang pemutusan hubungan kerja tidak terbendung. Jumlah masyarakat miskin melonjak seiring dengan meningkatnya pengangguran.

Pemerintah Indonesia merespons kondisi itu dengan membuat program Kartu Prakerja sebagai salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kluster perlindungan sosial di masa pandemi. Program ini digadang-gadang bisa membantu kelompok pekerja yang terdampak Covid-19. Mereka yang kehilangan pekerjaan diberi pelatihan sekaligus uang insentif untuk pencarian kerja baru. Pemerintah mengucurkan anggaran Rp20 triliun untuk pelaksanaannya.

Namun, ternyata dalam pelaksanaannya program ini tidak berjalan optimal. Program ini lebih banyak dinikmati oleh lembaga-lembaga pelatihan yang menjadi pengampu kursus berbayar dibanding masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Klub Jurnalis Investigasi lantas menelisik apa penyebab persoalan tersebut. Tim KJI menelusuri sejumlah permasalahan sebilangan kejanggalan terkait program Kartu Prakerja. Salah satunya, kualitas lembaga pelatihan yang menjadi pengampu kursus berbayar.

Tim bekerja sama dengan melakukan *paper trail* atau penelusuran dokumen, mewawancarai sumber-sumber kunci dari kalangan peserta program Kartu Prakerja, hingga mengkonfirmasi ke lembaga pemberi kursus berbayar. Termasuk melacak pemilik lembaga pemberi kursus dan afiliasinya dengan elit politik dan penguasa.

Hasil penelusuran KJI menemukan sejumlah lembaga pelatihan dadakan, yang latar belakang serta kualitas pengajarannya diragukan. Disebut lembaga pelatihan dadakan, karena institusi-institusi tersebut baru didirikan menjelang peluncuran program Kartu Prakerja pada pertengahan Maret 2020.

Akal-akalan dalam proyek Kartu Prakerja ini menyebabkan kerugian anggaran negara sekaligus masyarakat. Duit puluhan triliun rupiah yang dikucurkan pemerintah lebih banyak mengalir dan dinikmati oleh para penyelenggara program Kartu Prakerja. Sementara jutaan orang yang membutuhkan bantuan karena kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19 tetap merana.

Media Kolaborasi:

Suara.com, Jaring.id, Alinea.id, dan Tempo.

DARI LINGKAR ISTANA HINGGA PERUSAHAAN ANYAR

Jaring.id edisi 2 Juni 2020.

“Saya mengambil keputusan yang berat ini karena saya tidak ingin polemik mengenai asumsi atau persepsi publik yang bervariasi tentang posisi saya sebagai Staf Khusus Presiden menjadi berkepanjangan, yang dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dalam menghadapi masalah pandemi Covid-19,” tulis Adamas Belva Devara melalui akun Instagramnya @belvadevara pada Selasa, 21 April 2020.

Keputusan mundur Belva dari posisi Staf Khusus Presiden diambil setelah dua hari sebelumnya ia mencoba mengklarifikasi polemik soal keterlibatan Skill Academy sebagai penyedia materi pembelajaran program Kartu Prakerja. Klarifikasi yang ia sampaikan melalui utas Twitter @AdamasBelva tersebut membantah tuduhan beberapa pihak bahwa terpilihnya Skill Academy tak lepas dari posisi Belva sebagai mantan *Chief Executive Officer* Ruangguru.

Skill Academy merupakan salah satu produk dari PT Ruang Raya Indonesia atau karib dikenal dengan Ruangguru, perusahaan teknologi yang fokus di bidang layanan berbasis pendidikan. Dalam dokumen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diakses pada 16 April 2020 nama Adamas Belva Syah Devara masih tercatat sebagai Direktur Utama.

Nama tak asing juga didapati pada PT Tokopedia yang menaungi Tokopedia, situs jual-beli daring pendistribusi materi pembelajaran Kartu Prakerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio tercatat sebagai komisaris dalam akta pemberitahuan perubahan perseroan Tokopedia tertanggal 26 Desember 2019.

Tim Klub Jurnalis Investigasi (KJI) berusaha mengkonfirmasi posisi tersebut kepada Wishnutama melalui pesan WhatsApp dan surat resmi. Namun, keduanya tak berbalas. Begitu pun dengan panggilan telepon yang terakhir kali dilakukan pada Jumat, 29 Mei 2020. KJI merupakan kumpulan beberapa media seperti *Jaring.id*, *Tempo*, *Suara.com*, dan *Alinea.id*.

VP of Corporate Communications Tokopedia, Nuraini Razak menyebut Wishnutama telah mengundurkan diri dari posisi tersebut sebelum dilantik menjadi menteri oleh presiden Joko Widodo. “Bapak Wishnutama memang pernah menjabat selaku Komisaris di Tokopedia, namun Bapak Wishnutama telah mengundurkan diri pada tanggal 21 Oktober 2019,” ujarnya kepada tim KJI pada Kamis, 28 Mei 2020.

Peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Wana Alamsyah menyatakan bahwa perusahaan yang terbukti menggunakan pengaruhnya sehingga terpilih sebagai mitra Kartu Prakerja dapat dijerat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, khususnya pasal 42. “Ketika pemerintah bekerja sama dengan perusahaan swasta harus menjaga jarak,” kata Wana pada Senin, 1 Juni 2020.

Wana menambahkan dugaan keterlibatan lingkaran istana dalam program Kartu Prakerja juga terjadi pada *Vokraf.com*. Platform edukasi daring yang bernaung di bawah bendera PT Kolaborasi Edukasi Nusantara tersebut didirikan oleh Fina Silmi Febriyani yang pernah duduk sebagai tim kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin.

Berdasarkan laman LinkedIn yang diakses tim KJI pada Minggu, 31 Mei 2020, Fina Silmi Febriyani menyebut dirinya menjabat sebagai *Chief Executive Officer* *Vokraf*. Ia irit bicara saat dikonfirmasi tim KJI. “Saya lagi nggak *open* untuk diwawancarai. Mungkin lain waktu, maaf dan terima kasih ya,” kata Fina melalui pesan WhatsApp, Kamis, 14 Mei 2020.

Direktur Biro Komunikasi Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky tidak ingin menanggapi adanya pengaruh istana dalam terpilihnya beberapa lembaga sebagai mitra Kartu Prakerja. Ia balik menuding bahwa temuan ICW hanya ulasan yang belum akurat.

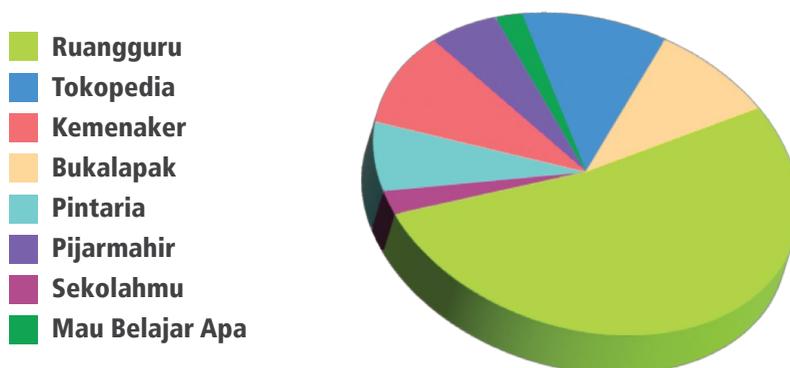
“Kalau opini seseorang ya saya tidak bisa berkomentar. Opini banyak sekali, mungkin perlu menanyakan juga ke tenaga instruktur dan lembaga pelatihan yang bersangkutan,” kata Panji. Ia juga membantah adanya konflik kepentingan dalam program Kartu Prakerja. Panji menegaskan bahwa tidak ada lembaga yang berkaitan dengan istana. “Selama ini kan hanya opini-opini saja,” tegas Panji.

Nama Anyar

Vokraf merupakan nama baru di jagat *platform* belajar daring. Penelusuran dengan menggunakan *who.is* menunjukkan bahwa domain *vokraf.com* baru teregistrasi pada 18 September 2019. Meski umurnya belum lama, *Grand Launching* *Vokraf* yang dihelat pada Jumat, 28 Februari 2020 turut dihadiri Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio.

Dalam program Kartu Prakerja, Vokraf menawarkan lima pelatihan yakni *digital strategist*, *3D animator*, *copywriter*, *YouTube content creator*, dan *graphic designer*. Seluruhnya ditawarkan di *platform* Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Jumlah Peserta Pengakses Mitra *Platform Digital* ada Gelombang I (Dalam Bentuk Ribuan).



Sumber:
Kementerian Perekonomian 2020, Katadata.

Institut Amithya juga menjadi nama baru yang turut serta memproduksi dan mendistribusikan materi pembelajaran Kartu Prakerja. Lembaga ini diresmikan pada Senin, 9 Maret 2020 atau hanya berselang 11 hari sebelum peluncuran program Kartu Prakerja. Saat ini, politisi Partai Golongan Karya, Rucita Permatasari duduk sebagai *Chief Executive Officer* Institut Amithya.

Dalam *amithyainstitute.com* yang merupakan laman resmi Institut Amithya, disebutkan bahwa lembaga ini menawarkan tiga materi daring yakni *front office*, *food and beverage service* dan *housekeeping*. Penelusuran dengan menggunakan *who.is* menemukan bahwa situs tersebut baru teregistrasi pada 16 Desember 2019.

Hasil penelusuran serupa menemukan bahwa *pijarmahir.id*, *platform* pembelajaran dan sertifikasi secara digital yang berada di bawah bendera PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk baru teregistrasi pada Februari 2020, atau sebulan sebelum peluncuran dan penandatanganan kerjasama dengan manajemen program Kartu Prakerja yang dilakukan pada 20 Maret 2020.

CEO Amithya Institute, Rucita Permatasari dan *Assistant Vice President External Communication* PT Telekomunikasi Indonesia (persero) Tbk, Panji Pramono tak menggubris usaha konfirmasi tim KJI. Pesan yang dikirim melalui WhatsApp maupun surat resmi yang dilayangkan tak berbalas hingga Minggu, 31 Mei 2020.

Kualitas Diragukan

Pembuatan situs yang belum lama dilakukan dan dugaan minimnya pengalaman beberapa lembaga yang menjadi mitra Kartu Prakerja membuat ICW ragu dengan kualitas mereka. Peneliti ICW, Wana Alamsyah menilai hal tersebut bertentangan dengan pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja yang menyebutkan bahwa tujuan program Kartu Prakerja adalah mengembangkan kompetensi angkatan kerja; dan meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

“Bagaimana pemerintah dapat mencapai tujuan tersebut jika lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan pun masih dipertanyakan pengalaman dan kemampuannya dalam memberikan pelatihan,” kata Wana.

Peneliti kebijakan pelatihan ketenagakerjaan sekaligus Direktur Eksekutif Yayasan Nusantara Sejati, Eka Simanjuntak meminta agar pelaksanaan program Kartu Prakerja ditunda hingga sengkarnya teratasi. Menurutnya, pemerintah dapat menggunakan Pasal 23 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan sebagai acuan untuk menerima lembaga pelatihan atau mitra ketika berkontribusi dalam program Kartu Prakerja.

Aturan itu menjelaskan lembaga pelatihan harus terakreditasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia (KMPI). Ada delapan pedoman dalam menilai yakni kompetensi kerja, kurikulum dan silabi, materi pelatihan kerja, asesmen pelatihan kerja, tenaga pelatihan, sarana prasarana pelatihan kerja, tata kelola LPK dan Keuangan. “Kalau ada orang yang tidak punya pengalaman pelatihan lalu dijual, ini yang bikin bahaya,” ujarnya.

Para mitra pemerintah dan manajemen pelaksana yang bertugas sebagai pengkurasi dan pengawas, lanjut Eka, seharusnya tidak buru-buru menyeleksi lembaga pelatihan. Salah pilih lembaga abal-abal bisa bermunculan.

“Saya menduga, orang-orang di (program kartu) prakerja selain buru-buru mereka tidak paham bagaimana bisa kompeten,” kata Eka.

Redaksi Jaring.id.

Sumber: <https://jaring.id/dari-lingkar-istana-hingga-perusahaan-anyar/>.

ATURAN LUWES PROGRAM KARTU PRAKERJA

Jaring.id edisi 2 Juni 2020.

Juna Rorimpandey bukan nama asing di jagat masak-memasak. Tak banyak orang yang bisa belajar langsung dari pria yang karib dikenal sebagai Chef Juna tersebut. Namun, kali ini kesempatan itu terbuka lebar. Tak terkecuali bagi Hasbiyah, perempuan yang baru saja dipecat (PHK) oleh sebuah perusahaan di Cakung, Jakarta Timur.

Hasbiyah adalah satu dari ratusan ribu peserta program Kartu Prakerja. Saat modal mengikuti pelatihan sebesar Rp1 juta diterima, ia tidak bisa tidak semringah. Bayangan menjadi ahli memasak segera menyergap. "Saya beli paket kelas itu Rp250 ribu, sisa saldo saya Rp750 ribu," ujar Hasbiyah saat dihubungi Klub Jurnalis Investigasi (KJI), tim kolaborasi antarmedia yang terdiri dari *Jaring.id*, *Tempo*, *Suara.com* dan *Alinea.id* pada Rabu, 20 Mei 2020.

Hasbiyah serius menyimak tayangan kelas memasak melalui layar telepon pintarnya. Mula-mula Chef Juna memperkenalkan diri, lalu menjelaskan alat memasak yang kerap digunakannya. Penjelasan berjalan satu arah, tak ada interaksi antara pemateri dengan peserta. Kesabaran Hasbiyah menipis. Ia mempercepat tayangan. "Durasinya lumayan lama," kata Hasbiyah.

Impian Hasbiyah berganti kecewa lantaran video yang dia tonton tidak menambah wawasannya soal memasak. Menurutnya, banyak kelas memasak yang lebih layak dan bisa ditonton secara gratis di layanan berbagi video. Saldo Kartu Prakerja sebesar Rp250 ribu yang kadung dipakai, dirasanya sia-sia. "Situasi seperti sekarang mending diberikan saja uang itu untuk kebutuhan sehari-hari," ujarnya.

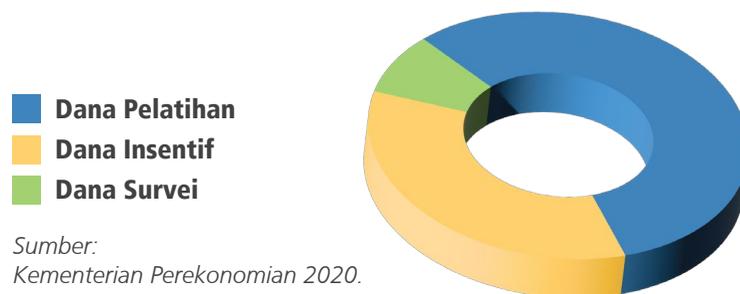
Keluhan lain disampaikan Muhammad Ridwan (bukan nama sebenarnya). Dana insentif sebesar Rp600 ribu yang ia tunggu, tak kunjung masuk ke rekening. Insentif sebesar itu merupakan dana tunai yang dapat diterima tujuh hari setelah peserta Kartu Prakerja merampungkan pelatihan. Sementara sejak 28 April 2020 lalu Ridwan sudah merampungkan seluruh prosedur. Mulai dari menyelesaikan pelatihan hingga memberikan ulasan terhadap lembaga pelatihan.

Ridwan tak tinggal diam. Ia mengirim surel ke pelaksana program Kartu Prakerja untuk menanyakan kapan dana insentif bakal turun. Langkah tersebut dilakukannya dua kali, terakhir pada 1 Mei 2020. Namun, sekalimat jawaban pun tak ia terima hingga dua belas hari kemudian, pesan pemberitahuan masuk ke telepon genggamnya. Isinya soal dana insentif yang sudah turun. "Cukup lama menunggu," ujarnya.

Hasbiyah dan Ridwan merupakan bagian dari 600 ribuan peserta yang diterima dalam tiga gelombang pendaftaran Kartu Prakerja. Program tersebut pertama kali diluncurkan pada 11 April 2020 sebagai realisasi janji kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin saat pemilihan presiden 2019. Melalui program ini pemerintah memberikan bantuan biaya pelatihan bagi warga untuk meningkatkan keterampilan hingga siap bekerja.

Sasaran utama Kartu Prakerja adalah lulusan sekolah menengah atas (SMA-sederajat), pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, berusia minimal 18 tahun, dan tidak sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Pembagian Anggaran Program Kartu Prakerja (Dalam Bentuk Rupiah).



Namun, munculnya pandemi Covid-19 membuat program Kartu Prakerja dimodifikasi. Program ini beralih menjadi semi bantuan sosial (Bansos) dengan porsi nilai insentif yang besarnya hampir tiga per empat nilai total program. Pelaku usaha kecil yang bisnisnya digulung pelemahan ekonomi akibat pandemi pun turut disasar sebagai peserta.

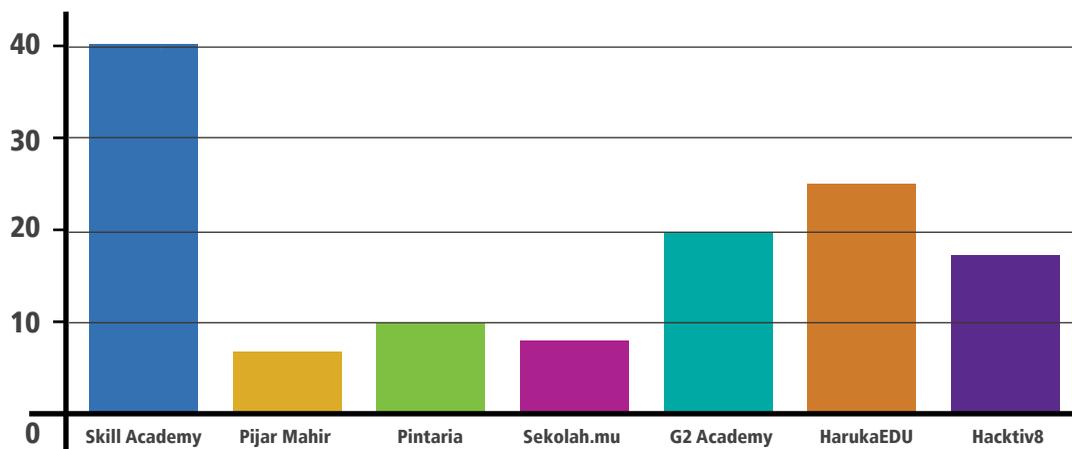
Fungsi Ganda

Desain dari program Kartu Prakerja nyatanya tak hanya meninggalkan keluhan para peserta. Beberapa kejanggalan pun muncul. Salah satunya ialah rangkap fungsi dari beberapa penyedia jasa yang tergabung dalam prakerja. Empat mitra program dan

dua mitra kolaborator pemerintah tidak hanya tercatat sebagai produsen materi pembelajaran, tetapi juga mendistribusikan materi pembelajaran melalui situs mereka.

KJI mengunjungi situs *skillacademy.com* pada Sabtu, 31 Mei 2020. Di bagian atas laman tersebut terdapat kelas populer berisi 17 paket yang membundel 99 materi pembelajaran. Seluruh materi dalam paket tersebut diproduksi oleh Skill Academy. Paket yang dibundel juga dibumbui dengan potongan harga.

Lembaga Pelatihan Merangkap *Platform Digital* Kolaborator (Berdasarkan Catatan Kritis Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja).



Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW).

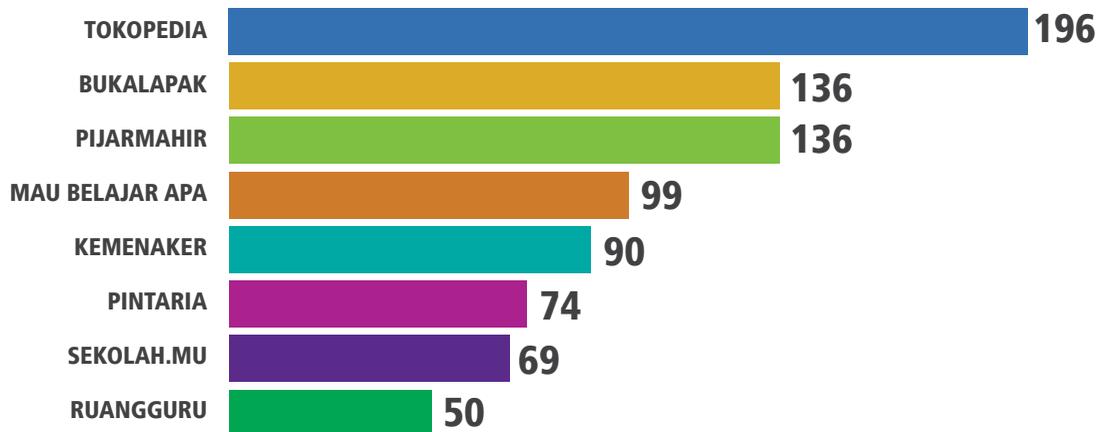
Peran ganda juga didapati pada Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, G2 Academy, dan Hacktiv8. Total ada 148 materi pembelajaran yang diproduksi oleh perusahaan yang memiliki *platform* pembelajaran daring.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dilansir *Katadata*, pada gelombang pertama Kartu Prakerja sebanyak 121,3 ribu peserta program Kartu Prakerja mengakses materi pembelajaran melalui Ruangguru. Sementara itu, 25,8 ribu mengaksesnya melalui Tokopedia, 23,7 ribu peserta melalui Sisnaker, dan 20,9 ribu peserta melalui Bukalapak. Selanjutnya, pelatihan yang dibuat oleh Pintaria diakses 16,1 ribu peserta, Sekolahmu 13,8 ribu peserta, Pijar Mahir 5,3 ribu peserta, dan Mau Belajar Apa 4,7 ribu peserta.

Wana Alamsyah, Peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menilai rangkap fungsi terjadi lantaran Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 3 tahun 2020 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 mengenai Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja memberikan kewenangan seleksi materi pembelajaran kepada mitra digital. Beleid tersebut juga tak memberi sanksi tegas kepada mitra yang punya fungsi ganda.

Sebaran Pelatihan Berdasarkan Platform Digital Berdasarkan Analisis Indonesia Corruption Watch (ICW).



Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW).

“Bagaimana mungkin platform digital yang memiliki tugas kurasi dan pengawasan, melakukan hal tersebut pada lembaganya sendiri di waktu yang bersamaan,” kata Wana saat memberikan keterangan pers bersama KJI pada, Senin, 11 Mei 2020.

Beda Komisi

ICW juga menyoroti ketidakjelasan pengambilan komisi yang diambil delapan mitra penyedia materi pembelajaran. Dalam sejumlah aturan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan program Kartu Prakerja, tidak ada ketentuan yang pasti mengenai besaran komisi yang berhak diterima platform digital. Pasal 52 ayat 1 Permenko 3/2020 hanya menyebut bahwa “Platform digital diperbolehkan mengambil komisi jasa yang wajar dari lembaga pelatihan yang melakukan kerja sama.”

Sementara itu, ayat 2 pasal tersebut mengatur bahwa besaran komisi diatur dalam perjanjian kerja sama dan mendapat persetujuan Manajemen Pelaksana. Sayangnya, perjanjian kerjasama tersebut tidak diinformasikan kepada publik. Padahal, menurut Wana, hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik yang menjelaskan kalau badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi perjanjian badan publik dengan pihak ketiga. "Ini kami anggap semacam program menguntungkan beberapa pihak saja selama masa pandemi," ujar Wana.

Public Relation Lead Ruangguru, Sekar Krisnauli menilai semua proses yang berlangsung sudah mengikuti aturan peraturan presiden dan peraturan menteri perekonomian serta melalui koordinasi dengan manajemen pelaksana. "Kami tegaskan bahwa tidak ada alokasi dana dari pemerintah yang diberikan langsung kepada Ruangguru dan mitra pelatihan," kata Sekar kepada KJI, Kamis, 7 Mei 2020.

Sementara itu, *VP of Corporate Communications* Tokopedia, Nuraini Razak enggan menjelaskan detail keuntungan yang diterima perusahaan dari program Kartu Prakerja. Ia meminta tim KJI untuk menanyakan hal tersebut kepada manajemen pelaksana program Kartu Prakerja. "Ditanyakan langsung ke lembaga Kartu Prakerja melalui panji.ruky@prakerja.go.id," kata Astri Wahyuni saat dikonfirmasi tim KJI pada Rabu, 7 Mei 2020.

Pertanyaan serupa yang diajukan kepada *Assistant Vice President External Communication* PT Telekomunikasi Indonesia (persero) Tbk, Panji Pramono, tak direspons. Tim KJI berusaha menelepon yang bersangkutan, tetapi tak diangkat. Usaha mengirim pesan singkat melalui WhatsApp juga menemui jalan buntu. Pun begitu dengan surat permintaan wawancara yang dilayangkan melalui surel, tak direspons hingga liputan ini dipublikasikan.

Sebagai catatan, PT Telekomunikasi Indonesia merupakan produsen materi pembelajaran dengan bendera pijarmahir sekaligus pemilik *platform* penyedia materi pembelajaran *pijarmahir.id*.

Direktur Biro Komunikasi Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky saat dikonfirmasi soal perbedaan komisi wajar tiap lembaga mengaku sudah menerapkan kompetisi sehat dalam pengambilan komisi. Menurutnya, selama itu tidak dipersoalkan maka kepastian komisi wajar belum diatur.

"Prinsip kemitraan dalam Kartu Prakerja adalah terbuka dan berbasis pada kompetisi atau persaingan sehat. Komisi belum perlu diatur batas-batasnya," kata Panji saat dikonfirmasi tim KJI pada Rabu, 20 Mei 2020.

Pemerintah dan perusahaan memang enggan bicara banyak soal nilai komisi yang diambil penyedia materi pembelajaran. Namun, *platform maubelajarapa.com*

menjelaskan dalam situsnya bahwa mereka menerapkan biaya administrasi dan pemasaran sebesar 20 persen dari tiket kelas yang terjual melalui *maubelajarapa.com*.

Persaingan Tak Sehat

Direktur Eksekutif Yayasan Nusantara Sejati, Eka Simanjuntak meminta para mitra dan manajemen pelaksana sebagai pengkurasi agar lebih transparan dan objektif memilih lembaga pelatihan agar terjadi persaingan usaha yang sehat. Menurutnya, pemerintah bisa melanggar pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jika hal tersebut tidak dijalankan.

Lelaki yang juga menjabat *Managing Director* Willi Toisuta & Associates tersebut mendorong pemerintah membuat aturan tentang pengawasan mitra pelatihan dan mitra digital yang terlibat dalam Kartu Prakerja. Aturan tersebut, lanjutnya, harus mengatur batasan, peran, serta membentuk tim kurasi yang independen agar dapat menjauhi konflik kepentingan. "Kalau tidak ada kontrol, bebas saja semua membuat program (pelatihan kerja *-red*)," kata Eka pada Jum'at, 1 Mei 2020.

Direktur Biro Komunikasi Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky menilai tak ada masalah dalam fungsi rangkap perusahaan sebagai produsen materi pembelajaran sekaligus pemilik *platform digital*.

"Kami melihatnya itu (mereka *-red*) lembaga pelatihan, bukan *platform digital*. Kalau dianggap ada konflik kepentingan, ini harus dilihat dulu. Karena juri utamanya yang menentukan bukan kamu," kata Panji saat dikonfirmasi tim KJI melalui aplikasi Zoom pada Minggu, 10 Mei 2020.

Panji mengakui saat ini manajemen pelaksana terus melakukan perbaikan sistem pelaksanaan program Kartu Prakerja. Namun, ia enggan menjawab detail soal perbaikan yang sedang dilakukan.

"Saat ini kami masih mencari proses yang lebih optimal untuk evaluasi. Karena baru mulai, jadi kita kan lihatnya berdasarkan Permenko," ucapnya.

Redaksi Jaring.id

Sumber: <https://jaring.id/aturan-luwes-program-kartu-prakerja/>

‘MENDADAK GURU’, MELACAK LEMBAGA KURSUS DADAKAN PADA PROYEK KARTU PRAKERJA

Suara.com edisi 2 Juni 2020.

Kartu Prakerja muncul bak juru selamat, persis saat banyak pekerja terkena PHK akibat wabah virus corona. api belakangan, program itu disoal, dianggap tak menjawab kebutuhan angkatan kerja. Latar belakang lembaga pemberi kursus berbayar justru dipertanyakan.

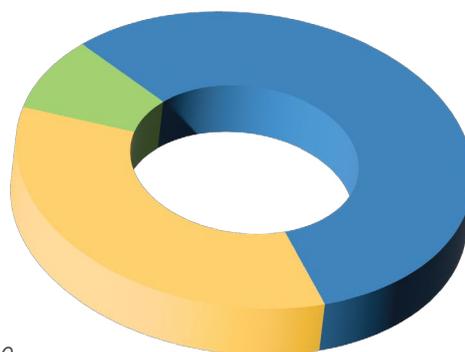
Sejak diluncurkan pertengahan Maret 2020, Kartu Prakerja panen kritik. Program yang dananya membengkak dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun tersebut, memicu polemik. Persoalan yang menjadi perdebatan itu mulai dari kebijakan, pemilihan mitra *platform*, hingga termutakhir adalah adanya lembaga pelatihan dadakan yang ikut tergabung dalam program tersebut.

Jurnalis *Suara.com* yang tergabung dalam Klub Jurnalis Investigasi (KJI), berkolaborasi dengan jurnalis *Tempo*, *Jaring.id* dan *Alinea.id*, menelusuri sejumlah permasalahan mengenai proyek Kartu Prakerja. Ada sebilangan kejanggalan terkait program Kartu Prakerja. Salah satunya, kualitas lembaga pelatihan yang menjadi pengampu kursus berbayar.

Pembagian Anggaran Program Kartu Prakerja (Dalam Bentuk Rupiah).

- Dana Pelatihan
- Dana Insentif
- Dana Survei

Sumber:
Kementerian Perekonomian 2020.



Kursus Berbayar yang Sia-sia

Sudah tiga bulan Hasbiyah menganggur karena diputus hubungan kerjanya oleh PT Greentex Indonesia Utama. Pabrik garmen tempatnya bekerja di Cakung, Bekasi, Jawa Barat berhenti beroperasi akibat pandemi virus corona Covid-19. Untuk menyambung hidup, ibu tiga anak ini menjual jasanya sebagai tukang bersih-bersih rumah melalui aplikasi Go-Clean.

Namun itu juga tak membantu, sebab dalam sepekan, ia hanya dapat satu kali orderan untuk bersih-bersih rumah. Permintaan jasa bersih rumah via Go-Clean juga sepi di tengah situasi wabah corona. Pikiran Hasbiyah yang membunyah, terobati ketika dia mengetahui ada pengumuman gelombang pertama peserta program Kartu Prakerja. Dia langsung mendaftar.

Hasbiyah tak langsung diterima, dia tak lolos pendaftaran gelombang pertama, karena kuota sudah penuh. Barulah pada gelombang kedua penerimaan peserta Kartu Prakerja, Hasbiyah dinyatakan lolos. Beberapa hari kemudian, ia mendapat kiriman saldo Rp1 juta.

Uang virtual itu wajib ia belanjakan membeli paket kelas memasak ala Chef Juna dari Lembaga pelatihan *Kelas.com* di *Tokopedia.com* senilai Rp250 ribu. "Sisa saldo saya masih ada Rp750 ribu," kata Hasbiyah kepada tim Klub Jurnalis Investigasi (KJI), Rabu, 6 Mei 2020.

Hasbiyah serius menyimak video pemaparan Chef Juna melalui telepon pintarnya. Dalam video, lelaki juru masak bernama lengkap Juna Rorimpandey itu justru lebih banyak menceritakan pengalaman hidup hingga menjadi juru masak kondang. Kemudian, masih dalam video yang disaksikan Hasbiyah, Chef Juna juga turut menjelaskan berbagai macam peralatan yang digunakan, hingga cara memasak macam-macam jenis makanan. Terdapat 30 cuplikan video yang berdurasi cukup panjang, sekitar satu jam. "Saya percepat saja menonton tayangan itu," kata Hasbiyah.

Namun, ia merasa kecewa, tak ada yang istimewa dalam pelatihan secara daring tersebut. Sebab, banyak video cara memasak yang lebih lengkap dan bisa didapat secara gratis pada laman-laman daring. Menurutnya, anggaran Rp1 juta buat satu orang peserta Kartu Prakerja yang diharuskan sebagai biaya pelatihan daring di tengah kesulitan ekonomi rakyat akibat pandemi wabah Covid-19, menjadi sia-sia. "Saya lebih butuh bantuan tunai untuk kebutuhan sehari-hari. Karena saat situasi

saat ini, kami serba kekurangan. Mendingan diberikan saja uang pelatihan itu untuk kebutuhan sehari-hari.”

Perempuan ini berharap, insentif senilai Rp600 ribu dari Kartu Prakerja segera cair. Tujuan utama Hasbiyah mengikuti program Kartu Prakerja sebenarnya adalah uang insentif itu, untuk penyambung hidup setelah tiga bulan di PHK di tempat kerja yang lama.

“Setelah dapat sertifikat dari pelatihan itu, saya juga bingung buat apa. Karena untuk mencari kerja sekarang susah. Pada situasi sekarang ini, kami butuhunya uang buat beli sembako,” ucap Hasbiyah.

“Setelah dapat sertifikat dan pelatihan itu, saya juga bingung buat apa. Karena untuk mencari kerja sekarang susah. Pada situasi sekarang ini, kami butuhunya uang buat beli sembako.”

Lain lagi Gerry Lutfiansyah, mantan karyawan hotel korban PHK ini kesulitan mengakses program Kartu Prakerja. Gerry mengakui sudah tiga bulan menganggur karena diberhentikan dari tempat kerjanya, Savero Hotel, yang terdampak pandemi corona. Sejak gelombang pertama pada 14 April 2020, ia telah mendaftar program Kartu Prakerja, namun gagal. Pada gelombang kedua dan ketiga pendaftaran, dia juga tetap tidak lolos. “Pengalaman saya sudah banyak untuk mendaftar jadi peserta. Saya tiga kali mendaftar, tetap tidak berhasil, keterangannya karena sudah melebihi kuota,” kata Gerry.

Gerry menuturkan, orientasinya ikut program Kartu Prakerja adalah berharap dapat uang insentif Rp600 ribu. Menurutnya, buruh korban PHK seperti dia tidak terlalu membutuhkan pelatihan prakerja di tengah situasi pandemi. “Saat ini yang kami butuhkan adalah bantuan tunai buat kebutuhan sehari-hari. Karena untuk mencari pekerjaan sekarang juga susah. Percuma pelatihan tapi lapangan pekerjaan tidak ada, buat apa sertifikat pelatihan itu, tidak ada gunanya,” kata Gerry, mencibir.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Tatik Suharti, eks buruh pabrik garmen di Jakarta Timur. Ibu tiga anak ini terkena PHK dari PT Greentex Indonesia Utama pada tiga bulan lalu. Tatik mengakui sudah kali ketiga mendaftar program Kartu Prakerja, tapi tetap gagal diterima.

Padahal, Tatik sangat berharap bisa ikut pelatihan prakerja, agar mendapat wawasan dan uang insentif guna membiayai kebutuhan keseharian. “Tadinya besar harapan saya bisa ikut program Kartu Prakerja dan dapat insentif. Karena saya sudah tidak punya penghasilan lagi setelah PHK dari tempat kerja yang lama,” kata dia.

Untuk diketahui, program Kartu Prakerja ini realisasi janji kampanye Joko Widodo-Maruf Amin saat masa Pemilihan Presiden 2019. Diluncurkan pada 11 April 2020 - saat kondisi ekonomi melemah akibat pandemi virus corona - program ini beralih menjadi semi-bantuan sosial, dengan porsi nilai insentif yang besarnya hampir tiga per empat nilai total proyek.

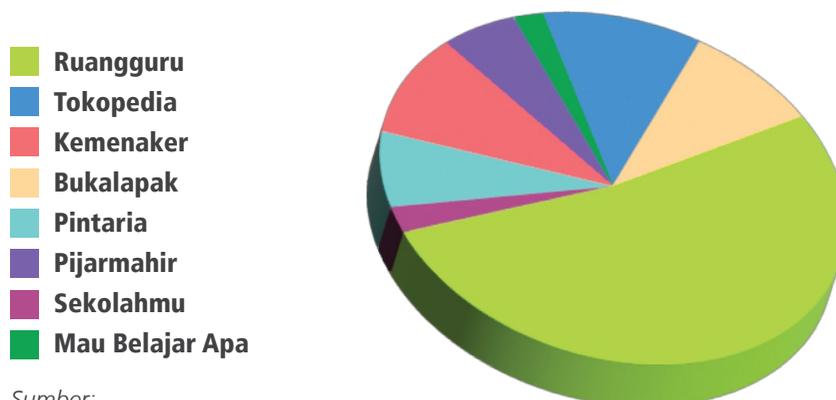
Lembaga Pelatihan Dadakan

Mengikuti kursus berbayar adalah kewajiban bagi peserta Kartu Prakerja. Menjadi anak didik dalam kursus daring adalah syarat mutlak guna mendapat insentif Rp600 ribu. Bahkan, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari menegaskan, dana insentif akan otomatis hangus bila peserta tidak mengikuti pelatihan dalam tempo sebulan setelah mendapat dana tersebut. Artinya, peserta program Kartu Prakerja harus mengikuti kelas pelatihan pertama maksimal satu bulan setelah pemerintah mentransfer dana insentif ke rekening peserta.

"Jadi kebijakan dari Pak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto) adalah jika bantuan tidak digunakan dalam waktu satu bulan maka akan hangus, ditarik negara," ungkap Denni dalam konferensi video, Rabu, 22 April 2020. Terdapat 147 lembaga pelatihan yang menyediakan kursus daring berbayar dalam program Kartu Prakerja.

Rinciannya, 111 penyelenggara berbentuk lembaga, dan 36 lain berbentuk individu yang tersebar dalam 8 *platform digital* mitra Kartu Prakerja: Tokopedia, Bukalapak, Pijar Mahir, Sekolah.mu, Pintaria, Skill Academy, MauBelajarApa dan Kemnaker.

Jumlah Peserta Pengakses Mitra Platform Digital pada Gelombang I (Dalam Bentuk Ribuan).



Sumber:
Kementerian Perekonomian 2020, Katadata.

Namun, dari hasil penelusuran *Indonesia Corruption Watch* (ICW) - mitra Klub Jurnalis Investigasi - ditemukan sejumlah lembaga pelatihan dadakan, yang latar belakang serta kualitas pengajarannya masih diragukan.

Disebut lembaga pelatihan dadakan, karena institusi-institusi tersebut baru didirikan menjelang peluncuran program Kartu Prakerja. Misalnya, Boleh Dicoba Digital, mereka memberikan layanan *e-commerce web development; digital marketing and digital campaign optimizing; digital marketing and digital campaign strategy; dan, digital advertisement*.

Boleh Dicoba Digital, dalam fasilitas kursus daring Kartu Prakerja, menjual kelas pelatihan "Memasang Iklan di Facebook dan Instagram Secara Baik dan Benar" yang dibandrol seharga Rp300 ribu. Ketika ditelusuri melalui laman daring *bolehdicoba.com* dan akun instagram @bolehdicobadigital, lembaga tersebut tidak memiliki pengalaman menyelenggarakan pelatihan secara *online* maupun *offline*.

Ada pula lembaga pelatihan BLK Komunitas Ponpes Al-Aitaam, yang menjual pelatihan "Junior Desain Grafis" sebesar Rp1 juta melalui Kartu Prakerja. Namun, BLK Komunitas Ponpes Al-Aitaam patut dipertanyakan pengalamannya menggelar pelatihan daring dengan materi "Junior Desain Grafis". Sebab, setelah diperiksa tim KJI, Yayasan Al-Aitaam merupakan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga politeknik, tapi tak memiliki pengalaman melakukan pelatihan secara *online*.

Begitu pula lembaga pelatihan Vokraf, yang ternyata laman daring resminya baru terbentuk pada 28 Agustus 2019, atau 8 bulan sebelum program Kartu Prakerja diluncurkan. Sedangkan *grand launching* Vokraf sebagai *platform* edukasi *online* dilakukan pada 21 Februari 2020, atau tepat 7 hari sebelum munculnya Perpres 36/2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Program Kartu Prakerja. Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah lembaga ini memiliki pengalaman dalam melakukan pelatihan, sehingga lolos seleksi kurasi oleh manajemen pelaksana kursus Kartu Prakerja? Vokraf menawarkan lima pelatihan, seperti *digital strategist, 3D animator, copywriter, YouTube content creator, dan graphic designer*.

Masing-masing kelas pelatihan itu dibanderol harga Rp300 ribu di mitra *platform* Sisnaker, layanan yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Setelah ditelusuri, lembaga ini didirikan oleh Fani Silmi Febriyani, bekas tim Direktorat Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin. Fina, CEO Vokraf, saat dikonfirmasi tim KJI mengenai kompetensi lembaganya yang diragukan, enggan berkomentar. "Saya lagi enggak

open untuk diwawancarai. Mungkin lain waktu, maaf dan terima kasih ya,” kata Fina melalui pesan WhatsApp, Kamis, 14 Mei 2020.

Hal yang sama juga dilakukan Amithya Institute, lembaga ini merupakan bagian dari Amithya Hotels and Resort. Mereka mengaku sebagai lembaga pelatihan yang memberikan keterampilan dan pendidikan bidang perhotelan atau *hotelier* dan jasa boga alias *food and beverage*.

Belakangan diketahui, CEO Amithya Institute adalah Rucita Permatasari, yang merupakan Wakil Bendahara Partai Golkar Jawa Timur. Peresmian lembaga ini baru dilakukan pada 9 Maret 2020, atau 11 hari sebelum peluncuran program Kartu Prakerja. Peresmian lembaga ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa.

Tim KJI telah menghubungi CEO Amithya Institute, Rucita Permatasari untuk mengkonfirmasi mengenai keberadaan lembaganya tersebut melalui telepon, WhatsApp, hingga mengirimkan surat permohonan wawancara. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban dari yang bersangkutan.

Selain itu, kejanggalan lain adalah 36 lembaga pelatihan dari individu, yang belakangan diketahui seluruhnya terdaftar pada *platform digital Skill Academy*. Sebanyak 10 di antaranya merupakan individu yang masih terkait Ruang Guru dan Skill Academy. Misalnya, Iman Usman, pendiri dan Direktur Produk dan Kerjasama Ruangguru.

Ada pula pelatihan dari Arman Wiratmoko, *Vice President of Corporate Strategy and Finance* Ruang Guru; dan Adilla Ina Diningsih, *SVP Sales & Marketing* Ruangguru. Sementara dalam Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020, tidak pernah dijelaskan mengenai lembaga pelatihan yang penyelenggaranya bersifat individu.

Pasal 26 Permenko Perekonomian No. 3/2020 mengatur serangkaian kriteria yang harus dipenuhi lembaga pelatihan, misalnya memiliki kerja sama dengan *platform digital*. Lembaga pelatihan pada Kartu Prakerja juga wajib mempunyai perizinan berusaha atau nomor induk berusaha (NIB), yang diterbitkan oleh sistem *Online Single Submission* (OSS). Kriteria tersebut, tentu akan sulit terpenuhi bila lembaga pelatihan yang menyelenggarakan kursus adalah individu.

Peneliti ICW, Wana Alamsyah mengatakan, kualitas sejumlah lembaga pelatihan dadakan tersebut patut diragukan. Pasalnya, lembaga-lembaga tersebut belum

teruji dan berpengalaman dalam menyelenggarakan pelatihan daring. Dia mengatakan, keberadaan lembaga pelatihan dadakan sebagai mitra pelatihan Kartu Prakerja dinilai bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Pasal 2 Perpres itu menyebutkan, tujuan program Kartu Prakerja adalah mengembangkan kompetensi angkatan kerja, dan meningkatkan produktivitas serta daya saing angkatan kerja. “Bagaimana pemerintah dapat mencapai tujuan tersebut, kalau lembaga pelatihan yang menyelenggarakan kursusnya pun masih dipertanyakan pengalaman dan kemampuannya,” kata Wana.

“**Bagaimana pemerintah dapat mencapai tujuan tersebut, kalau lembaga pelatihan yang menyelenggarakan kursusnya pun masih dipertanyakan pengalaman dan kemampuannya.**”

Sesuai Persyaratan

Eka TP Simanjuntak, Direktur Eksekutif Yayasan Nusantara Sejati sekaligus peneliti kebijakan pelatihan ketenagakerjaan, meminta pemerintah menghentikan dan menunda program Kartu Prakerja. Sebab, program ini menimbulkan banyak kejanggalan dan sejumlah permasalahan, seperti kompetensi sejumlah lembaga pelatihan yang belum terakreditasi.

Persoalan itu, kata Eka, karena pelaksana manajemen Kartu Prakerja dan mitra swasta tak mempunyai sistem guna mengukur kualitas pelatihan, apakah mampu meningkatkan kompetensi peserta atau tidak. Ia mengatakan, pemerintah harus mengacu Pasal 23 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan, untuk memilih lembaga pelatihan atau mitra dalam program Kartu Prakerja.

Aturan itu, kata dia, menjelaskan lembaga pelatihan harus terakreditasi Kementerian Ketenagakerjaan melalui Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia (KMPI). Ada delapan pedoman yang dinilai, seperti kompetensi kerja, kurikulum dan silabus, materi pelatihan kerja, penilaian pelatihan kerja, tenaga pelatihan, sarana prasarana pelatihan kerja, tata kelola LPK, dan Keuangan.

“Kalau ada orang yang tidak punya pengalaman pelatihan, lalu dijual, ini yang bahaya,” kata Eka. Eka menilai, regulasi yang dibuat untuk program Kartu Prakerja

“ Saya menduga orang-orang di program Kartu Prakerja selain buru-buru, mereka tidak paham bagaimana bisa kompeten.” ”

sejak awal sudah janggal, khususnya terkait izin lembaga pelatihan yang menjadi mitra pelatihan.

Pasal 6 ayat 2 Perpres 36/2020 menyebutkan, lembaga pelatihan memenuhi persyaratan paling sedikit, *pertama* memiliki *platform digital*, pelatihan dilakukan oleh lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan yang bekerja sama dengan penyedia *platform*. *Kedua*, memiliki kompetensi sesuai dengan pasar kerja. *Ketiga*, mendapat persetujuan dari Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja.

“Ini aneh, kalau pelatihan yang memberikan izin kan Kemanaker dan Kemendikbud, sedangkan manajemen pelaksana kan bukan sekaliber menteri, kenapa bisa memberikan izin,” kata dia. Dia menambahkan, mitra pemerintah dan manajemen pelaksana yang bertugas sebagai kurator dan pengawas menyeleksi lembaga pelatihan secara asal-asalan. Karenanya, muncul lembaga pelatihan abal-abal.

“Saya menduga orang-orang di program Kartu Prakerja selain buru-buru, mereka tidak paham bagaimana bisa kompeten,” ujar Eka.

Direktur Biro Komunikasi Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky, mengklaim semua lembaga pelatihan sudah memenuhi aturan yang ditetapkan dan telah melalui kurasi. “Kurasinya sesuai permenko, jadi setiap lembaga pelatihan sudah memenuhi syarat,” katanya.

Tim Liputan Khusus.

Sumber: <https://liks.suara.com/read/2020/06/02/060500/mendadak-guru-melacak-lembaga-kursus-dadakan-pada-proyek-kartu-prakerja>

PROGRAM KARTU PRAKERJA DAN MUNCULNYA LEMBAGA PELATIHAN TAK KOMPETEN

Alinea.id edisi 2 Juni 2020

Sejak diluncurkan pada Maret 2020, Kartu Prakerja mengundang polemik. Banyak masalah yang belum bisa terjawab.

Sungguh apes nasib Muhammad Ridwan, bukan nama sebenarnya. Pada Maret 2020, baru dua minggu bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan *fintech*, akibat pandemi SARS-CoV-2 penyebab *coronavirus disease* 2019 (Covid-19), ia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Perusahaan tempatnya bekerja harus melakukan hal itu sebagai strategi bertahan di masa pandemi. Malangnya, pemuda 24 tahun itu kesulitan mencari pekerjaan baru saat pandemi masih mengancam. Lantas, berbekal informasi dari koleganya, Ridwan mencari peruntungan dengan mendaftarkan diri dalam program Kartu Prakerja, sebuah program “penyelamat” dari pemerintah yang diluncurkan pada Maret 2020.

Ridwan dinyatakan lolos pendaftaran gelombang pertama pada awal April 2020. Namun, prosesnya tak semudah yang ia bayangkan. Ia tak paham metode pembelian program pelatihan yang disajikan delapan *platform* mitra program Kartu Prakerja, seperti Skill Academy by Ruangguru, Tokopedia, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolah.mu, Pijar Mahir, dan *Kemenaker.go.id*.

“Menurut saya (informasi pembelian kelas) kurang detail. Saya lebih banyak mendapat informasi itu dari teman yang lolos dan kerja di (*platform digital*) yang kerja sama dengan Kartu Prakerja,” ucap Ridwan kepada Klub Jurnalis Investigasi (KJI)—tim kolaborasi antarmedia yang terdiri dari *Alinea.id*, *Tempo*, *Jaring.id*, dan *Suara.com*—di Jakarta, Senin, 4 Mei 2020.

Teman Ridwan menyarankan untuk mengambil paket program “Sukses Kembangkan UMKM hingga Kebanjiran Order, Trik Menulis untuk Tingkatkan

Penjualan (*Copywriting*)” dari Skill Academy by Ruangguru. Ridwan pun mengikuti saran temannya. Ia mengambil paket kelas itu karena ada potongan Rp100.000 dari harga Rp999.000.

Akan tetapi, alumnus Universitas Veteran Jakarta itu menilai, model pembelajaran Skill Academy by Ruangguru tak efektif. Sebab, menurutnya, tak ada sistem pengawasan pembelajaran dalam menonton video dari enam kelas pada satu paket program pelatihan yang diambil. “Saya kira pertama ikut kelas ini harus *full* nonton *video*-nya untuk tambahkan progres kelas. Ternyata setelah saya *skip* (durasi videonya) tanpa ditonton, itu *progress* kelasnya nambah,” tuturnya.

Temuan ICW

Sejak diluncurkan pemerintah pada Maret 2020, program Kartu Prakerja menuai kritik beberapa pihak. Direktur Eksekutif Yayasan Nusantara Sejati, Eka Simanjuntak pun tak yakin program janji kampanye Presiden Joko Widodo itu bisa berjalan efektif. Masalahnya, praktik pembelajarannya dilakukan dengan metode daring.

“Saya saja enggak yakin kalau program ini diberikan untuk pelatihan konvensional berjalan maksimal, apalagi yang *online*,” kata Eka saat dihubungi pada Senin, 4 Mei 2020. Menurut Eka, selama ini tak ada regulasi yang mengatur pelatihan secara daring. Hanya pelatihan tatap muka yang ada regulasinya dalam peraturan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). “Di sana ada standar dan kurikulumnya, sudah diatur apa saja yang mesti dipenuhi. Termasuk standar pelatih dan penyelenggara. Kalau *online* sama sekali enggak ada,” ucapnya.

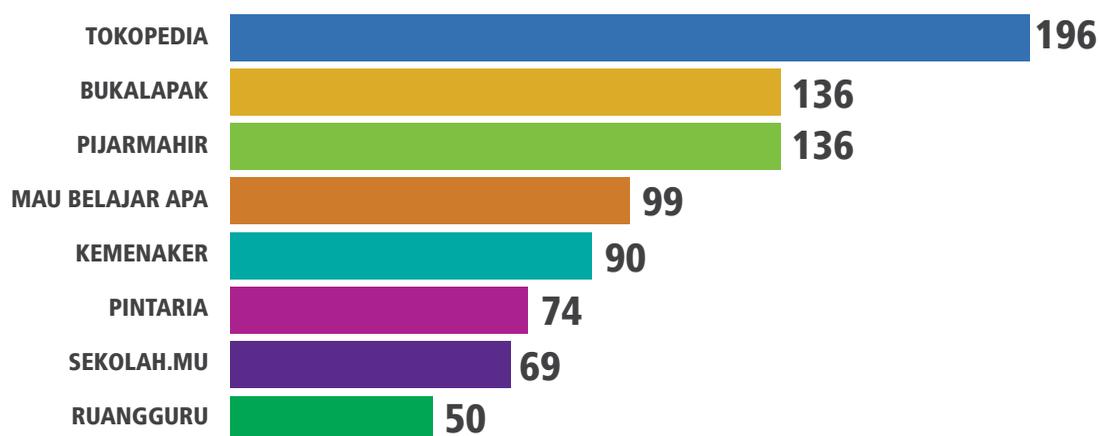
Tak ada aturan yang jelas dinilai Eka bisa menjadi celah munculnya pelatihan tak kompeten dalam program ini. Dengan modal *platform digital*, menurut Eka, lembaga yang minim pengalaman pun bisa menyediakan pelatihan untuk “dijual” dalam program Kartu Prakerja. Eka mengatakan, hal itu terjadi karena tak ada kurasi terhadap lembaga pelatihan. “Faktanya, Kartu Prakerja tidak ada yang mengawasi. Mereka hanya ada persetujuan manajemen,” katanya. “Pertanyaannya, mereka punya kualifikasi untuk mengkurasi enggak? Kalau ada yang menyeleksi, enggak mungkin lah ada pelatihan yang aneh-aneh.”

Sementara itu, Koordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Siti Juliantari - akrab disapa Tari - memandangi Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 3 Tahun

2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, yang merupakan ujung tombak regulasi terkait kurasi lembaga pelatihan, menjadi pangkal problem munculnya lembaga pelatihan tak kompeten.

“Regulasi tersebut tidak menjelaskan secara rinci standar lembaga pelatihan untuk dapat bergabung dalam program Kartu Prakerja,” kata Tari dalam diskusi virtual bertajuk “Prakerja: Penguasa Bantu Pengusaha? Catatan Kritis Program Kartu Prakerja” pada Senin, 1 Juni 2020. “Padahal, hal ini akan berdampak pada kualitas pelatihan.” Di dalam Permenko Perekonomian tersebut, kata dia, hanya ada izin. Akan tetapi detailnya, seperti berpengalaman atau tidak di bidangnya, tidak jelas.

Sebaran Pelatihan Berdasarkan *Platform Digital*.



Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW).

Temuan ICW, ada dua lembaga pelatihan yang diduga tak punya kompetensi untuk memberi pelatihan keterampilan kerja. *Pertama*, PT Boleh Dicoba Digital. Berdasarkan penelusuran ke situs *web Bolehdicoba.com* dan akun media sosial mereka, ICW menyimpulkan, lembaga yang menawarkan layanan pemasaran digital itu tak punya kompetensi dalam memberi pelatihan keterampilan, baik daring maupun konvensional.

Dalam program Kartu Prakerja, Boleh Dicoba Digital membuka kelas “Memasang Iklan di Facebook dan Instagram secara Baik dan Benar” melalui *platform Sekolah.mu*. Kelas tersebut berbiaya Rp300.000. “Kalau kita lihat, dia punya pengalaman misalnya membuat *web*, tetapi masih sedikit info yang kami temukan bahwa dia

“ Bagaimana orang-orang yang menjadi target ini bisa mendapat *skill* yang baik dan berkualitas, kalau lembaga pelatihannya juga tidak punya pengalaman yang mumpuni. ”

memiliki *track record* dalam melakukan pelatihan bidang prakerja,” kata Tari.

Kedua, badan latihan kerja (BLK) Komunitas Pondok Pesantren Al-Aitaam. Lembaga ini menawarkan kelas “Junior Desain Grafis” di *platform Kemenaker.go.id*, yang biayanya Rp1 juta. Berdasarkan penelusuran ICW, Yayasan Pendidikan Al-Aitaam merupakan lembaga pendidikan tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga politeknik. Namun, lembaga itu tak pernah punya pengalaman memberi pelatihan secara daring.

Menurut Tari, eksisnya lembaga-lembaga yang diduga tak kompeten sudah menyimpang dari prakarsa Kartu Prakerja, yakni meningkatkan kemampuan keterampilan bagi warga siap kerja. “Nah, bagaimana orang-orang yang menjadi target ini bisa mendapat *skill* yang baik dan berkualitas, kalau lembaga pelatihannya juga tidak punya pengalaman yang mumpuni,” ujar dia.

Di sisi lain, Staf Divisi Investigasi ICW, Wana Alamsyah menilai, proses kurasi program Kartu Prakerja bermasalah. Kesimpulan itu diambil berdasarkan temuan ICW, yaitu tak ada batas biaya sebuah jenis pelatihan yang ditawarkan.

Wana menuturkan, dari penelusuran di situs *web Prakerja.go.id*, ICW menemukan rentang biaya yang jomplang pada jenis pelatihan desain grafis. Dari sembilan lembaga yang menawarkan pelatihan desain grafis, ditemukan biaya terendah Rp250.000 dan tertinggi Rp1 juta.

Selain biaya pelatihan, standar diskon juga tak ada. Dari pemantauan ICW sejak 9-14 Mei 2020, harga diskon yang diberikan lembaga pelatihan, setiap hari mengalami perubahan. “Kalau seandainya silabusnya sama, kemudian materi yang diajarkan sama, pengajuannya sama, seharusnya itu harganya juga sama,” ujarnya dalam diskusi virtual pada Senin, 1 Juni 2020.

ICW pun menyoroti tak adanya batas wajar komisi yang diterima delapan *platform digital* mitra Kartu Prakerja. Besaran komisi, kata Wana, tak diatur detail dalam Permenko Perekonomian No. 3 Tahun 2020. “Sampai saat ini kita tidak mengetahui berapa komisi wajar yang disampaikan oleh setiap *platform digital*,” ucap Wana.

Berdasarkan penelusuran ICW, hanya ada satu lembaga pelatihan yang mencantumkan besaran komisi 20 persen, yang diberikan kepada *platform digital*,

yakni Mau Belajar Apa. Wana mengungkap, nilai keuntungan yang didapat *platform* mitra Kartu Prakerja bisa mencapai ratusan miliar rupiah, bila menyamakan besaran komisi Mau Belajar Apa.

“Kalau hitungan kasar Rp5,6 triliun ini diberikan pemerintah yang ketika dibagi ke delapan *platform*, sekitar Rp700 miliar yang bisa didapatkan,” kata Wana. “Ketika dibagi 20 persen, kira-kira kita menilai ada Rp140 miliar yang didapatkan oleh *platform digital* ketika program ini dilakukan.”

Oleh karenanya, ia menganggap, pemerintah keliru memaknai program Kartu Prakerja sebagai jaring pengaman sosial untuk menangani masyarakat terdampak pandemi. Ia menduga, program ini hanya tipu daya untuk menguntungkan pengusaha. “Secara konsep, ini prematur,” ucap Wana.

Harus Dievaluasi

Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky merespons temuan ICW. Ia justru menyambut baik munculnya lembaga baru penyedia pelatihan secara daring. “Lembaga tersebut menunjukkan pertumbuhan usaha dalam bidang pelatihan vokasi,” ujarnya saat dihubungi pada Rabu, 20 Mei 2020. Di samping itu, ia menganggap, beralihnya pelatihan keterampilan ke dalam bentuk daring adalah inovasi saat pandemi. “Ini menjadi suatu langkah bagi industri pelatihan kita untuk berevolusi. Kenapa kita anti dengan perubahan dan perbaikan?” ucap Panji.

Ia pun membantah tak ada proses kurasi dalam penetapan lembaga pelatihan. Panji menegaskan, proses asesmen sudah dilakukan, berpedoman pada Permenko Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020. Ia menjelaskan, lembaga pelatihan yang ingin mengadakan program harus memenuhi kriteria, seperti mempunyai jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kurikulum pelatihan keterampilan yang terukur, tenaga pelatihan yang kompeten, dan model evaluasi pembelajaran. “Jadi, semua kami ceklis. Selain itu, mereka juga harus punya NIB (Nomor Induk Berusaha),” ucapnya.

Ia menegaskan, pelaksanaan bisnis dalam program Kartu Prakerja bersifat terbuka dan berbasis pada persaingan usaha yang sehat. Meski begitu, Panji mengakui, batasan komisi belum perlu diatur. Alasannya, lembaga pelatihan diberi kesempatan bebas untuk menjalin kerja sama dengan mitra *platform digital*. “Apalagi saat ada *platform digital* wakil pemerintah, Sisnaker (sistem informasi ketenagakerjaan) yang mengenakan komisi 0 persen sebagai batas terendah di pasar ini,” kata Panji.

Panji pun mengaku, pihaknya belum bisa menghitung komisi yang masuk ke kantong delapan mitra *platform digital*. Ia beralasan, manajemen pelaksana masih melakukan pengumpulan data terhadap besaran komisi itu. “Karena program ini baru dimulai tiga gelombang, pasar pun masih menemukan ekuilibrium berbasis persaingan sehat antara pihak-pihak,” ucapnya.

Sementara peneliti ICW, Tibiko Zabar Pradano memandang, untuk mengevaluasi sejumlah hal yang kurang, program Kartu Prakerja harus dihentikan. “Pemerintah sebaiknya melakukan uji efektivitas juga program ini. Karena pelatihan secara daring, bisa dibilang belum banyak cerita sukses yang bisa dijadikan pelajaran,” katanya dalam diskusi virtual pada Senin, 1 Juni 2020.

Tibiko pun meminta pemerintah untuk mengevaluasi kerja sama dengan delapan *platform digital* mitra Kartu Prakerja. Tujuannya, agar tetap menguntungkan bagi negara dan masyarakat penerima manfaat. “Melihat catatan kita, ada dugaan pemborosan anggaran. Nah, ini yang perlu dilakukan evaluasi juga pada mitra *platform*,” ucapnya.

Sedangkan kolega Tibiko di ICW, Wana, mengajukan dua solusi kepada pemerintah. *Pertama*, pemerintah harus membenahi mekanisme pemilihan *platform digital*. Hal ini bertujuan untuk menghindari timbulnya masalah baru, bila ada penambahan *platform digital* mitra Kartu Prakerja. *Kedua*, pemerintah harus lebih selektif memilih masyarakat yang dapat menikmati program tersebut. Pemerintah juga diminta memfasilitasi masyarakat penerima manfaat untuk mengikuti rangkaian proses dari program Kartu Prakerja.

“Kalau saya cek, ternyata orang-orang kelompok rentan ini secara penetrasi internet pun tidak memiliki kesempatan yang bagus untuk dapatkan atau mengakses internet lebih baik,” kata dia. “Sehingga ini yang akan menjadi bias kelas yang dilakukan pemerintah, alih-alih memberikan program ternyata tidak tepat sasaran.”

Redaksi Alinea.id.

Sumber: <https://www.alinea.id/nasional/program-kartu-prakerja-dan-lembaga-pelatihan-tak-kompeten-b1ZOz9ulo>.

RELASI POLITIS DAN BAU MONOPOLI DI BALIK LAYAR KARTU PRAKERJA

Alinea.id edisi 3 Juni 2020.

Sejumlah penyedia jasa pelatihan ditengarai diberikan jalur khusus untuk ikut menggarap proyek Kartu Prakerja.

Delapan bulan sebelum program Kartu Prakerja resmi diluncurkan, *Vokraf.com* lepas landas ke jagat maya. Di laman situs yang didominasi warna biru dan putih itu, *Vokraf.com* menjual "mimpi" menjadi *copywriter*, *3D animator*, *graphic designer*, *Youtube content creator*, dan *digital strategist*.

Vokraf ialah situs resmi milik PT Kolaborasi Edukasi Nusantara. Fina Silmi Febriyani tercatat sebagai *Chief Executive Officer* (CEO) perusahaan itu. Sebelumnya, Fina juga pernah menjadi anggota Direktorat Konten Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin (TKN Jokowi-Ma'ruf).

Pada laman LinkedIn, Fina menyatakan bergabung di TKN Jokowi-Ma'ruf sejak Januari 2018 hingga Januari 2019. Lingkup tugasnya antara lain mengumpulkan data dan bahan yang diperlukan untuk debat, mengelola Konvensi Rakyat Indonesia Maju, dan mengorganisasi tim *advance* untuk kampanye terbuka di daerah.

Saat program Kartu Prakerja diresmikan pada 20 Maret lalu, *Vokraf* tergabung menjadi salah satu lembaga pelatihan di *platform Kemenaker.go.id*. Oleh manajemen pelaksana program Kartu Prakerja, *Kemenaker.go.id* ditunjuk sebagai salah satu mitra resmi pemerintah dalam program bernilai triliunan rupiah tersebut.

Tujuh mitra resmi pemerintah lainnya ialah Skill Academy by Ruangguru, Tokopedia, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, dan Pijar Mahir. Sebagaimana *Vokraf.com* di bawah naungan *Kemenaker.go.id*, masing-masing *platform* menyediakan puluhan jasa pelatihan berbasis digital.

"Kita tidak bisa (memastikan) dia (*Vokraf*) dapat proyek karena tidak memiliki bukti yang kuat. Tetapi, dalam konteks tersebut, kita menduga ada informasi yang didapat beberapa pihak sehingga munculnya beberapa *website* yang dikhususkan untuk

Kartu Prakerja ini," ujar peneliti *Indonesian Corruption Watch* (ICW), Siti Juliantari dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Senin, 1 Juni 2020.

Menurut Tari, sapaan akrab Siti, ada indikasi pemilihan mitra dan kolaborator dalam program Kartu Prakerja dipengaruhi relasi politik antara pihak swasta dan pejabat pemerintah di belakang layar.

Itu setidaknya tergambarkan dalam dalam laporan bertajuk "Polemik Mitra dan Lembaga Pelatihan Program Prakerja" yang digarap Tari bersama empat peneliti ICW lainnya, yakni Egi Primayoga, Wana Alamsyah, Tibiko Zabar, dan Lalola Easter.

Kentalnya bau relasi politis paling kentara dalam proses terpilihnya lembaga Skill Academy by Ruangguru. Saat Kartu Prakerja diluncurkan, Direktur Utama PT Ruang Raya Indonesia (Ruangguru), Adamas Belva Syah Devara menjabat sebagai salah satu Staf Khusus Presiden Jokowi. Di tengah kegaduhan mengenai konflik kepentingan antara Ruangguru dan Kartu Prakerja, Belva mundur dari posisinya sebagai stafsus pada 21 April silam. Namun demikian, Ruangguru hingga kini masih bertahan sebagai salah satu mitra program Kartu Prakerja.

Tak hanya itu, ICW juga mempersoalkan keberadaan pengusaha asal Singapura bernama Wilson Cuaca di belakang Ruangguru. Nama Wilson ada dalam akta perubahan kedua PT Ruang Raya Indonesia pada 19 Januari 2015. Wilson merupakan *co-founder* dan *managing partners* di East Ventures, sebuah firma modal ventura. Selain Ruangguru, East Ventures juga tercatat mendanai Traveloka, BerryBenka, dan Tokopedia. "Bagi ICW, relasi politik dan pihak lain dalam Ruangguru perlu ditelusuri lebih lanjut," ujar Tari.

Lembaga ketiga yang diduga dipilih menjadi kolaborator karena relasi politis adalah Amithya Institute. Lembaga itu menjajakan pelatihan keterampilan dan pendidikan di bidang perhotelan dan jasa boga. CEO-nya Rucita Permatasari, dari penelusuran ICW, Rucita atau yang akrab disapa Chita Choo pernah mencalonkan diri anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur dari dapil V. Chita juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Partai Golkar Jawa Timur.

ICW, kata Tari, menyatakan keterkaitan partai berlambang beringin itu dalam Program Kartu Prakerja sangat erat. Pasalnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto merupakan Ketua Umum Partai Golkar. "Ada juga *website* yang mendapatkan *privilege* untuk membuka kelas. Kami menduga ketika pemerintah bekerja sama dengan perusahaan swasta ini kan harus menjaga

jarak. Kalau mengetahui ada kerja sama, harus menggunakan prinsip pengadaan barang karena prosesnya kan harus adil," urai Tari.

Klub Jurnalis Investigasi (KJI) - beranggotakan reporter dari *Alinea.id*, *Suara.com*, *Tempo*, dan *Jaring.id* - mencoba mengonfirmasi temuan ICW itu kepada Fina dan Chita Choo. Kepada KJI, Fina menyatakan menolak untuk diwawancara.

"Saya lagi enggak *open* untuk diwawancara. Mungkin lain waktu. Maaf dan terima kasih, ya," ujar Fina dalam pesan singkat yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp pada Kamis, 14 Mei 2020.

KJI juga telah melayangkan surat permohonan untuk wawancara kepada Fina pada Senin, 18 Mei 2020. Namun demikian, surat yang dikirim KJI tidak direspons baik oleh Fina maupun Vokraf. Upaya konfirmasi pun dilakukan kepada Chita Choo dan Amithya Institute. Salah satunya via surat permintaan wawancara yang dikirimkan ke kantor Amithya di Surabaya. Setali tiga uang, Amithya dan Cita pun tidak merespons permintaan wawancara tersebut.

Bau Maladministrasi dan Monopoli Mitra Kartu Prakerja

Dalam kajiannya, ICW juga menduga terjadi maladministrasi dalam pemilihan mitra. Itu setidaknya terlihat dari langkah manajemen pelaksana program Kartu Prakerja yang telah menetapkan para mitra resmi jauh sebelum Permenko Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksana Perpres Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja diterbitkan.

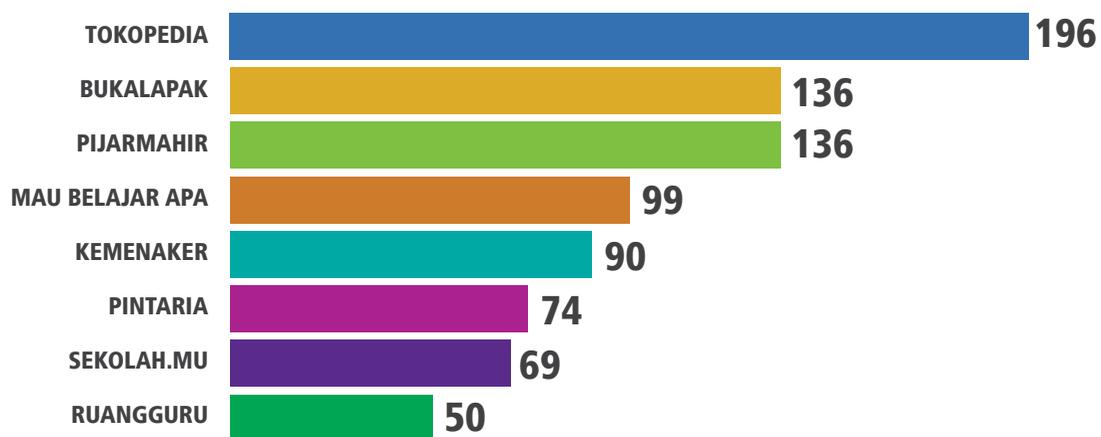
Perpres Nomor 36 Tahun 2020 diterbitkan pada 28 Februari 2020. Sekitar setengah bulan kemudian, tepatnya pada 17 Maret 2020, manajemen pelaksana program Kartu Prakerja dibentuk. Tiga hari berselang, nota kesepahaman dengan para mitra disepakati. Pada 27 Maret, Permenko terbit. Salah satu isinya mengatur mengenai ketentuan dan syarat bagi *platform digital* yang digandeng pemerintah menjadi mitra.

Pada Pasal 47 ayat 3 dan 4 diterangkan bahwa para mitra harus memiliki cakupan layanan berskala nasional, memiliki perangkat yang memadai untuk menyelenggarakan program Kartu Prakerja, memiliki portal internet untuk memfasilitasi pelatihan, memiliki kerja sama dengan lembaga pelatihan, dan harus berbadan hukum perseroan terbatas (PT) serta memegang izin usaha.

Menurut Tari, *platform digital* yang digandeng sebagai mitra idealnya ditunjuk setelah Permenko terbit. "Ini kan beda. Ini yang kami duga ada maladministrasi dalam proses penunjukan *platform digital*," jelas dia.

ICW, lanjut Tari, juga menyoroti peran ganda para mitra dalam menjalankan program Kartu Prakerja. Dari hasil pemantauan di situs *prakerja.go.id*, ICW menemukan sebanyak 137 dari 850 jenis pelatihan dalam program Kartu Prakerja diselenggarakan lembaga yang juga berstatus sebagai mitra dan kolaborator. Bahkan, pemasaran pelatihan juga disajikan lintas *platform*.

Sebaran Pelatihan Berdasarkan *Platform Digital*.



Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW).

Setidaknya terdapat empat *platform* diidentifikasi ICW menjalankan peran ganda sebagai mitra yang fungsi utamanya mengkurasi lembaga pelatihan dan sebagai penyedia jasa pelatihan, yakni Skill Academy by Ruangguru, Sekolah.mu, Pijarmahir, dan Pintaria.

Skill Academy menjajakan 42 jenis pelatihan. Selain di situs resminya, pelatihan Skill Academy juga dipajang di *platform* Tokopedia. Di *platform* mereka masing-masing, Sekolah.mu teridentifikasi menyelenggarakan 12 jenis pelatihan dan Pijarmahir menyelenggarakan 10 jenis pelatihan. Adapun Pintaria yang menawarkan 14 jenis pelatihan yang terdaftar di Tokopedia.

ICW juga menemukan rekanan *platform digital* yang menjajakan jenis pelatihan dalam Program Kartu Prakerja semisal HarukaEdu yang turut menginisiasi *platform*

Pintaria. Setidaknya terdapat 24 jenis pelatihan yang diujikan HarukaEdu di Pintaria. Tak hanya itu, ICW juga menjumpai dua kolaborator yang ikut-ikutan menawarkan pelatihan, yakni G2 dan Hacktiv8. Berstatus sebagai pengembang program Kartu Pekerja, G2 menawarkan 19 jenis pelatihan dan Hacktiv8 menyediakan jasa untuk 16 jenis pelatihan.

"Di sini, ada konflik kepentingan. Satu sisi dia *platform digital* bertugas kurasi, tetapi sisi lain mereka juga dikurasi. Di Permenko ini tidak jelas aturannya, tidak ada klausul yang menjelaskan *platform digital* memperbolehkan menjadi lembaga pelatihan," terang Tari.

Karena itu, Tari mengatakan, ICW menduga terjadi praktek monopoli dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja. Ia berkaca pada definisi monopoli yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam regulasi itu, lanjut Tari, monopoli diterangkan sebagai sebuah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penguasaan jasa tertentu oleh suatu pelaku perusahaan atau kelompok usaha.

"Mungkin dugaannya akan menjurus ke sana gitu. Kalau dugaannya, pertama tadi, mulai dari pemilihan (*platform-nya*) juga yang hanya delapan ini dan tidak jelas dasarnya. Kedua, delapan (*platform*) ini selain menjadi *platform digital* juga menjadi lembaga pelatihan," terang Tari.

Direktur Kemitraan dan Komunikasi PMO Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky membantah adanya konflik kepentingan dalam program Kartu Prakerja. Asalkan memenuhi syarat, menurut Panji, bisa saja *platform digital* turut menyediakan jasa pelatihan. "Jadi sepanjang mereka mengikuti syarat dan kewajiban sebagai *platform digital*, termasuk memberikan layanan *prima marketplace* atau layanan pasar. Asal adil, dan tidak diskriminatif kepada seluruh lembaga pelatihan yang ingin bekerja sama, maka mereka akan tetap bisa memenuhi syarat-syarat dari *platform digital*," terang Panji saat diwawancara KJI secara virtual pada Minggu, 10 Mei 2020.

“Di sini, ada konflik kepentingan. Satu sisi dia *platform digital* bertugas kurasi, tetapi sisi lain mereka juga dikurasi. Di Permenko ini tidak jelas aturannya, tidak ada klausul yang menjelaskan *platform digital* memperbolehkan menjadi lembaga pelatihan.”

Panji juga membantah tudingannya adanya lembaga-lembaga penyedia jasa yang "lolos" karena kurasi khusus dari para mitra. Menurut dia, kurasi digelar dua kali untuk memastikan hanya yang memenuhi syarat yang bisa menyediakan jasa pelatihan. "Jadi, kalau ada pertanyaan dia itu melakukan kurasi (terhadap penyedia jasa pelatihan), kurasi itu dilakukan dua kali. Keduanya oleh kami. Jadi, kami melihatnya itu lembaga pelatihan, bukan *platform digital*," papar Panji.

Lebih jauh, Panji menegaskan, program Kartu Prakerja tidak bisa diposisikan ke dalam ranah pengadaan barang atau jasa. Pasalnya, bukan pemerintah yang membelanjakan APBN dalam program Kartu Prakerja, melainkan penerima manfaat atau peserta program.

"Di mana ada konflik kepentingan dalam hal pengadaan barang dan jasa? Juri utamanya yang menentukan (penggunaan anggaran) kan bukan presiden, bukan pemerintah, bukan Kemenkeu. Yang menentukan adalah masyarakat. Masyarakat yang memilih," kata dia.

Redaksi Alinea.id.

Sumber: <https://www.alinea.id/nasional/relasi-politis-dan-bau-monopoli-di-balik-layar-prakerja-b1ZOz9uIX>.



BAGIAN 2

PENYELEWENGAN PENGADAAN DARURAT

SENGKAR PENGAL
ALAT TES COVID-19,
NEGARA BERPOTENS

Ratusan ribu al
BNPB dikem
sakit. BPKP
negara Rp
menaksir f

9 milik Penelitian dan Pengembangan K
Panua, 21 Agustus 2020. S
tiba, Anton



DONI MONARDO: KALAU SAV TAK AMBIL KE MAU

Karikat
Biotec
banyak

Upaya pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia berjalan semrawut. Atas nama kondisi darurat, pemerintah tergesa melakukan pengadaan jutaan unit alat kesehatan untuk penanganan pandemi. Sayangnya hal itu justru dimanfaatkan sebagian orang untuk mengeruk keuntungan pribadi. Tim Klub Jurnalis Investigasi membongkar skandal di balik pengadaan alat uji Covid-19 di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut.

Liputan ini berangkat dari temuan dokumen tentang pengembalian ratusan ribu reagen PCR Covid-19 dari laboratorium dan rumah sakit ke BNPB. Sebanyak 78 rumah sakit dan laboratorium yang tersebar di 29 provinsi, mengembalikan 498.644 unit reagen.

Alat uji tersebut dikembalikan karena bermasalah, mulai dari persoalan kedaluwarsa produk hingga buruknya tingkat akurasi sehingga tidak bisa digunakan. Dampaknya luar biasa. Berdasarkan kajian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, kerugian negara ditafsir sekitar Rp39,2 miliar. Sedangkan berdasarkan perhitungan kerugian negara lebih besar lagi, sekitar Rp169,1 miliar.

Kerugian yang lebih besar justru menimpa masyarakat. Tidak berfungsinya alat uji Covid-19 menjadi salah satu faktor terhambatnya upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Bagaimana tidak, alat uji Covid-19 itu memberikan hasil yang berkebalikan. Pengujian pada pasien yang positif Covid-19 hasilnya justru negatif Covid-19.

Hasil penelusuran tim KJI menemukan berbagai pelanggaran di pengadaan alat uji Covid-19 oleh BNPB yang menjadi latar belakang kekisruhan penanganan pandemi. Perusahaan-perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan pengadaan alat tersebut ternyata tidak memiliki kompetensi dalam bidang pengadaan alat kesehatan. Proyek pengadaan tersebut mereka dapatkan lebih karena unsur kedekatan dengan petinggi di BNPB, salah satunya adalah kolega Kepala BNPB saat itu Doni Monardo.

Liputan investigasi KJI ini mendapat pengakuan dari Dewan Pers. Pada 13 Desember 2022 berita *Majalah Tempo* bertajuk **"Mudarat Pengadaan Darurat"** yang merupakan bagian dari kolaborasi KJI terpilih sebagai **Karya Jurnalistik Cetak Terbaik Anugerah Dewan Pers 2022**.

Media Kolaborasi:

Tempo, Suara.com, Jaring.id, dan Alinea.id.

SENGKARUT PENGADAAN ALAT TES COVID-19, NEGARA BERPOTENSI RUGI

Suara.com edisi 15 Maret 2021.



Karikatur reagen Covid-19 merek Sansure Biotech hasil pengadaan BNPB yang banyak dikembalikan. [Suara.com/Ema Rohimah].

Ratusan ribu alat tes Covid-19 milik BNPB dikembalikan oleh rumah-rumah sakit. BPKP menaksir pemborosan uang negara Rp39,2 miliar. Sementara ICW menaksir Rp169,1 miliar.

Tersapu sudah buncah di benak Antonius Oktavian, tatkala 12.997 unit alat deteksi Covid-19 tiba di kantornya, Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua, 21 Agustus 2020. Sebelum alat-alat itu tiba, Anton pusing tujuh keliling, karena stok reagen habis, sedangkan jumlah pasien Covid-19 tak kunjung menunjukkan penurunan. Selang 30 menit setelah reagen ekstraksi merek Sansure Biotech tiba di kantornya, Anton yang merupakan Kepala Balitbangkes Papua, langsung meminta anak buahnya memakai alat tersebut.

Sebanyak 94 sampel pasien positif Covid-19 diuji memakai reagen buatan China itu. Tapi, roman Anton kembali berubah, terkejut, ketika anak buahnya membawa hasil uji sampel darah pasien. "Pak, semua sampel darah pasien yang diuji, negatif corona semua," lapor anak buahnya.

Anton terheran-heran, karena mendapat hasil tak lazim. “Coba kalian tes lagi,” kembali ia memerintahkan, yang langsung diiyakan oleh bawahannya. Ketika anak buahnya datang untuk melaporkan hasil uji coba ulang, Anton mendapatkan hasil yang sama. “Semuanya, 94 sampel, negatif, *false*-nya tinggi, pak.” Anton kaget, “Aneh, ajaib ini,” kata dia.

Pada hari yang sama, Anton memutuskan menghubungi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) –pengirim reagen itu– guna mengembalikan semua barang yang diterima dengan alasan, “Kami ragu, khawatir salah diagnosis kalau pakai alat ini.”

Tiga bulan kemudian, persisnya Rabu, 23 Desember 2020, Anton menceritakan kembali momen itu. “Kami waktu itu khawatir salah diagnosis. Bahkan, hari itu, pemeriksaan di Balitbangkes sempat tertunda beberapa jam. Pasien yang mau operasi atau yang meninggal kan butuh hasil cepat-cepat,” kata dia.

Kepusingan Anton kembali bertambah, karena BNPB menegaskan 12.997 unit reagen Sansure tak bisa langsung dikembalikan. Barang-barang itu baru bisa dikembalikan setelah ada penggantinya. Dalam kondisi pandemi yang membutuhkan reagen dalam waktu cepat, Anton tidak bisa berharap sepenuhnya kepada BNPB. Balitbangkes Papua memilih untuk mengadakan reagen sendiri. Anton lantas berinisiatif membeli reagen merek Fortitude, yang merupakan produk asal Singapura. “Kami beberapa kali menggunakan reagen itu,” kata Anton.

Persebaran Rumah Sakit dan Laboratorium yang Mengembalikan Alkes Penanganan Covid-19 Kiriman BNPB.



Sumber: Dokumen ICW, BKPP, BNPB, Pengecekan keseluruhan laboratorium dan rumah sakit.

Ramai-ramai Mengembalikan

Persoalan seperti itu ternyata tak hanya terjadi di Papua. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit (BBPTKLPP) Jawa Timur mengalami hal serupa. Koordinator Tata Usaha sekaligus penanggung jawab Penanggulangan Covid-19 BBPTKLPP Jawa Timur, Joko Kasihono menjelaskan, lembaganya menerima bantuan reagen Sansure dan Liferiver dari BNPB dalam rentang waktu April-Mei 2020.

Kala itu, Jawa Timur mengalami lonjakan kasus positif corona yang cukup tinggi. Dalam satu hari, BBPTKLPP menerima 5000 sampel untuk diuji. BNPB kemudian mengirimkan 9.600 unit reagen, terbilang banyak, karena laboratorium BBPTKLPP juga ditunjuk untuk memeriksa sampel pasien wilayah Bali hingga Nusa Tenggara Barat.

Jumlah itu, kata Joko, cukup untuk satu bulan. Namun, ketika melakukan optimasi atau upaya mencocokkan mesin PCR dan reagen, hasilnya reagen tersebut tidak dapat dipakai. "Kami coba berkali-kali, ternyata hasilnya tidak bisa memenuhi standar," kata Joko Kasihono.

Menurut Joko, reagen Sansure merupakan alat dengan sistem tertutup. Sementara mesin PCR BBPTKLPP bersistem terbuka. Sistem tertutup merupakan alat yang hanya dapat dipakai untuk satu jenis merek mesin tertentu. Selain Sansure, BBPTKLPP Jawa Timur juga mengembalikan reagen Liferiver ke BNPB. Alat tersebut juga tak dapat dipakai. Reagen merek itu hanya dapat digunakan pada satu tempat, atau biasa disebut *single pleat*.

Kendati sudah menyampaikan bahwa kedua barang tersebut tidak dapat digunakan, kata Joko, BNPB masih menawarkan barang yang sama kepada BBPTKLPP. "Kami tidak bisa menerima. Kalaupun ada kiriman, langsung dialihkan ke laboratorium atau rumah sakit yang cocok," ujar Joko.

Tidak hanya laboratorium yang mengembalikan reagen bantuan dari BNPB. Rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 juga berbondong-bondong mengembalikan alat kesehatan itu. Alasannya, selain ketidakcocokan mesin, proses pengujian lama, ada juga yang mendekati kedaluwarsa.

Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya tercatat mengembalikan reagen Liferiver karena mendekati kedaluwarsa. Riwayatnya tercatat dalam surat Nomor 2095/UN3.0.1/TU/2020 pada 3 September 2020 perihal pengembalian reagen PCR Covid-19 merek Liferiver.

Dalam surat tersebut dijelaskan, kondisi reagen Liferiver nomor lot P20200404 mendekati kedaluwarsa pada 19 Oktober 2020. Kepala Hubungan Masyarakat RS Unair, Brihastama Sawitri mengatakan, sebanyak 1.850 tes reagen Liferiver dikembalikan ke BNPB. "Waktu itu memang kami kembalikan," kata Brihastama *via* telepon pada Jumat, 12 Maret 2021.

Sementara Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) meminta BNPB untuk mengambil kembali 10 ribu reagen merek Wizprep melalui surat F0.03.04/VIII.1/1640/2020. RSCM mengungkapkan, reagen yang diterima pada Agustus 2020 itu, tidak dapat digunakan lantaran waktu ekstrasinya lebih lama ketimbang reagen lain. Biasanya, RSCM menggunakan reagen merek Sansure yang proses ekstrasinya membutuhkan waktu 2 jam lebih sedikit ketimbang Wizprep.

Kepala Laboratorium Patologi Klinik RSCM, Nuri Dyah Indrasari menjelaskan, Wizprep butuh waktu 5-6 jam untuk melakukan 12 tahap pemisahan RNA virus corona. "Kalau satu spesimen ada 12 tahap, bagaimana dengan 300 spesimen? Sangat melelahkan sekali bagi petugas," kata Nuri pada Kamis, 4 Maret 2021. Meski begitu, menurut Nuri, reagen merek Wizprep tidak kunjung diambil kembali oleh BNPB, sehingga RSCM memutuskan untuk menempatkannya di gudang penyimpanan.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh, reagen yang dibeli BNPB juga tersimpan di sejumlah gudang, antara lain Gudang BGR di Komplek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ada pula yang disimpan di *cold storage* Rawa Bokor di Bogor, Jawa Barat; Gudang Pusat Krisis Kementerian Kesehatan, Jalan Percetakan Negara II, Jakarta; serta Gudang Merpati Halim dan Gudang Jatiasih.

Pantauan di Gudang BGR, reagen merek Sansure berada di peti lemari pendingin. Di peti itu, tampak tumpukan reagen Sansure yang terbungkus boks *styrofoam* berukuran sekitar 1x1 meter. Alat kesehatan tersebut tidak diletakkan di ruang terbuka. Untuk dapat menjangkaunya tidak mudah, sebabnya setiap satu peti pendingin, dijaga petugas gudang.

Sudah Kembalikan Biaya

Kepala BNPB, Doni Monardo mengakui ada ratusan ribu reagen yang dikembalikan rumah sakit dan laboratorium. Doni menjelaskan, persoalan itu diketahui dirinya berdasarkan temuan tim inspektorat BNPB. Selanjutnya, kata Doni, temuan itu sudah ditindaklanjuti melalui audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menysasar 7 perusahaan penyedia reagen-reagen tersebut. "Hasil akhirnya, perusahaan pemasok Sansure sudah mengembalikan Rp7 miliar," kata Doni.

Doni menjelaskan, ketika ada laporan pengembalian reagen dari rumah sakit dan laboratorium, BNPB mewajibkan perusahaan-perusahaan pemasok membiayai pengembalian. Selain itu, kata Doni, perusahaan-perusahaan itu juga diwajibkan mendistribusikan kembali reagen-reagen itu kepada rumah sakit maupun laboratorium yang memiliki mesin cocok.

Sementara soal reagen Wizprep yang menumpuk di gudang RSCM serta reagen Sansure di gudang Kelapa Gading, Doni menjawab secara diplomatis. "Ya seharusnya informasinya sampai ke BNPB."

Direistribusikan

Dalam keterangan lebih lanjut yang didapat *Suara.com*, BNPB menjelaskan linimasa pengadaan reagen merek Sansure, adanya pengembalian, hingga ditarget habis didistribusikan kembali pada Maret 2021.

Berikut linimasa BNPB tersebut:

LINIMASA BNPB TERKAIT PENGADAAN REAGEN COVID-19 MEREK SANSURE BIOTECH, HINGGA PROSES REDISTRIBUSI KE LABORATORIUM-LABORATORIUM.	<ol style="list-style-type: none"> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #f1c40f; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;">1</div> <div> <p>April 2020</p> <p>Penawaran sebesar 500 ribu tes, namun Surat Pesanan menyesuaikan stok yang tersedia sehingga jumlah pengadaan sebesar 499.200 Test Reagen PCR, RNA dan VTM dari PT Mastindo Mulia.</p> </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #f1c40f; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;">2</div> <div> <p>April - Mei 2020</p> <p>Bersama Litbangkes Kemenkes, melakukan distribusi 499.200 test ke-88 laboratorium di 31 provinsi.</p> </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #f1c40f; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;">3</div> <div> <p>Agustus 2020</p> <p>Proses Audit BPKP. Ditemukan sejumlah 473.984 RNA Sansure tidak bisa digunakan di beberapa laboratorium. Untuk reagen PCR dan VTM bisa digunakan oleh laboratorium.</p> </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #f1c40f; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;">4</div> <div> <p>Agustus - Desember 2020</p> <p>BNPB bersama Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan Litbangkes menindaklanjuti hasil audit BPKP, dengan membuat surat penarikan ke laboratorium penerima. Sampai dengan per-31 Desember 2020, ditarik sebanyak 202.560 tes dari 26 laboratorium. Sisa 271.424 tes RNA bisa digunakan laboratorium atau dikembalikan ke dinas kesehatan provinsi untuk dilakukan redistribusi.</p> </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #f1c40f; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;">5</div> <div> <p>Akhir Desember 2020</p> <p>BNPB bersama Gugus Tugas Penanganan Covid-19 melakukan redistribusi sejumlah 137.280 tes RNA merek Sansure ke 12 laboratorium.</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #f1c40f; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;">6</div> <div> <p>Januari - Maret 2021</p> <p>Redistribusi sejumlah 65.280 tes ke 4 laboratorium.</p> </div> </div> 	STOK PER MARET 2020 STOK RNA SANSURE = 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Sumber: Dokumentasi BNPB.

Tak Tahu Bermasalah

Agus Salim Pangestu, anak taipan Prajogo Pangestu, mengakui perusahaannya yakni PT Mastindo Mulia diminta BNPB menyediakan 500 ribu reagen Sansure. BNPB meminta PT Mastindo Mulia untuk memasok reagen Sansure, setelah perusahaan itu menghibahkan 50 ribu reagen dalam program tanggungjawab sosial perusahaan alias CSR. Kerja sama BNPB - PT Mastindo Mulia itu diteken pada tanggal 22 April 2020. Total nilai kerja sama pengadaan reagen Sansure itu Rp172,5 miliar.

Masih pada hari yang sama, perusahaan itu memasukkan kategori usaha perusahaan sebagai penyalur alat-alat kesehatan serta laboratorium. Sebelum ada pandemi corona, PT Mastindo Mulia aslinya adalah badan usaha di bidang keuangan, asuransi, serta griya tawang.

Agus Salim Pangestu yang menjabat Presiden Direktur Barito Pacific Group, mengakui penyediaan alat-alat untuk BNPB itu diyakininya guna membantu penanganan pandemi. "Dengan studi kelayakan dan restu dari BNPB," kata Agus Salim Pangestu melalui pesan WhatsApp pada Kamis, 11 Maret 2021.

Djoko Suyanto, perwakilan manajemen PT Mastindo Mulia, melalui pernyataan tertulis menegaskan perusahaannya tidak tahu Sansure bermasalah. Dia juga menegaskan, PT Mastindo Mulia tidak mengetahui reagen Sansure tidak cocok dengan alat-alat laboratorium di hampir semua rumah sakit. "Kami cuma menjalankan penunjukan BNPB. Pemahaman kami, BNPB sudah mengujinya," kata Djoko Suyanto pada Jumat, 12 Maret 2021.

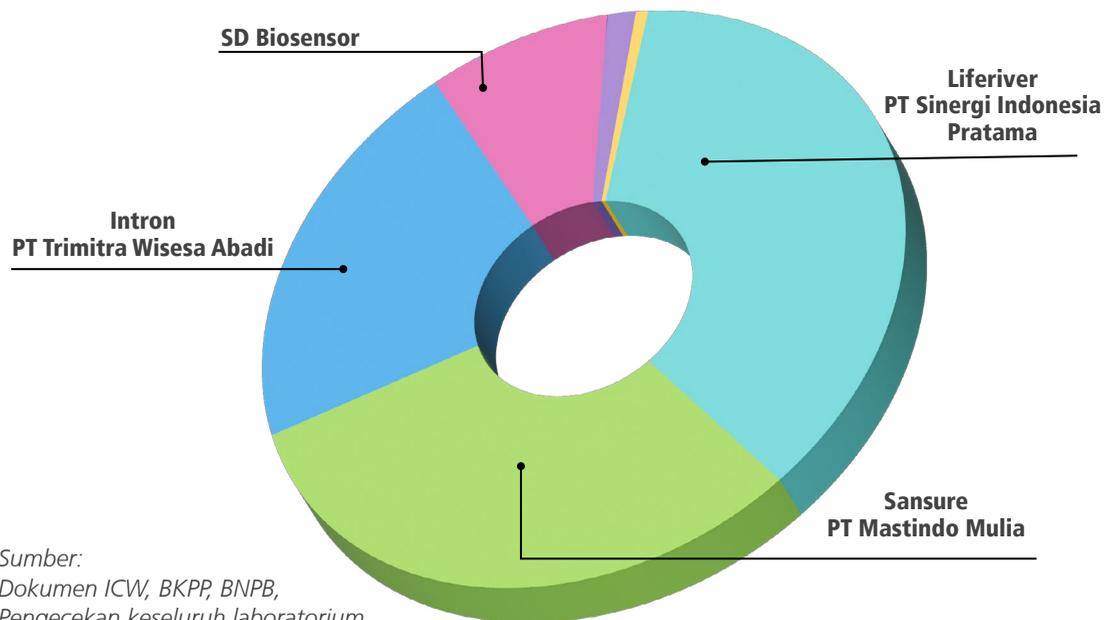
Djoko Suyanto juga mengakui tidak mengetahui soal pengembalian uang Rp7 miliar sebagai ongkos redistribusi atas reagen yang tak terpakai. Ia menegaskan, PT Mastindo Mulia hingga kini tak pernah mengurus pengembalian atau menerima reagen yang dikembalikan rumah-rumah sakit. "Rp7 miliar itu adalah pengembalian selisih kurs pembelian reagen dan selisih volume PCR *kit*," kata Djoko. Terakhir ia menegaskan, keterlibatan anak usaha Barito Group itu dalam pengadaan reagen di BNPB, semata-mata untuk membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19. "Kami memiliki kepedulian besar. Kami melakukan pembelian mandiri."

Temuan BPKP

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ikut menelisik sengkaret pengadaan reagen-reagen tersebut. BPKP melakukan audit terhadap 7 perusahaan

pemasok reagen merek-merek Sansure, Liferiver, Addbio, Zeesan, dan Kogene, yang bermasalah. Hasilnya, BPKP mengendus pemborosan uang negara yang ditaksir mencapai Rp39,2 miliar.

Pengadaan Alat Kesehatan Penanganan Covid-19 di Indonesia April - September 2020.



Sumber:
Dokumen ICW, BKPP, BNPB,
Pengecekan keseluruhan laboratorium
dan rumah sakit.

BPKP secara resmi mengungkapkan potensi pemborosan uang negara itu dalam surat Nomor SR-472/D2/01/2020 perihal Atensi Kedua atas Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Tata Kelola Proses Pengadaan Barang/Jasa Terkait Percepatan Penanganan Covid-19, tertanggal 4 Agustus 2020.

Dalam surat itu tertulis, terdapat dua sebab dugaan pemborosan tersebut. *Pertama* dalam proses pengadaan PCR, belum terdapat uji coba atas kualitas produk PCR kit dari semua produk yang diadakan. Hal ini menyebabkan sejumlah reagen PCR kit tidak digunakan oleh laboratorium dan rumah sakit di berbagai daerah.

Sebab *kedua*, menurut BPKP, terdapat perubahan kebijakan distribusi reagen PCR oleh Gugus Tugas di daerah, namun tidak dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Pusat. Kondisi ini juga tidak disertai dengan pengadministrasian memadai, sehingga sulit untuk melakukan pengawasan atas stok reagen PCR yang telah didistribusikan oleh BNPB ke daerah.

Selanjutnya, BPKP menyarankan empat hal kepada Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB:

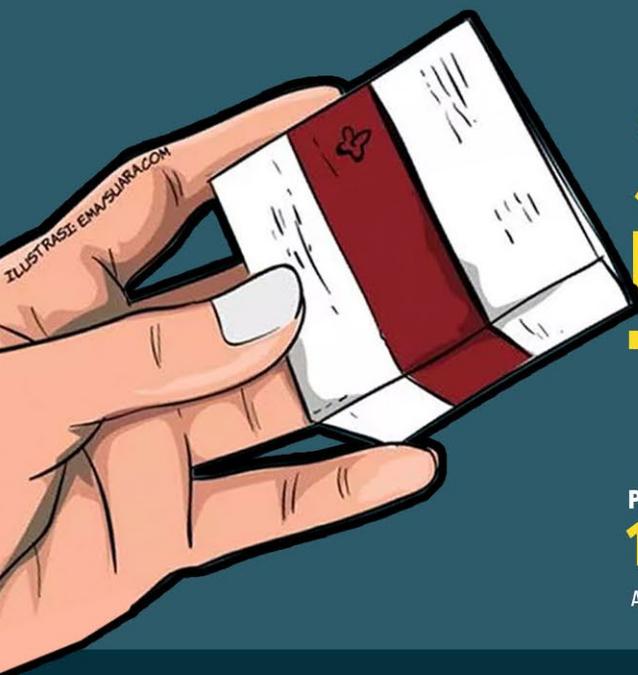
1. Mengidentifikasi dan menganalisis stok PCR, RNA, dan VTM hasil pengadaan BNPB yang tidak dapat digunakan di daerah.
2. Menyusun tata cara pengembalian barang dari daerah-daerah yang tidak tersedia *dry ice*.
3. Menarik seluruh RNA *kit* dan VTM merek Sansure yang tidak dapat digunakan pada laboratorium dan rumah sakit di daerah. Secara bersamaan, BPKP juga menyarankan BNPB mendistribusikan ulang kepada rumah sakit dan laboratorium lain, yang mengklaim bisa menggunakan alat tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan rumah sakit dan masa kedaluwarsa pada Oktober 2020.
4. Mendorong Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 di daerah agar melengkapi dokumen BAST distribusi reagen PCR, dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Pusat dalam melakukan perubahan kebijakan distribusi barang.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi BPKP, Eri Satriana, saat dikonfirmasi perihal bocornya surat tersebut, membenarkan bahwa lembaganya melakukan audit terhadap beberapa perusahaan rekanan BNPB. "Berdasarkan identifikasi suratnya itu kami dan ditandatangani pejabat BPKP," kata Eri saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa, 9 Maret 2021.

Temuan ICW Lebih Besar

Indonesia Corruption Watch mengungkapkan, sebanyak 78 rumah sakit dan laboratorium yang tersebar di 29 provinsi, mengembalikan 498.644 unit reagen. Hal itu terdapat dalam Laporan Kajian Tata Kelola dan Distribusi Alat Kesehatan Dalam kondisi Covid-19, yang disusun ICW tahun 2021. "Sebanyak 498.644 unit reagen yang dikembalikan karena tak bisa dipakai itu, dibeli memakai dana APBN. Total anggarannya diperkirakan Rp169,1 miliar," kata peneliti ICW, Wana Alamsyah.

Rincian reagen yang dikembalikan itu ialah Intron 1.000 unit, Wizprep 10.000 unit, Seegene 300 unit, Liferiver 2.825 unit, Kogene 700 unit dan, Sansure 483.819 unit. "Pembelian barang tidak sesuai dengan perencanaan dan belum ada uji teknis terhadap barang yang dibeli," kata Wana Alamsyah pada Rabu, 10 Maret 2021.



SENGKARUT PENGADAAN ALAT TEST COVID-19

PENGADAAN APRIL - DESEMBER 2020

1.956.664 UNIT

ANGGARAN

RP871 MILIAR

Alat Polymerase Chain Reaction (PCR), Ribonucleic Acid (RNA), dan Viral Transport Medium (VTM)

TAK KOMPATIBEL

Sebanyak 78 rumah sakit di 29 provinsi mengembalikan lebih dari 498.644 unit alat reagen PCR, RNA, dan VTM pada Mei - September 2020. **Kerugian hampir Rp170 miliar.**

- Aceh (2)
- Bali (1)
- Bangka Belitung (1)
- Banten (4)
- Bengkulu (1)
- Yogyakarta (3)
- Jakarta (13)
- Gorontalo (1)
- Jambi (1)
- Jawa Barat (4)
- Jawa Tengah (8)
- Jawa Timur (10)
- Kalimantan Selatan (1)
- Kalimantan Timur (2)
- Kepulauan Riau (1)
- Lampung (1)
- Maluku (1)
- NTB (3)
- NTT (1)
- Papua (1)
- Riau (1)
- Sulawesi Barat (1)
- Sulawesi Selatan (4)
- Sulawesi Tengah (1)
- Sulawesi Tenggara (1)
- Sulawesi Utara (2)
- Sumatra Barat (2)
- Sumatra Selatan (2)
- Sumatra Utara (3)

MEREK YANG DIKEMBALIKAN

- Intron 1.000 unit
- Wizpre 10.000 unit
- Liferiver 2.825 unit
- Kogene 700 unit
- Sansure 483.819 unit
- 90.045 alat PCR senilai Rp15.729.404.924
- 209.885 alat RNA senilai Rp22.272.357.263
- 30.652 alat VTM senilai Rp1.235.750.706

**TOTAL 330.583 unit
SENILAI Rp39.237.512.910**

DISTRIBUSI

PT Mastindo Mulia
500.000 PCR Sansure* dari Cina
Rp172,5 miliar

PT Sinergi Indomitra Pratama
559.020 PCR Liferiver dari Cina
Rp199,9 miliar

PT Bumi Resource Nusantara
250.000 PCR SD Biosensor
Rp487 miliar

PT Makmur Berkah Sehat
100.000 RNA Wizpre
Rp7 miliar

PT Harsen Laboratories
4.992 Maccura*
Rp399,3 juta

PT Trimitra Wisesa Abadi
441.832 PCR, RNA, VTM Intron*
dari Korea Selatan
Rp110,4 miliar

37.300 RNA Liferiver* dari Cina
Rp3,3 miliar

24.000 VTM Beaver
Rp980 juta

10.000 PCR Toyobo
Rp2 miliar

5.000 VTM Cellpro
Rp200 juta

PT Next Level Medical
11.520 RNA Alphagen
Rp576 juta

10.000 PCR Kogene*
Rp2,8 miliar

*Rekomendasi Badan Kesehatan (WHO) 20 Oktober 2020



Dalam laporan yang sama, ICW mengungkapkan ada dugaan potensi kerugian negara sebesar Rp169,1 miliar akibat pengembalian reagen RNA dan PCR sebanyak 498.644 unit.

Rinciannya, pengembalian 483.819 unit reagen Sansure menimbulkan potensi kerugian negara Rp166 miliar. Dari pengembalian 2.825 unit Liferiver karena tak bisa dipakai, menimbulkan potensi kerugian negara Rp1 miliar. Pengembalian seribu unit Intron dan 700 unit merek Kogene, masing-masing menimbulkan potensi kerugian Rp200 juta dan Rp196 juta. Sementara karena pengembalian 300 unit Seegene dan 10 ribu unit merek Wizprep, negara berpotensi merugi Rp94 juta dan Rp700 juta.

Menurut peneliti ICW, Dewi Anggreini, potensi kerugian negara mengartikulasikan perencanaan tak sesuai kebutuhan yang dilakukan pengguna anggaran, maupun pihak kuasa pengguna anggaran. Perencanaan tak sesuai kebutuhan itu, kata dia, terutama tampak pada saat penetapan identifikasi dan ketersediaan sumber daya. Dewi mengatakan, persoalan itu mengarah pada pelanggaran Peraturan LKPP Nomor 13/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

"Patut diduga bahwa mereka tidak menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan alat," kata Dewi. Berdasarkan temuan tersebut, ICW akan melaporkan pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam proses pengadaan barang ke Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu dekat. "Kami akan memberikan laporan kepada KPK, kami berharap ini ditindaklanjuti."

Tim Liputan Khusus:

Erick Tanjung (penulis), Reza Gunadha (penyunting) dan Ema Rohimah (infografis).

Sumber: <https://liks.suara.com/read/2021/03/15/063000/sengkarut-pengadaan-alat-tes-covid-19-negara-perpotensi-rugi>.

DISTRIBUTOR BLAK-BLAKAN SOAL PENGADAAN REAGEN COVID-19 BNPB YANG BERMASALAH

Suara.com edisi 15 Maret 2021.

***Budyanto A. Gani, pemilik PT Trimitra Wisesa Abadi,
mendapat order terbanyak alat-alat tes Covid-19 di BNPB.
Dia menepis tuduhan proyek itu didapat karena dekat Doni Monardo.***

Malam temaram menggantung di selatan Jakarta, ketika pria berkacamata duduk di ruangan utama restoran Sari Ratu Kitchen, Pasar Raya Blok M. Nama lelaki itu adalah Budyanto A. Gani. Dia pemilik PT Trimitra Wisesa Abadi, salah satu perusahaan yang mendapat proyek pengadaan peralatan reagen uji sampel Covid-19 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Budyanto malam itu, Rabu, 10 Maret 2021, menunggu kedatangan tim jurnalis yang tergabung dalam Klub Jurnalis Investigasi (KJI) - kolaborasi antarmedia yang terdiri dari *Suara.com*, *Jaring.id*, *Alinea.id*, dan *Majalah Tempo*. Ruang utama restoran padang itu cukup luas. Setiap satu meja makan terdapat empat kursi. Ada puluhan meja, jarak antar meja satu meter. Sementara di teras depan restoran, hampir semua meja terisi pengunjung.

Pada dinding ruang makan utama, terpampang lukisan besar bergambar tumpukan piring sajian khas padang. Tak jauh dari lukisan, persisnya di pojok restoran, ada ruangan VIP. Ruangan tersebut tampak menyaru dengan dinding restoran berkelir putih. Jika tak jeli, tidak tampak keberadaan ruang VIP. Budyanto mengakui, restoran itu miliknya, hasil join bisnis dengan Inna Rossaria Auwines. Inna adalah adik sepupu Kepala BNPB Doni Monardo. "Join bisnis ini sudah jalan tiga tahun di dua restoran Sari Ratu Kitchen, di Blok M dan RSPAD Gatot Soebroto," kata dia.

Namun, ketika badai pandemi Covid-19 datang, sejumlah unit bisnisnya ikut terdampak. Budyanto mengungkapkan, baru menutup restoran Sari Ratu Kitchen yang ada di RSPAD Gatot Soebroto. Selain itu, bisnis lain Budyanto juga ikut diterpa badai corona. Dia mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang penyedia alat



Budiyanto A. Gani, pemilik PT Trimitra Wisesa Abadi.

mesin dan infrastruktur. Karena itulah, sembilan hari setelah pemerintah menyatakan situasi darurat, Budiyanto banting setir menjadi distributor alat kesehatan. "Naluri bisnis, kalau tidak begitu, bisa mati," ujarnya.

Pada masa darurat, pemerintah menunjuk Kepala BNPB, Doni Monardo sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Tidak main-main, pemerintah menggelontorkan Rp3,3 triliun kepada gugus tugas itu, demi menanggulangi wabah. Dari total anggarannya, Rp871 miliar sudah dibelanjakan untuk alat-alat tes Covid-19 hingga akhir Desember 2020.

Budiyanto sendiri, melalui PT Trimitra Wisesa Abadi, mendapat order mengadakan alat PCR, reagen, serta media transfer virus pada awal masa pandemi, 2020. Meski tergolong "pemain baru" dalam bidang alat kesehatan, PT Trimitra Wisesa Abadi mendapatkan nilai proyek besar dari BNPB, yakni Rp117 miliar untuk mendatangkan alat PCR merek Intron dari Korea Selatan.

Lantaran order besar itulah, penyalur alat kesehatan kerap mendatangi Budiyanto untuk meminta pertolongan supaya bisa ikut mendapat proyek sama. "Tapi saya bukan pejabatnya. Kalau saya bisa, ya saya bantu, tapi saya bukan pejabatnya. Pejabatnya itu beliau (Doni Monardo)," kata Budiyanto.

Budiyanto tak memungkirinya dekat dengan Doni Monardo. "Setiap orang pasti punya yang dia dekat, dia nyaman, dia percaya," ujarnya. Ia lantas menceritakan,

sudah lama mengenal Doni Monardo, persisnya 2014. Awalnya, ia dikenalkan kepada Doni Monardo oleh Inna. Kala itu, Budiyanto dan Inna menjadi rekan bisnis bidang jasa *cleaning service*. "Saya pertama kali dikenalkan dengan Pak Doni ketika dia masih aktif di TNI."

Budiyanto terus menjalin hubungan lebih dekat, ketika Doni menjabat Panglima Kodam XVI Pattimura di Maluku, tahun 2015. Ketika itu, sebagai Pangdam, Doni memiliki program 'Emas Biru dan Emas Hijau', yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di sektor kelautan, perikanan, perkebunan dan kehutanan.

Budiyanto memang pengusaha yang jeli, sehingga bisa melihat peluang bisnis di sektor perikanan. "Saat Pak Doni bikin program Emas Biru dan Emas Hijau, saya tertarik. Lalu saya datang ke sana, Ambon," ucapnya. Sejak itu, hubungannya dengan Doni makin dekat. Doni lantas pindah ke Jawa barat untuk mengemban tugas baru, hingga akhirnya ditunjuk sebagai Kepala BNPB. "Sejak beliau menjadi Kepala BNPB, belum pernah makan di sini lagi (Restoran Sari Ratu Kitchen)."

Namun, Budiyanto menepis persepsi bahwa dirinya mendapat banyak proyek pengadaan alat tes Covid-19, karena faktor kedekatannya dengan Doni. Budiyanto menegaskan, Doni adalah persona yang tegas dan tak pernah bermain-main setiap dalam penugasan. Dia bisa memastikan, sebagai Kepala BNPB dan Satgas Covid-19, Doni hanya terlibat dalam perumusan kebijakan umum, tak sampai ke teknis. "Pak Doni tak pernah mengurus pengadaan. Teknis pengadaan diurus deputy logistik," kata dia. Selain itu, sebagai orang yang sudah lama berteman, Budiyanto mengakui



Laman Instagram Sari Ratu Kitchen yang menuliskan soal kunjungan Kepala BNPB Doni Monardo, Juli 2018. [Instagram/@sariratakitchen]

betul-betul mengerti karakteristik Doni. "Semua yang mengenal Pak Doni, pasti tahu karakter beliau. Adik kandungnya saja tidak dibantu, apalagi saya."

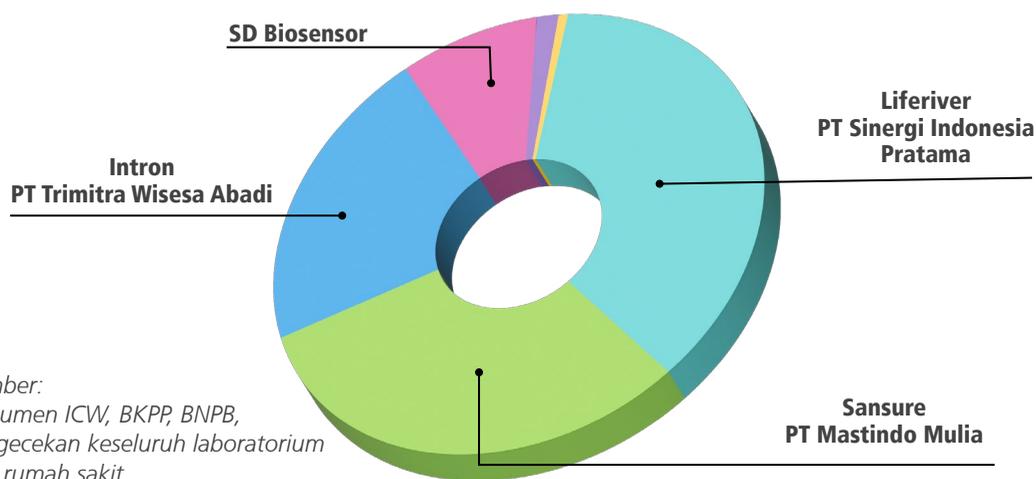
Saat persamuhan selesai, tim KJI mencoba menanyakan riwayat kehadiran Doni di restoran itu. Menurut pelayan, sang jenderal memang pernah datang, namun tak begitu rutin. Ketika tak bisa menyambangi restoran, kata pelayan, Doni cukup memesan melalui aplikasi WhatsApp. Hidangan kemudian akan diantar ke kantor BNPB. "Biasanya pesan rendang, keripik kentang. Tapi paling sering pesan kepala ikan kakap," ujar pelayan.

Saya Tak Mengurus Pengadaan

Doni Monardo membantah memiliki kedekatan dengan sejumlah pihak penyedia alat yang mendapat kontrak di BNPB. Dia mengakui tidak mengetahui proses pengadaan alat-alat kesehatan terkait Covid-19 di lembaga penanggulangan bencana yang ia pimpin. "Saya tidak punya pengalaman, tahunya senjata. Masalah reagen dan alat kesehatan enggak mengerti. Seluruh pengadaan melalui rapat," kata Doni Monardo, menyanggah.

Kendati demikian, Doni menjelaskan bahwa semua proses pengadaan di BNPB terbuka untuk umum selama proses pengadaannya sesuai peraturan. "Setiap penyedia yang memiliki produk sesuai spesifikasi kebutuhan dan memenuhi persyaratan sebagai penyedia, dapat ditunjuk sebagai penyedia," katanya. Adapun keterangan tentang hubungannya dengan Budiyanto, Doni meminta untuk tak dikutip. "Saya tidak mengurus pengadaan!"

Pengadaan Alat Kesehatan Penanganan Covid-19 di Indonesia April - September 2020.



Kontrak Paling Banyak

Berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), selama proses pengadaan tahun 2020, BNPB membeli 1.956.644 unit reagen PCR, RNA, dan *Viral Transport Medium* (VTM) dengan total anggaran Rp549 miliar.

Untuk pengadaan barang, BNPB bekerja sama dengan sejumlah perusahaan. Ada tiga perusahaan yang mengadakan reagen terbanyak, di antaranya PT Mastindo Mulia mendapat order 500.000 unit reagen merek Sansure senilai Rp172,5 miliar. Kemudian PT Sinergi Indomitra Pratama, yang mendapat order pengadaan 559.020 reagen merek Liferiver senilai Rp199,9 miliar. Terakhir adalah perusahaan milik Budiyanto, yakni PT Trimitra Wisesa Abadi, yang mendapat order pengadaan 441.832 reagen PCR, RNA dan VTM senilai Rp110,4 miliar.

"PT Trimitra Wisesa Abadi (TWA) merupakan penyedia yang paling banyak mendapat kontrak," kata Wana Alamsyah. Dari 22 dokumen kontrak, 13 paket di antaranya dikelola oleh PT TWA dengan nilai kontrak Rp117 miliar, meski tergolong "pemain baru" dalam bisnis ini. Sebagai perbandingan, PT Sinergi Indomitra Pratama mendapat tiga kontrak dengan nilai Rp199 miliar. Sementara PT Mastindo Mulia, hanya mendapat satu paket dengan kontrak Rp172, 5 miliar.

Selain itu, kata Wana, dalam rentang waktu Oktober - Desember 2020, PT TWA juga mendapatkan kontrak pengadaan reagen di BNPB sebesar Rp310,7 miliar. Dengan demikian, berdasarkan catatan ICW, perusahaan milik Budiyanto ini mendapatkan kontrak 18 paket pengadaan. Hingga Desember 2020, Budiyanto mendatangkan enam merek dari China dan Korea Selatan, seperti Intron, Liferiver, Beaver, Toyoba, Cellpro, dan Citoswab dengan nilai anggaran ditaksir mencapai Rp427 miliar.

Nilai anggaran itu setara 49,5 persen dari total pengadaan reagen BNPB pada April - Desember 2020, yakni Rp870,9 miliar. Dari semua barang tersebut, hanya Liferiver, Toyobo, dan Intron yang direkomendasikan layak pakai oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) berdasarkan surat edaran 20 April 2020.

Berdasarkan penelusuran dokumen Administrasi Hukum Umum alias AHU, perusahaan Budiyanto tidak memiliki kompetensi dalam pengadaan alat kesehatan. PT TWA baru mengubah akta di Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham RI menjadi perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dan perdagangan besar alat laboratorium, farmasi serta kedokteran, pada 22 Maret 2020. Tepat 20 hari setelah temuan kasus pertama Covid-19 diumumkan oleh pemerintah. "Atas semua dasar itulah, patut diduga PT Trimitra memonopoli pengadaan di BNPB," kata Wana.

Belakangan Bermasalah

ICW belakangan juga menemukan persoalan pada alat-alat tes Covid-19 hasil pengadaan tersebut. Sepanjang April-September 2020, sebanyak 78 rumah sakit dan laboratorium yang tersebar di 29 provinsi, mengembalikan 498.644 unit reagen hasil pengadaan BNPB. Hal itu terdapat dalam Laporan Kajian Tata Kelola dan Distribusi Alat Kesehatan Dalam kondisi Covid-19, yang disusun ICW tahun 2021. "Sebanyak 498.644 unit reagen yang dikembalikan karena tak bisa dipakai itu, dibeli memakai dana APBN. Total anggarannya diperkirakan Rp169,1 miliar," kata peneliti ICW, Wana Alamsyah.

Rincian reagen yang dikembalikan itu ialah Intron 1.000 unit, Wizprep 10.000 unit, Seegene 300 unit, Liferiver 2.825 unit, Kogene 700 unit, dan Sansure 483.819 unit. "Pembelian barang tidak sesuai dengan perencanaan dan belum ada uji teknis terhadap barang yang dibeli," kata Wana Alamsyah kepada tim KJI pada Rabu, 10 Maret 2021.

Tak hanya itu, meski ada barang pengadaan PT TWA yang dikembalikan, perusahaan tersebut tak masuk daftar perusahaan yang diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan, Oktober 2020. BPKP hanya mengaudit 7 perusahaan yang memasok reagen tapi dikembalikan karena tak cocok. BPKP mengungkapkan, tidak mengaudit PT TWA walaupun terdapat merek reagen yang dikembalikan serta tak masuk rekomendasi WHO - yang menjadi syarat pengadaan alkes BNPB. "BPKP hanya melaksanakan tugas evaluasi yang diminta pihak terkait," kata Kepala Biro Hukum dan Komunikasi BPKP, Eri Satriana.

Dalam keterangan lebih lanjut yang didapat *Suara.com*, BNPB menjelaskan linimasa pengadaan reagen merek Sansure, adanya pengembalian, hingga ditarget habis didistribusikan kembali pada Maret 2021.

Orang Iri

Budyanto, pemilik PT TWA, tak membantah mendapat banyak order pengadaan reagen dari BNPB, meski tergolong baru berkecimpung dalam bisnis tersebut. "Emang kenapa kalau dapat? Ini soal berani ambil risiko atau tidak. Itu pandangan orang yang iri saja. Mereka tidak melihat risiko gagal mendapatkan barang di tengah kelangkaan yang besar. Saat susah kemarin, orang-orang ini ke mana?" kata Budyanto. Ia menceritakan, pada April 2020, terjadi kelangkaan reagen. Stok di dunia menipis. "Saya membantu BNPB mencari ke perusahaan di Cina, dan dapat

1 April 2020

Penawaran sebesar 500 ribu tes, namun Surat Pesanan menyesuaikan stok yang tersedia sehingga jumlah pengadaan sebesar 499.200 Test Reagen PCR, RNA dan VTM dari PT Mastindo Mulia.

2 April - Mei 2020

Bersama Litbangkes Kemenkes, melakukan distribusi 499.200 test ke-88 laboratorium di 31 provinsi.

3 Agustus 2020

Proses Audit BPKP. Ditemukan sejumlah 473.984 RNA Sansure tidak bisa digunakan di beberapa laboratorium. Untuk reagen PCR dan VTM bisa digunakan oleh laboratorium.

4 Agustus - Desember 2020

BNPB bersama Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan Litbangkes menindaklanjuti hasil audit BPKP, dengan membuat surat penarikan ke laboratorium penerima. Sampai dengan per-31 Desember 2020, ditarik sebanyak 202.560 tes dari 26 laboratorium. Sisa 271.424 tes RNA bisa digunakan laboratorium atau dikembalikan ke dinas kesehatan provinsi untuk dilakukan redistribusi.

5 Akhir Desember 2020

BNPB bersama Gugus Tugas Penanganan Covid-19 melakukan redistribusi sejumlah 137.280 tes RNA merek Sansure ke 12 laboratorium.

6 Januari - Maret 2021

Redistribusi sejumlah 65.280 tes ke 4 laboratorium.

500 ribu. Saat itu, namanya saja darurat, siapa saja yang memiliki barang akan dibeli dengan harga berapa saja.”

Budyanto mengakui, perusahaannya tak mempunyai pengalaman dalam pengadaan alat kesehatan sebelum pandemi Covid-19. Namun, menurutnya, semua pebisnis akan berpikiran yang sama seperti dirinya ketika diterpa badai pandemi. “Ini naluri bisnis pengusaha. Bertahan atau mati. Sekarang 80 persen pengusaha main di alat kesehatan.”

la mengklaim, sistem pengadaan alat kesehatan yang diterapkan BNPB pada masa pandemi sudah baik. “Kenapa? Karena pemain alat kesehatan lama terbiasa dengan proteksi, dengan katalog, dengan apa lah, enggak terbiasa dengan model BNPB. Obat dan alat kesehatan kita itu mahal, padahal ada yang generik. Coba bayangkan kalau peraturan tetap sama, semua pemain alat kesehatan harus begini-begitu, berapa harga alat tes PCR kita beli di awal? Rp750 ribu, bahkan Rp1 juta! di BNPB bisa Rp300 ribu.”

Budiyanto juga menanggapi banyaknya reagen hasil pengadaan yang dikembalikan oleh laboratorium maupun rumah-rumah sakit daerah. “Alat PCR ini bukan alat gampang, tidak seperti antigen yang tinggal tempel jadi, dan bermacam-macam. Karena rumit, terkadang operator laboratoriumnya tidak mengerti, sehingga dianggap tidak cocok dan dikembalikan.”

Ia menegaskan, alat-alat itu tak bisa diganti. Sebaliknya, barang-barang itu lantas didistribusikan kepada laboratorium yang bisa menggunakannya. Terkait penemuan BPKP bahwa ada barang pengadaan PT TWA yang tak lulus uji produk, Budiyanto menjelaskan kala itu adalah situasi darurat. “Kita tak usah sok-sokan mengurus uji produk, karena di awal pandemi, situasinya darurat. Kalau produk dari Cina, yang penting ada di CFDA (*China Food and Drug Administration*). Mau menunggu uji produk dua bulan, mau nungguin?”

Tim Liputan Khusus: Erick Tanjung (penulis), Reza Gunadha (penyunting) dan Ema Rohimah (infografis).

Sumber: <https://www.suara.com/news/2021/03/15/073000/distributor-blak-blakan-soal-pengadaan-reagen-covid-19-bnpb-yang-bermasalah>.

TUMPUKAN ALAT TES COVID-19 YANG TERBENGGALAI DI GUDANG

Suara.com edisi 15 Maret 2021.



Gudang PT Bhandha Ghara Reksa (BGR) di Kelapa Gading, Jakarta Utara, tempat penyimpanan reagen PCR Covid-19 yang dikembalikan laboratorium serta rumah sakit. [Suara.com/Erick Tanjung]

Ratusan ribu unit reagen penguji sampel Covid-19 dikembalikan oleh rumah-rumah sakit di daerah, karena tak bisa dipakai. Kekinian, barang itu terbengkalai di gudang.

Sejumlah boks *styrofoam* dan kotak besi berjajar rapi, ditumpuk pada sebuah kontainer pendingin salah satu sudut kompleks pergudangan PT Bhandha Ghara Reksa (BGR) di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Suara bising yang berasal dari mesin pendingin kontainer itu, turut menemani puluhan boks *styrofoam* dan kotak besi berwarna abu-abu tersebut.

Klub Jurnalis Investigasi (KJI) - tim kolaborasi antarmedia yang terdiri dari *Suara.com*, *Jaring.id*, *Alinea.id*, dan *Majalah Tempo* - melakukan penelusuran tiga pekan lalu. Pada kontainer itu, terdapat sejumlah boks berisi paket reagen untuk uji sampel Covid-19. Paket reagen tersebut milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, yang dikembalikan direktur oleh sejumlah rumah sakit dan laboratorium rujukan pemeriksaan di berbagai daerah. Kontainer itu berada di luar gudang H, tempat penyimpanan alat kesehatan BNPB.

Sumber KJI di lokasi menyebutkan, pada kontainer penyimpanan BNPB itu, terdapat reagen yang diretur oleh sejumlah rumah sakit dan laboratorium. Di antaranya dari Rumah Sakit Universitas Airlangga, Laboratorium Universitas Indonesia, dan RS Universitas Sumatera Utara.

Terbengkalai

Tidak hanya laboratorium yang mengembalikan reagen bantuan dari BNPB. Rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 juga berbondong-bondong mengembalikan alat kesehatan tersebut. Alasannya, selain ketidakcocokan mesin, proses pengujian lama, ada juga yang mendekati kedaluwarsa.

Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya tercatat mengembalikan reagen Liferiver karena mendekati kedaluwarsa. Riwayatnya tercatat dalam surat Nomor 2095/UN3.0.1/TU/2020 pada 3 September 2020 perihal pengembalian reagen PCR Covid-19 merek Liferiver. Dalam surat tersebut dijelaskan, kondisi reagen Liferiver nomor lot P20200404 mendekati kedaluwarsa pada 19 Oktober 2020.

Kepala Hubungan Masyarakat RS Unair, Brihastama Sawitri mengatakan, sebanyak 1.850 tes reagen Liferiver dikembalikan ke BNPB. "Waktu itu memang kami kembalikan," kata Brihastama saat dihubungi tim KJI, melalui telepon, Jumat, 12 Maret 2021. Sementara Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) meminta BNPB untuk mengambil kembali 10 ribu reagen merek Wizprep melalui surat F0.03.04/VIII.1/1640/2020.

RSCM mengungkapkan, reagen yang diterima pada Agustus 2020 itu, tidak dapat digunakan lantaran waktu ekstrasinya lebih lama ketimbang reagen lain. Biasanya, RSCM menggunakan reagen merek Sansure yang proses ekstrasinya membutuhkan waktu 2 jam lebih sedikit, ketimbang Wizprep.

Kepala Laboratorium Patologi Klinik RSCM, Nuri Dyah Indrasari menjelaskan, Wizprep butuh waktu 5-6 jam untuk melakukan 12 tahap pemisahan RNA virus Corona. "Kalau satu spesimen ada 12 tahap bagaimana dengan 300 spesimen? Sangat melelahkan sekali bagi petugas," kata Nuri kepada tim KJI lewat wawancara daring pada Kamis, 4 Maret 2021. Meski begitu, menurut Nuri, reagen merek Wizprep tidak kunjung diambil kembali oleh BNPB, sehingga RSCM memutuskan untuk menaruhnya di gudang penyimpanan.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh tim KJI, reagen yang dibeli BNPB juga tersimpan di sejumlah gudang, antara lain Gudang BGR di Komplek Kelapa Gading, Jakarta

Utara. Ada pula yang disimpan di *cold storage* Rawa Bokor di Bogor, Jawa Barat; Gudang Pusat Krisis Kementerian Kesehatan, Jalan Percetakan Negara II, Jakarta; serta, Gudang Merpati Halim dan Gudang Jatiasih.

Pantauan tim KJI di Gudang BGR, reagen merek Sansure berada di peti lemari pendingin. Di peti itu, tampak tumpukan reagen Sansure yang terbungkus boks *styrofoam* berukuran sekitar 1x1 meter. Alat kesehatan tersebut tidak diletakkan di ruang terbuka. Untuk dapat menjangkaunya tidak mudah, sebabnya setiap satu peti pendingin dijaga petugas gudang.

Potensi Kerugian Negara

Selain perangkat reagen Wizprep, terdapat enam merek perangkat reagen lain yang teridentifikasi paling banyak diretur dari sejumlah rumah sakit dan laboratorium pemeriksaan. Setidaknya, hal itu tergambar dari temuan kajian *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dari pemantauan dokumen pengadaan periode Agustus 2020 hingga September 2020.

Keenam merek yang teridentifikasi yakni Sansure, Liferiver, Biotex, Seegene, Intron, dan Kogene. "Dan alat kesehatan yang paling banyak diretur oleh laboratorium dan RS adalah merek Sansure, yang mana kami menduga bahwa alat tersebut belum dilakukan uji teknis, sehingga banyak laboratorium dan RS yang tidak digunakan," kata peneliti ICW, Wana Alamsyah pada Rabu, 11 Maret 2021.

Berdasarkan catatan ICW, setidaknya terdapat 209.544 unit perangkat reagen uji sampel Covid-19 yang dikembalikan oleh sejumlah rumah sakit dan laboratorium rujukan. Potensi kerugian negara akibat pengembalian ratusan perangkat uji sampel itu ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. ICW mengidentifikasi, dominasi pengadaan ratusan perangkat uji sampel itu dilakukan oleh PT Mastindo Mulia. Berdasarkan hasil kajiannya, PT Mastindo Mulia mendapat satu paket proyek pengadaan perangkat uji sampel Covid-19 berjumlah 500.000 unit dengan nilai Rp172,5 miliar.

Diredistribusikan

Kepala BNPB Doni Monardo mengakui ada ratusan ribu reagen yang dikembalikan rumah sakit dan laboratorium. Doni menjelaskan, persoalan itu diketahui dirinya berdasarkan temuan tim inspektorat BNPB. Selanjutnya, kata Doni, temuan itu sudah ditindaklanjuti melalui audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) yang menysasar 7 perusahaan penyedia reagen-reagen itu. "Hasil akhirnya, perusahaan pemasok Sansure sudah mengembalikan Rp7 miliar," kata Doni.

Doni menjelaskan, ketika ada laporan pengembalian reagen dari RS dan laboratorium, BNPB mewajibkan perusahaan-perusahaan pemasok membiayai pengembalian. Selain itu, kata Doni, perusahaan-perusahaan itu juga diwajibkan mendistribusikan kembali reagen-reagen itu kepada RS maupun laboratorium yang memiliki mesin cocok. Sementara soal reagen Wizprep yang menumpuk di gudang RSCM serta reagen Sansure di gudang Kelapa Gading, Doni menjawab secara diplomatis. "Ya seharusnya informasinya sampai ke BNPB."

Dalam keterangan lebih lanjut yang didapat *Suara.com*, BNPB menjelaskan lini masa pengadaan reagen merek Sansure, adanya pengembalian, hingga ditarget habis didistribusikan kembali pada Maret 2021.

Berikut linimasa BNPB tersebut:

1 April 2020
Penawaran sebesar 500 ribu tes, namun Surat Pesanan menyesuaikan stok yang tersedia sehingga jumlah pengadaan sebesar 499.200 Test Reagen PCR, RNA dan VTM dari PT Mastindo Mulia.

2 April - Mei 2020
Bersama Litbangkes Kemenkes, melakukan distribusi 499.200 test ke-88 laboratorium di 31 provinsi.

3 Agustus 2020
Proses Audit BPKP. Ditemukan sejumlah 473.984 RNA Sansure tidak bisa digunakan di beberapa laboratorium. Untuk reagen PCR dan VTM bisa digunakan oleh laboratorium.

4 Agustus - Desember 2020
BNPB bersama Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan Litbangkes menindaklanjuti hasil audit BPKP, dengan membuat surat penarikan ke laboratorium penerima. Sampai dengan per-31 Desember 2020, ditarik sebanyak 202.560 tes dari 26 laboratorium. Sisa 271.424 tes RNA bisa digunakan laboratorium atau dikembalikan ke dinas kesehatan provinsi untuk dilakukan redistribusi.

5 Akhir Desember 2020
BNPB bersama Gugus Tugas Penanganan Covid-19 melakukan redistribusi sejumlah 137.280 tes RNA merek Sansure ke 12 laboratorium.

6 Januari - Maret 2021
Redistribusi sejumlah 65.280 tes ke 4 laboratorium.

Agus Salim Pangestu, anak taipan Prajogo Pangestu, mengakui perusahaannya yakni PT Mastindo Mulia diminta BNPB menyediakan 500 ribu reagen Sansure. BNPB meminta PT Mastindo Mulia untuk memasok reagen Sansure, setelah perusahaan itu menghibahkan 50 ribu reagen dalam program tanggungjawab sosial perusahaan alias CSR.

Kerja sama BNPB - PT Mastindo Mulia itu diteken pada tanggal 22 April 2020. Total nilai kerja sama pengadaan reagen Sansure itu Rp172,5 miliar. Masih di hari yang sama, perusahaan itu memasukkan kategori usaha perusahaan sebagai penyalur alat-alat kesehatan serta laboratorium. Sebelum ada pandemi corona, PT Mastindo Mulia aslinya adalah badan usaha di bidang keuangan, asuransi, serta griya tawang.

Agus Salim Pangestu yang menjabat Presiden Direktur Barito Pasific Group, mengakui penyediaan alat-alat untuk BNPB itu diyakininya guna membantu penanganan pandemi. "Dengan studi kelayakan dan restu dari BNPB," kata Agus Salim Pangestu kepada tim KJI melalui pesan WhatsApp pada Kamis, 11 Maret 2021. Djoko Suyanto, perwakilan manajemen PT Mastindo Mulia, melalui pernyataan tertulis menegaskan perusahaannya tidak tahu menahu Sansure bermasalah. Dia juga menegaskan, PT Mastindo Mulia tidak mengetahui reagen Sansure tak cocok dengan alat-alat laboratorium di hampir semua rumah sakit. "Kami cuma menjalankan penunjukan BNPB. Pemahaman kami, BNPB sudah mengujinya," kata Djoko Suyanto.

Djoko Suyanto lantas mengakui, tidak mengetahui soal pengembalian uang Rp7 miliar sebagai ongkos redistribusi atas reagen yang tak terpakai. Ia menegaskan, PT Mastindo Mulia juga hingga kekinian tak pernah mengurus pengembalian atau menerima reagen yang dikembalikan rumah-rumah sakit. "Rp7 miliar itu adalah pengembalian selisih kurs pembelian reagen dan selisih volume PCR kit," kata Djoko.

Terakhir ia menegaskan, keterlibatan anak usaha Barito Group itu dalam pengadaan reagen di BNPB, semata-mata untuk membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19. "Kami memiliki kepedulian besar. Kami melakukan pembelian mandiri."

Tim Liputan Khusus: Erick Tanjung (penulis), Reza Gunadha (penyunting) dan Ema Rohimah (infografis).

Sumber: <https://www.suara.com/news/2021/03/15/083000/tumpukan-alat-tes-covid-19-yang-terbengkalai-di-gudang>.



Doni Monardo mengungkapkan bagaimana dirinya harus mengambil kebijakan yang cepat dan terbaik dari yang terburuk untuk mengatasi pandemi.

DONI MONARDO: KALAU SAYA TAK AMBIL KEPUTUSAN, MAU JADI APA NEGARA KITA?

Suara.com edisi 15 Maret 2021.

Awal tahun 2020, ketika banyak negara panik dan segera menerapkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi pandemi Covid-19, Kementerian Kesehatan Indonesia masih terkesan santai. Belakangan, setelah Covid-19 benar-benar menjadi wabah yang melanda banyak daerah Indonesia, tugas pemberantasan dialihkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Doni Monardo, Kepala BNPB dan juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19, mengakui hampir tak bisa lagi tidur nyenyak. Dia menuturkan, harus membuat berbagai kebijakan baru untuk menanggulangi virus tersebut. Doni, dalam melakoni tugas yang berat itu berpegang setia pada satu prinsip: harus bisa memberikan keputusan cepat dan tepat. Prinsip itulah yang diterapkannya pada setiap keputusan, termasuk soal pengadaan alat-alat Kesehatan yang berguna untuk mendeteksi maupun melawan Covid-19, seperti hazmat, masker, dan juga reagen.

Pada praktiknya, banyak rintangan yang harus dihadapi Doni. Terutama soal reagen, yang pada awal pandemi, terbilang langka. Sementara persediaan reagen di dalam negeri, kian menipis. Akhirnya, dia menerapkan kebijakan strategis, yakni melakukan penunjukan langsung kepada sejumlah perusahaan untuk memasok reagen. Keputusan BNPB itu tepat. Tercatat hingga September 2020, mereka mempunyai stok reagen mencapai 1.956.644 unit, dengan total dana anggaran Rp549 miliar.

Namun belakangan, pengadaan tersebut menimbulkan persoalan. Sedikitnya 300 ribu unit reagen yang dipasok perusahaan-perusahaan rekanan, dikembalikan sejumlah laboratorium dan rumah sakit. Alasan mereka, reagen tersebut tidak dapat dipakai.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) misalnya, mencatat hingga Agustus 2020, terdapat temuan selisih hingga ratusan ribu reagen yang terdistribusi dan yang tercatat, senilai hampir Rp40 miliar. Sementara *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menemukan potensi kerugian negara hampir Rp170 miliar, dari pengadaan reagen hingga Desember 2020.

Doni Monardo mengakui ada ratusan ribu reagen yang dikembalikan rumah sakit dan laboratorium. Dia menjelaskan, persoalan itu diketahui dirinya berdasarkan temuan tim inspektorat BNPB. Selanjutnya, kata Doni, temuan itu sudah ditindaklanjuti melalui audit BPKP yang menyorot 7 perusahaan penyedia reagen-reagen itu. "Kalau saya tidak mengambil keputusan saat itu, mau jadi apa negara kita?" kata Doni.

Tim KJI mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis kepada Doni, terkait hal ini. Selain itu, tim KJI juga menemui Doni di kantornya, Kamis, 11 Maret 2021. Berikut hasil wawancara tersebut:

Berapa banyak alat uji spesimen Covid-19 yang dikembalikan?

Audit BPKP menemukan 473.984 unit reagen merek Sansure dari Tiongkok yang tidak bisa dipakai laboratorium. Saya tanya ke mereka, apakah benar barang tidak berguna? Rupanya, hanya beberapa laboratorium yang enggak bisa pakai.

Pengadaan reagen PCR merek Sansure dilakukan oleh PT Mastindo Mulia sebanyak 499.200 tes pada April 2020. Selain itu, BNPB juga menerima donasi PCR reagen *kit* merek Sansure dari PT Mastindo Mulia, sebanyak 50 ribu tes pada awal pandemi.

Bagaimana nasib barang yang dikembalikan?

Dari hasil penelitian dan pengamatan BNPB bersama Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19 diketahui, Sansure dapat digunakan oleh laboratorium yang memiliki dokter spesialis patologi klinik.

Sampai Januari 2021, terdapat 27 laboratorium yang tak bisa memanfaatkan 165.542 tes RNA merek Sansure. Langkah selanjutnya, BNPB melakukan proses redistribusi ke laboratorium yang mampu memanfaatkan dan mengoperasikan alat itu.

Pada saat ditemukan terdapat beberapa laboratorium yang tak bisa menggunakan Sansure, PT Mastindo Mulia ikut bertanggung jawab dalam pembiayaan, baik proses penarikan produk (*recall*) dari laboratorium yang tak bisa menggunakan barang itu, maupun proses redistribusi ke laboratorium yang bisa menggunakannya.

Terkait masa kedaluwarsa yang pendek, Sansure yang diperoleh dan hasil pengadaan PT Mastindo Mulia, masa kedaluwarsanya hingga April 2022.

Kami mendapat informasi, reagen PCR/RNA belum ada uji coba kualitasnya?

Berdasarkan kajian dari Tenaga Ahli Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, produk Sansure telah mendapatkan sertifikasi CE dan FDA *Approval*, serta menjadi salah satu produk yang direkomendasikan WHO tertanggal 25 Maret 2020.

Sedangkan di dalam negeri, belum ada lembaga yang melakukan uji validasi untuk PCR reagen *kit*.

Kenapa memilih merek Sansure?

Kami tidak mengerti. Kami baru tahu setelah ada pemeriksaan BPKP. Kami pikir semua merek sama.

Sementara dalam jawaban tertulis, Doni mengatakan:

Adanya kesanggupan dari perusahaan untuk menyediakan 1 juta PCR reagen dalam waktu 10 hari. Produk itu diketahui sudah mendapat rekomendasi WHO. Selain itu proses pengadaan darurat bencana didampingi LKPP dan telah diaudit APIP BNPB.

Sebelum pengadaan barang, apa tidak mengidentifikasi kebutuhan RS dan laboratorium?

Pada awal pandemi, semua masih bingung. Mana sempat bertanya. Tiap hari ada permintaan barang ini dari semua laboratorium.

Sejumlah perusahaan pemasok bukan bergerak di bidang kesehatan, bagaimana?

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, maka pandemi bukan situasi yang normal.

Khususnya pada periode awal pandemi antara Maret-April 2020, di mana banyak negara membutuhkan reagen PCR untuk pemeriksaan Covid-19. Kelangkaan reagen PCR bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh negara.

Oleh sebab itu, saya melakukan tindakan dan upaya maksimal guna memenuhi kebutuhan Almatkes untuk menekan penyebaran Covid-19 yang semakin meluas.

Dengan keterbatasan tersebut, pertimbangan terpenting dalam pemilihan penyedia adalah penyedia yang pada saat darurat memiliki sumber daya dan mampu melaksanakan pekerjaan dalam waktu cepat dengan jumlah barang yang banyak sesuai kebutuhan.

Anda dikenal dekat dengan sejumlah pengusaha pemasok reagen, seperti Budiyanto A. Gani pemilik PT TWA, bagaimana penjelasannya?

Proses pengadaan di BNPB terbuka untuk umum. Setiap penyedia yang memiliki produk sesuai spesifikasi kebutuhan dan memenuhi persyaratan sebagai penyedia dapat ditunjuk sebagai penyedia.

Tim Liputan Khusus: Erick Tanjung (penulis), Reza Gunadha (penyunting) dan Ema Rohimah (infografis).

Sumber: <https://www.suara.com/wawancara/2021/03/15/090000/doni-monardo-kalau-saya-tak-ambil-keputusan-mau-jadi-apa-negara-kita>.

ALKES BERMASALAH KIRIMAN BNPB

Jaring.id edisi 14 Maret 2021.



Sumber: *jaring.id*.

Tiga puluh menit setelah 12.997 alat pereaksi spesimen Covid-19 (reagen) tiba di Papua pada 21 Agustus 2020, Antonius Oktavian bergegas menguji sampel lendir yang diduga terjangkit virus SARS-CoV-2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Papua ini tidak ingin menunggu lebih lama untuk memastikan diagnosis terhadap 94 orang pasien.

“Ini bahaya banget,” kata Antonius kepada sejumlah media yang tergabung dalam Klub Jurnalis Investigasi (KJI), terdiri dari *Jaring.id*, *Tempo*, *Suara.com* dan *Alinea.id* pada Rabu, 23 Desember 2020. Antonius tak menyangka seluruh hasil pengujian spesimen yang menggunakan reagen buatan China dengan merek Sansure tersebut menunjukkan hasil negatif. Ia sampai harus meminta stafnya untuk mengulang pemeriksaan sebanyak dua kali dengan menggunakan pereaksi serupa. Hasilnya tetap sama, negatif. “Begitu kami uji coba *negative false*-nya tinggi. Kan ajaib,” ujarnya.

Padahal, menurut Antonius, pasien yang melakukan tes usap saat itu sudah menunjukkan gejala Covid-19, seperti demam dan sesak nafas sebelum akhirnya meninggal. Daripada ragu dan khawatir salah diagnosa, Balitbangkes Papua akhirnya mengembalikan pereaksi kimia merek Sansure ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Pasien yang meninggal kan butuh hasil cepat," kata Antonius sembari menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 perlu diagnosis cepat agar sebaran kasus di provinsi paling Timur Indonesia itu bisa diisolasi.

Karena kejadian itu, Antonius sadar tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pengadaan barang di Jakarta. Balitbangkes Papua memilih untuk mengadakan reagen sendiri. Kata Antonius, reagen yang dibeli saat itu bermerek Fortitude dan diproduksi Singapura. Pereaksi kimia ini dianggap paling cocok dengan alat pengujian yang dipunya laboratorium Balitbangkes Papua. "Kami beberapa kali menggunakan reagen itu, tetapi yang namanya pengadaan butuh waktu," ungkapnya.

Kendala untuk memeriksa sampel dahak dari pasien yang diduga terinfeksi virus Corona tidak hanya terjadi di Papua. Rupanya Balai Besar Penyehatan Teknik Kesehatan Lingkungan Pencegahan Penyakit (BBPTKLPP) Jawa Timur pun mengalami kendala serupa.

Koordinator Tata Usaha yang juga penanggung jawab penanggulangan Covid-19 BBPTKLPP Jawa Timur, Joko Kasihono mengatakan bahwa laboratorium menerima 9.600 reagen Sansure dan Liferiver dari BNPB sepanjang April-Mei 2020. Namun, laboratorium yang bertanggungjawab memeriksa spesimen dari Bali hingga Nusa Tenggara Barat (NTB) ini tidak bisa menggunakan reagen tersebut. Padahal tiap hari, sampel yang diterima laboratorium BBPTKLPP mencapai 5.000.

"Kami coba berkali-kali ternyata hasilnya tidak bisa memenuhi standar," kata Joko Kasihono saat dihubungi KJI secara daring pada Kamis, 17 Desember 2020. Menurutnya, reagen yang berasal dari BNPB tidak cocok dengan mesin pengujian *Polymerase Chain Reaction* (PCR) bersistem terbuka (*open system*) yang dipunya laboratorium BBPTKLPP Jatim. Reagen Sansure maupun Liferiver, kata dia, harus digunakan pada mesin bermerek sama atau biasa disebut *single plate*. Oleh sebab itu, BBPTKLPP Jatim memutuskan untuk mengembalikan reagen Sansure dan Liferiver kepada BNPB. "Kami tidak bisa menerima. Kalau pun ada kiriman, langsung dialihkan ke lab atau rumah sakit yang cocok," ujarnya.

Dari Jawa Timur, sedikitnya ada 11 rumah sakit dan laboratorium yang juga mengembalikan reagen kiriman BNPB. Hingga 3 September 2020, jumlahnya mencapai 49.481 unit. Ratusan dokumen yang diterima KJI menunjukkan sekitar 78

laboratorium dan rumah sakit di 29 provinsi yang mengembalikan alat deteksi virus ke BNPB. Dalam kurun waktu April-September 2020, jumlahnya mencapai 498.644 unit reagen. Dari jumlah itu, reagen merek Sansure berjumlah 483.819 unit. Sisanya merek Intron (1.000 unit), Wizprep (10.000 unit), Seegene (300 unit), Liferiver (2.825 unit) dan Kogene (700 unit). Dari enam merek, diketahui hanya Sansure, Seegene dan Liferiver yang direkomendasikan Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 20 April 2020.

Sejak November tahun lalu, *Jaring.id* bersama wartawan yang tergabung dalam KJI telah mengecek sejumlah laboratorium maupun rumah sakit yang menerima reagen dari BNPB. Laboratorium di Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur adalah salah satunya. Pengembalian reagen merek Liferiver itu diantar melalui surat Nomor 2095/UN3.0.1/TU/2020 pada 3 September 2020. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kondisi reagen Liferiver bernomor LOT P20200404 itu mendekati kedaluwarsa pada 19 Oktober 2020.

Menurut Kepala Hubungan Masyarakat RS Unair, Brihastama Sawitri reagen yang dikembalikan ke BNPB sebanyak 1.850 unit. "Waktu itu memang kami kembalikan," kata Brihastama saat dihubungi tim KJI melalui sambungan telepon, Jumat, 12 Maret 2021.

Jakarta menjadi provinsi yang paling banyak mengembalikan reagen ke BNPB. Dari 15 rumah sakit, ada 85.168 reagen yang dikirim balik atau meminta BNPB mengambilnya kembali. Laboratorium milik Lembaga Biologi Molekuler Eijkman mengembalikan 4.800 unit reagen karena dinilai tidak akurat.

Sementara Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) meminta BNPB untuk mengambil kembali 10 ribu reagen merek Wixprep melalui surat F0.03.04/VIII.1/1640/2020. RSCM menyebut bahwa reagen yang diterima pada Agustus 2020 itu tidak dapat digunakan lantaran waktu ekstrasinya lebih lama ketimbang reagen lain. Biasanya RSCM menggunakan reagen merek Sansure yang proses ekstrasinya membutuhkan waktu 2 jam lebih sedikit ketimbang Wixprep.

Kepala Laboratorium Patologi Klinik RSCM, Nuri Dyah Indrasari menjelaskan Wizprep butuh waktu 5-6 jam untuk melakukan 12 tahap pemisahan RNA virus Corona. "Kalau satu spesimen ada 12 tahap bagaimana dengan 300 spesimen? Sangat melelahkan sekali bagi petugas," kata Nuri kepada tim KJI lewat wawancara daring, Kamis, 4 Maret 2021 lalu.

Meski begitu, menurut Nuri, reagen merek Wizprep tidak kunjung diambil, sehingga RSCM memutuskan untuk menaruhnya di gudang penyimpanan. Berdasarkan dokumen yang diperoleh tim KJI, reagen yang dibeli BNPB juga tersimpan di sejumlah gudang, antara lain Gudang BGR di Komplek Kelapa Gading, Jakarta Utara, lalu *cold storage* Rawa Bokor di Bogor, Jawa Barat, lalu Gudang Pusat Krisis Kementerian Kesehatan yang terletak di Jalan Percetakan Negara II Jakarta, serta Gudang Merpati Halim dan Gudang Jatiasih.

Dari pantauan tim KJI di Gudang BGR Kelapa Gading, tumpukan reagen disimpan dalam peti pendingin. Dalam peti tersebut, tampak tumpukan reagen Sansure terbungkus dalam kotak berbahan *styrofoam* berukuran sekitar 1×1 meter. Kata petugas di sana, pengembalian reagen masih terjadi hingga Maret 2021.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal (TNI) Doni Monardo tak menyangkal perihal pengembalian ratusan ribu reagen yang dibeli BNPB pada saat awal pandemi Covid-19 di Indonesia. Ia mengklaim pembelian reagen saat itu sudah berpedoman pada rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan seturut penilaian dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Di mana produk Sansure telah mengantongi lisensi dari *China Food and Drug Administration*.

“Situasinya sangat dilematis. Dari Kemenkes belum ada *list* (kebutuhan laboratorium). Semuanya masih bingung saat itu. Kalau sekarang disalahkan karena reagen tidak cocok, orang belum ada *list*-nya. Kalau tidak diambil, terus siapa nanti yang akan bertanggung jawab? Saya tidak punya pilihan. Dokter-dokter yang terkapar bisa semakin banyak,” jelas Doni saat ditemui tim KJI di lantai 10 Gedung BNPB, Kamis, 11 Maret 2021.

Saat reagen tersebut dibeli, Doni menjelaskan, para petugas penanganan Covid-19 tengah menghadapi kelangkaan reagen untuk menguji spesimen dahak orang yang diduga terinfeksi Covid-19. Sebab itu, pemerintah memutuskan untuk mempercepat pemenuhan alat kesehatan. Termasuk menunjuk PT Mastindo Mulia dan sejumlah perusahaan lain untuk memasok ratusan ribu reagen. Sebelumnya, PT Mastindo sempat menghibahkan 50 ribu reagen dengan merek sama sebagai bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Pertimbangan terpenting dalam pemilihan penyedia adalah mereka yang pada saat darurat Covid-19 memiliki sumber daya dan mampu melaksanakan pekerjaan dalam waktu cepat dengan jumlah barang yang banyak,” ujarnya.

Menurut Doni, masalah pengembalian reagen oleh laboratorium di pelbagai daerah sudah ditangani Inspektorat BNPB. Proses pengadaan ini pun sudah diaudit oleh tim dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Kita *reca//* seluruh RNA merek Sansure dan mengganti dengan produk sejenis beda merek. Selain itu, seluruh biaya penarikan produk ditanggung pihak penyedia," ujarnya.

Biaya pertanggungjawaban ini dikatakan sebesar Rp7 miliar. Dengan uang itu, pihak penyedia melakukan redistribusi barang kepada laboratorium maupun rumah sakit yang alat PCR-nya cocok dengan reagen merek Sansure. "Saya tidak punya pengalaman. Tahunya senjata. Masalah reagen dan alat kesehatan tidak mengerti. Seluruh pengadaan melalui rapat," tambah mantan Pangdam Pattimura ini.

Sengkarut Penunjukan Langsung

PT Mastindo Mulia, salah satu perusahaan milik Prajogo Pangestu menandatangani kontrak senilai Rp172,5 miliar pada 22 April 2020. Padahal perusahaan ini sebelumnya tidak memiliki rekam jejak sebagai penyalur alat kesehatan. Perusahaan ini bergerak di bidang keuangan, asuransi dan real estate. Baru pada 31 Maret, PT Mastindo melebarkan sayap dengan mencatatkan diri sebagai penyedia alat laboratorium, farmasi dan kedokteran dalam dokumen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham.

Perwakilan manajemen PT Mastindo, Djoko Suyanto menyampaikan bahwa perusahaannya tidak tahu bahwa reagen merek Sansure tidak cocok digunakan hampir seluruh laboratorium dan rumah sakit. "Kami hanya menjalankan penunjukan BNPB," tutur Djoko sebelum menyatakan bahwa seharusnya kebutuhan reagen sudah dicek BNPB.

Menurut Djoko, keterlibatan anak usaha Barito Group dalam pengadaan reagen di BNPB semata-mata untuk membantu penanganan pandemi Covid-19. "Kami memiliki kepedulian besar. Kami lakukan pembelian mandiri," kata Djoko melalui keterangan tertulis yang diterima tim KJI pada Jumat, 12 Maret 2021.

Adapun uang Rp7 miliar yang disebut sebagai ongkos redistribusi tak lain berasal pengembalian selisih dari nilai tukar uang. "Uang Rp7 miliar adalah pengembalian selisih kurs pembelian reagen dan selisih volume PCR kita," ujarnya.

Berdasarkan penelusuran lembaga antikorupsi ICW yang tertuang dalam Kajian Tata Kelola dan Distribusi Alat Kesehatan dalam kondisi Covid-19 yang disusun pada

2021, BNPB tercatat membeli 1.956.644 unit reagen PCR, RNA dan *Viral Transport Medium* (VTM) dengan total anggaran mencapai Rp549 miliar sepanjang April-September 2020.

Anggaran lebih dari setengah triliun rupiah itu diserahkan kepada tujuh perusahaan. PT Mastindo Mulia mencaplok proyek pengadaan senilai Rp172,5 miliar untuk menyediakan 500 ribu reagen merek Sansure. Perusahaan lain yang mendapat proyek ini ialah PT Makmur Berkah Sehat. Perusahaan ini mengantongi Rp7 miliar guna mendatangkan reagen Wizprep sebanyak 100 ribu unit, PT Sinergi Indomitra Pratama mendapatkan anggaran Rp199,9 miliar untuk menyediakan 559.020 reagen merek Liferiver dan PT Trimitra Wisesa Abadi mengadakan 441.832 reagen PCR, RNA dan VTM senilai Rp110,4 miliar.

Seperti PT Mastindo Mulia yang baru mulai mengadakan alat kesehatan, PT Trimitra Wisesa Abadi yang diketahui milik Budiyanto A. Gani baru menambah jangkauan usahanya ke bidang medis 20 hari setelah kasus pertama Covid-19 diumumkan Presiden Joko Widodo pada Maret 2020. Mula-mula perusahaan ini bergerak dalam bidang konstruksi, transportasi, pertanian dan pengelolaan air. Informasi tersebut tertuang dalam dokumen administrasi umum (AHU).

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Prasinta Dewi menyatakan bahwa dalam penunjukan langsung pengadaan reagen Covid-19, BNPB bertolak pada surat edaran WHO dan proses validasi terhadap perusahaan penyedia. Apabila perusahaan teridentifikasi sebagai penyalur alat kesehatan dan dapat menyediakan reagen, maka perusahaan tersebut berhak mendapat pengadaan. "Kalau syarat tak cukup, proses tidak berlanjut," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur PT Trimitra Wisesa Abadi, Budiyanto menjelaskan bahwa pada awal pandemi semua perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun dapat berpartisipasi dalam pengadaan di BNPB. Namun, hal itu hanya boleh di periode awal pandemi. Oleh sebab itu, Budiyanto memilih untuk mengubah akta perusahaan. "Semua bikin karena syaratnya begitu," kata Budiyanto kepada tim KJI saat ditemui di restoran padang, Sari Ratu Kitchen yang juga salah satu usaha miliknya, Rabu, 10 Maret 2021.

Dalam pertemuan itu, Budiyanto pun mengaku kenal dengan Doni Monardo. "Saya kenal Pak Doni sejak 2004," ucapnya. Perkenalan terjadi saat Doni masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat. Doni merupakan keponakan dari istri Auwines, orang yang berkongsi dengan Budiyanto

untuk membesarkan PT Inti Nusa Abadi, perusahaan yang berdiri pada 18 Januari 2018. Namun, kerjasama bisnis Budiyanto dan dengan keponakan Doni sudah berawal sejak 1984. Keduanya sepakat membesarkan Restoran Sari Ratu yang saat ini memiliki banyak cabang di Jakarta, salah satunya berlokasi di pusat perbelanjaan Plaza Indonesia.

Meski begitu, Budiyanto membantah kalau penunjukan langsung diperoleh karena ia berteman dengan Doni Monardo. "Perusahaan saya paling siap," tegasnya. PT Trimitra tercatat mendapat dana jumbo dalam penunjukan langsung di BNPB. Selain pengadaan yang dilakukan pada Juli-September 2020, perusahaan ini juga mendapat pengadaan serupa sebesar Rp310,7 miliar untuk menyediakan 4.632.123 reagen pada Oktober-Desember di tahun yang sama. "Memang kenapa kalau dapat paket? Ini soal berani ambil risiko atau tidak," ujarnya.

Hingga Desember 2020, Budiyanto telah mendatangkan enam merek reagen dari China dan Korea Selatan, seperti Intron, Liferiver, Beaver, Toyoba, Cellpro dan Citoswab ke Indonesia. Dari dua kali pengadaan ini, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat perusahaan Budiyanto telah menyedot anggaran BNPB sebesar Rp427 miliar atau 49,5 persen dari seluruh pengadaan reagen di BNPB sepanjang tahun lalu. "Mereka paling banyak berkontrak," ujar peneliti ICW, Wana Alamsyah. Hebatnya, PT Trimitra luput dari pemeriksaan BPKP.

Sengkarut pengadaan reagen ini sebetulnya turut menjadi temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam surat atensi kedua terhadap tata Kelola pengadaan barang di BNPB pada 4 Agustus 2020 disebutkan bahwa pengadaan PCR *kit* tidak melewati uji coba kualitas, sehingga tidak cocok digunakan dengan alat-alat yang dipunyai laboratorium dalam negeri. Dengan begitu uang negara yang dihamburkan untuk membeli ratusan ribu unit reagen dalam pengadaan itu mencapai Rp39,9 miliar.

Oleh sebab itu, BPKP menyarankan 4 hal kepada BNPB. *Pertama* ialah melakukan identifikasi dan menganalisa terhadap ketersediaan PCR, RNA dan VTM yang tidak dapat digunakan di daerah; *kedua*, menyusun tata cara pengembalian barang dari daerah-daerah yang tidak tersedia *dry ice*; *ketiga*, menarik seluruh RNA *kit* dan VTM merek Sansure yang tidak dapat digunakan agar dapat mendistribusikan ulang kepada rumah sakit dan laboratorium lain; *terakhir*, mendorong Gugus Tugas di daerah agar melengkapi dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) tentang distribusi reagen PCR dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Pusat dalam melakukan perubahan kebijakan distribusi barang.

Meski begitu, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi, Eri Satriana saat dikonfirmasi tidak banyak berkomentar soal temuan lembaganya. Ia hanya membenarkan isi dari surat yang dilayangkan BPKP ke BNPB. "Berdasarkan identifikasi suratnya, itu benar dari kami dan ditandatangani pejabat BPKP," kata Eri saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 9 Maret 2021.

Peneliti ICW, Dewi Anggreini menyangsikan rekomendasi BPKP yang hanya bersifat administratif. Menurutnya, pengadaan reagen sebanyak 498.644 unit tahun lalu berpotensi membuat negara rugi sebesar Rp169,1 miliar. Sedangkan proses pengembalian reagen merek Sansure diduga merugikan negara Rp166 miliar lantaran gagal guna. Sementara merek lain, yakni Lifeiver Rp1 miliar, Intron Rp200 juta, Kogene Rp196 juta, Seegene Rp94 juta, dan Wizprep sebesar Rp700 juta.

Hal ini, menurutnya, akibat dari praktik perencanaan yang tak sesuai kebutuhan. Dengan begitu BNPB melanggar Peraturan LKPP Nomor 13/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa. "Patut diduga bahwa mereka tidak menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan alat," kata Dewi.

Berdasarkan temuan tersebut, ICW berencana akan melaporkan kegagalan proses pengadaan barang tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kami berharap ini ditindaklanjuti," pungkas Dewi.

**Tim Jaring.id: Abdus Somad (penulis), Damar Fery Ardiyan (penyunting)
Kholikul Alim (infografis).**

Sumber: <https://jaring.id/alkes-bermasalah-kiriman-bnpb/>.

SATU MASALAH DI TIGA NEGARA

Jaring.id edisi 15 Maret 2021.

Kabar muncul dari negara tetangga. Maria Rosario Vergeire, Wakil Menteri Kesehatan Filipina memutuskan menarik alat deteksi Covid-19 merek Sansure yang didatangkan dari Negeri Tirai Bambu. Dalam jumpa pers pada Sabtu, 28 Maret 2020, ia menyatakan kalau alat tersebut kurang akurat. "Akurasinya hanya 40 persen sehingga kami tak memakainya," terang Vergeire.

Jeleknya kualitas Sansure membuat Vergeire heran. Pasalnya, alat dengan merek tersebut sudah mengantongi lisensi *China Food and Drug Administration* (CFDA). Pun rekomendasi Badan Kesehatan Dunia sudah didapat. Selang beberapa hari, pernyataan Vergeire dibantah Kedutaan Besar Cina di Manila. Kedubes Cina menyebut alat ini telah diuji oleh *Institute for Tropical Medicine* dan menunjukkan akurasi sangat baik.

Vergeire menarik pernyataannya, tetapi masalah tak berhenti. Presiden Rodrigo Duterte menduga harga Sansure terlalu mahal. "Harga wajarnya adalah 1,75 juta peso (Rp518 juta), tetapi pemerintah harus mengeluarkan ongkos sebesar 4 juta peso per unit," kata dia seperti dikutip CNN Filipina.

Kisruh Sansure di Filipina tak menghentikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menggunakan merek ini. Melalui mekanisme penunjukan langsung, lembaga yang dipimpin Doni Monardo ini menunjuk PT Mastindo Mulia, perusahaan batu bara milik taipan Prajogo Pangestu untuk mendatangkan 500.000 reagen merek Sansure. Nilainya mencapai Rp172,5 miliar. Di tengah meningkatnya jumlah pasien yang terjangkit virus corona, reagen Sansure gegas dikirim ke berbagai penjuru nusantara.

Dinas Kesehatan Papua merupakan salah satu penerima reagen merek Sansure. Jumlahnya mencapai 12.997 unit. Namun, barang kiriman BNPB tersebut tak

lama berada di sana. Sebanyak 16 sampel yang dibaca dengan reagen Sansure mengembalikan hasil negatif meskipun diambil dari orang yang mengalami berbagai gejala Covid-19 seperti batuk dan demam.

“*False negative* begitu tinggi,” ujar Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua, Antonius Oktavian kepada tim KJI, pada Rabu, 23 Desember 2020. Keluhan Oktavian diperkuat Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Reagen Sansure terlalu sensitif sehingga pengujian perlu dilakukan berulang kali. Selain memakan waktu lebih lama, langkah tersebut juga terhitung boros.

Oktavian yang meragukan akurasi reagen Sansure kemudian memilih mengembalikannya ke BNPB pada 21 Agustus 2020. Ia beralih ke merek Biosensor buatan SD Biosensor, perusahaan asal Ginseng Korea Selatan, yang dinilai lebih akurat.

Penelusuran yang dilakukan KJI menemukan kalau bukan hanya merek Sansure yang bermasalah dan dikembalikan ke BNPB. Merek Seegene, Liferiver, Intron, Kogene, dan Wizprep mengalami kondisi serupa. Dari enam merek ini hanya tiga merek pertama yang direkomendasikan WHO dalam surat edaran bertarikh 20 April 2020. *Indonesia Corruption Watch* mencatat sepanjang April-September 2020 sebanyak 78 laboratorium di 29 provinsi yang mengembalikan 498.644 unit komponen alat uji Covid-19. Uang yang dikeluarkan untuk membeli ratusan ribu alat tersebut lebih dari Rp169 miliar. Hanya saja, mereka Sansure memang paling banyak dikembalikan, Dari 500 unit, hanya 3,2 persennya saja yang dipakai, sedangkan sisanya sebanyak 483.984 unit diretur.

Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan kalau hanya beberapa laboratorium saja yang tidak memakai bisa memakai alat deteksi Covid-19 kiriman BNPB. “Kami tarik yang tidak cocok, lalu didistribusikan ke laboratorium yang cocok. Artinya tidak ada barang yang terbuang sia-sia. Semua biaya juga tanggung jawab penyedia,” ujarnya saat ditemui KJI pada Kamis, 11 Maret 2021.

Menurut peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Wana Alamsyah, kondisi darurat tak membuat uji teknis dan validasi alat deteksi virus bisa diabaikan sebelum mengumumkan pengadaan. Semestinya, pemerintah meminta laboratorium dan rumah sakit mengirimkan spesifikasi PCR yang sesuai alat yang mereka miliki. “Apalagi beberapa negara sudah mengumumkan penarikan Sansure,” katanya.

Tingkat akurasi Sansure juga menjadi masalah di Malaysia sehingga ditarik dari beberapa laboratorium rumah sakit. "Akurasinya tidak sesuai harapan," kata Direktur Jenderal Kesehatan Malaysia, Noor Hisham Abdullah.

Langkah tersebut ditindaklanjuti dengan menggunakan alat uji lain yang diproduksi Korea Selatan dan Singapura. Sama seperti di Indonesia, Milton Lum Siew Wah dari Malaysian Medical Council, mengatakan kalau pengadaan alat deteksi Covid-19 di Negeri Jiran tak melewati proses uji coba.

Segendang sepenarian, pengadaan Sansure di Indonesia, diakui Kepala BNPB Doni Monardo, juga tak melalui proses uji coba. Lantaran kelangkaan reagen PCR, keputusan pengadaan merek ini didasari rekomendasi pakar dan WHO. Selain itu, kesanggupan perusahaan untuk menyediakan 1 juta reagen PCR dalam waktu 10 hari.

Meski dikembalikan oleh banyak laboratorium, Doni berkelit kalau alat deteksi yang dikembalikan bakal didistribusikan ulang ke laboratorium yang cocok. Tak sampai di situ, kelebihan unit yang tak terpakai juga bisa dikembalikan ke perusahaan pemasok dan akan dibeli kembali. "Perusahaan bertanggung jawab dalam proses penarikan dan redistribusinya," kata dia.

Penelusuran yang dilakukan KJI menemukan kalau ribuan unit alat deteksi Covid-19 yang dikembalikan laboratorium, menumpuk di gudang BNPB di BGR, Kelapa Gading. BNPB, ketika dikonfirmasi pada Kamis, 11 Maret 2021, juga tak dapat menunjukkan kalau mereka telah menjalankan rekomendasi BPKP untuk melakukan redistribusi alat-alat tersebut.

***Tim Jaring.id: Abdus Somad (penulis), Damar Fery Ardiyan (penyunting)
Kholikul Alim (infografis).***

Sumber: <https://jaring.id/satu-masalah-di-tiga-negara/>.

DONI MONARDO: KAMI PIKIR SEMUA MEREK SAMA

Jaring.id edisi 14 Maret 2021.

Tepat setahun sejak ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk mengomandoi penanganan pandemi Covid-19, Doni Monardo mengaku hampir tidak bisa tidur lelap. Pasalnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini tidak punya gambaran lengkap bagaimana harus memerangi pertumbuhan kasus Covid-19. Yang ia tahu selama ini hanya manajemen bencana alam dan perang. Meski begitu, ia meyakini bahwa penanganan Covid-19 perlu keputusan cepat, baik dalam melakukan isolasi terhadap arus orang, maupun pengadaan alat kesehatan yang berguna untuk mendeteksi virus corona.

Namun, melakukan itu semua bukan pekerjaan mudah. Satgas Covid-19 sampai harus berjibaku menghadapi negara lain yang membutuhkan alat kesehatan yang sama pada Maret-April 2020, seperti masker, pakaian pelindung hazmat dan juga reagen yang merupakan bahan penting untuk mengidentifikasi paparan virus corona pada tubuh manusia. Terlebih saat itu, menurut Doni, jumlah reagen di dalam negeri kian menipis. BNPB memutuskan untuk melakukan penunjukan langsung sejumlah perusahaan untuk menyediakan reagen. Belakangan, pengadaan tanpa tender ini belakangan terbukti menyimpan beberapa masalah.

Sepanjang Juli-September, BNPB mengadakan reagen sebanyak 1.956.644 unit dengan anggaran mencapai Rp549 miliar. Lebih dari 400 ribu reagen dikembalikan sejumlah laboratorium dan rumah sakit lantaran tidak dapat dipakai. Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mensinyalir adanya kerugian negara dalam pengadaan tersebut. "Kalau saya tidak mengambil keputusan saat itu, mau jadi apa negara kita?" ungkap Doni yang didampingi sejumlah anak buahnya ketika ditemui tim KJI di kantornya pada Kamis, 11 Maret lalu. Berikut petikan wawancara dengan Doni Monardo dan jawaban tertulis BNPB yang dikirimkan kepada tim KJI.

Bisa Anda jelaskan berapa banyak alat uji spesimen Covid-19 yang salah?

Audit BPKP menemukan 473.984 unit reagen merek Sansure dari Tiongkok yang

tidak bisa dipakai laboratorium. Saya tanya ke mereka, apakah benar barang tidak berguna? Rupanya, hanya beberapa laboratorium yang nggak bisa pakai.

Mengapa?

Alat laboratoriumnya tidak cocok dengan reagen. Kami tarik yang tidak cocok, lalu didistribusikan ke laboratorium yang cocok. Artinya tidak ada barang yang terbuang sia-sia. Semua biaya juga tanggung jawab penyedia.

Kami sempat mengecek Gudang BNPB di Kelapa Gading dua pekan lalu, reagen masih menumpuk..

Prasista Dewi, Deputy Bidang Logistik dan Peralatan BNPB: Sudah tidak ada. Sudah kosong.

Mengapa memilih merek Sansure?

Kami tidak mengerti. Kami baru tahu setelah ada pemeriksaan BPKP. Kami pikir semua merek sama.

[Tertulis] Adanya kesanggupan dari perusahaan untuk menyediakan 1 juta PCR reagen dalam waktu 10 hari. Produk itu diketahui sudah mendapat rekomendasi WHO. Selain itu proses pengadaan darurat bencana didampingi LKPP dan telah diaudit APIP BNPB.

Merujuk Pasal 6 (1) Peraturan LKPP Nomor 13/2018, bagaimana BNPB mengidentifikasi kebutuhan rumah sakit dan laboratorium sebelum mengadakan barang dalam kondisi darurat?

Di awal pandemi, semua masih bingung. Mana sempat bertanya? Tiap hari ada permintaan barang ini dari semua laboratorium.

Berarti belum ada uji coba terhadap kualitas produk?

Pengadaan reagen dari PT Mastindo Mulia dilakukan pada awal pandemi di mana terjadi kelangkaan alatkes, khususnya reagen PCR yang menjadi *high demand* di berbagai negara terdampak Covid-19. Keputusan pengadaan reagen merek Sansure didasari rekomendasi pakar di mana merek tersebut direkomendasikan WHO pada 25 Maret 2020. Sedangkan di dalam negeri belum ada lembaga yang melakukan uji validasi untuk PCR reagen *kit*.

Berdasarkan dokumen pengadaan, sejumlah perusahaan penyedia bukan perusahaan yang bergerak di bidang medis atau kesehatan. Bagaimana penjelasan Anda?

[Tertulis] Pandemi Covid-19 bukan situasi normal. Khususnya pada periode awal pandemi antara Maret-April 2020 di mana banyak negara membutuhkan reagen PCR untuk pemeriksaan Covid-19. Kelangkaan reagen PCR bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh negara. Oleh sebab itu, saya melakukan tindakan dan upaya maksimal guna memenuhi kebutuhan Almatkes untuk menekan penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Dengan keterbatasan tersebut, pertimbangan terpenting dalam pemilihan penyedia adalah penyedia yang pada saat darurat memiliki sumber daya dan mampu melaksanakan pekerjaan dalam waktu cepat dengan jumlah barang yang banyak sesuai kebutuhan.

Bukan karena kenalan?

Proses pengadaan di BNPB terbuka untuk umum. Setiap penyedia yang memiliki produk sesuai spesifikasi kebutuhan dan memenuhi persyaratan sebagai penyedia dapat ditunjuk sebagai penyedia.

***Tim Jaring.id: Abdus Somad (penulis), Damar Fery Ardiyan (penyunting)
Kholikul Alim (infografis).***

Sumber: <https://jaring.id/doni-monardo-kami-pikir-semua-merek-sama/>.

PETI PENDINGIN REAGEN RETUR

Jaring.id edisi 15 Maret 2021.

Peti pendingin di gudang PT Bhandha Ghara Reksa (Persero), Kelapa Gading, Jakarta Utara memuat sejumlah kotak berbahan styrofoam dengan label Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Di dalamnya terdapat tumpukan pereaksi kimia yang dapat mendeteksi Covid-19 (reagen) buatan China dari Sansure Biotech. Tumpukan reagen dengan kemasan yang didominasi putih dan garis merah ini ialah satu dari sejumlah merek reagen yang dikembalikan 78 rumah sakit dan laboratorium ke BNPB.

Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP) menemukan pengembalian reagen yang kalau ditaksir hampir Rp40 miliar hingga Agustus 2020. Sedangkan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menduga ada potensi kerugian negara sebesar Rp169,1 miliar dalam pengadaan tanpa melalui tender tersebut.

Merujuk laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) berjudul "Kajian Tata Kelola dan Distribusi Alat Kesehatan dalam kondisi Covid-19" puluhan laboratorium dan rumah sakit sedikitnya memulangkan 498.644 unit reagen sepanjang April-September 2020. Reagen tersebut di antaranya, Intron, Wizprep, Seegene, Liferiver, Kogene dan Sansure. dari jumlah itu, reagen Sansure yang dikembalikan sebanyak 209.544 atau setara dengan Rp58,7 miliar.

"Merek paling banyak yang dikembalikan dalam konteks RNA itu adalah merek Sansure," kata peneliti ICW, Wana Alamsyah kepada media yang tergabung dalam Klub Jurnalis Investigasi (KJI).

Sementara itu, dalam surat atensi kedua terhadap tata kelola pengadaan barang di BNPB pada 4 Agustus 2020 disebutkan bahwa pengadaan PCR *kit* oleh BNPB tidak melewati uji coba kualitas, sehingga tidak cocok digunakan dengan alat-alat yang dipunyai laboratorium dalam negeri. Oleh sebab itu, BPKP menyarankan agar BNPB menarik barang yang tidak sesuai agar dapat segera didistribusikan kepada rumah sakit dan laboratorium yang cocok.

Namun hingga awal Maret lalu, tim KJI masih menemukan setumpuk reagen merek Sansure di Kelapa Gading. Reagen lain tersimpan di gudang Rawa Bokor, Bogor, Jawa Barat, Gudang Pusat Krisis Kementerian Kesehatan yang terletak di Jalan Percetakan Negara II Jakarta, serta Gudang Merpati Halim dan Gudang Jatiasih.

Saat dikonfirmasi perihal ini, Prasista Dewi, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB menyatakan bahwa pihaknya sudah menjalankan rekomendasi BPKP dengan redistribusi reagen yang dikembalikan. "Sudah tidak ada. Sudah kosong," ujarnya saat ditemui di lantai 10 Gedung BNPB, Jakarta pada Kamis, 11 Maret 2021.

Dalam jawaban tertulis BNPB yang juga diterima *Jaring.id*, masih terdapat 165.542 tes RNA merek Sansure yang tidak bisa dimanfaatkan laboratorium untuk mendiagnosa Covid-19 hingga Januari 2021. "Pihak penyedia PT Mastindo Mulia ikut bertanggung jawab dalam pembiayaan, baik proses penarikan produk (*recall*) maupun proses redistribusi kepada laboratorium yang mampu menggunakan RNA Sansure," demikian tertulis dalam surat jawaban BNPB ketika dikonfirmasi mengenai nasib reagen yang dipulangkan.

PT Mastindo Mulia selaku penyedia reagen PCR *kit* merek Sansure mengaku tidak mengetahui keberadaan barang yang tak cocok dengan alat pengecekan Covid-19. Perwakilan manajemen PT Mastindo Mulia, Djoko Suyanto menjelaskan pihaknya sudah tidak lagi berhubungan dengan BNPB setelah pengadaan dinyatakan selesai. "Kami tidak mengetahui tentang hal tersebut," kata Djoko Suyanto dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tim KJI pada Jumat, 12 Maret 2021.

Berdasarkan dokumen kontrak, PT Mastindo mengadakan barang tersebut pada 22 April 2020 melalui surat pesanan nomor SP.83/MM-COVID-19/PPK-DSP/DV/4/2020. BNPB menunjuk perusahaan ini untuk mengadakan reagen RNA dan PCR *kit* sebanyak 500.000 unit dengan total nilai Rp172,5 miliar. Menurut Djoko, dalam kontrak tersebut tidak ditemukan klausul terkait pengembalian maupun penggantian barang yang belakangan diketahui tidak sesuai. "Kami tidak pernah menerima pengembalian barang berupa PCR *kit* dari BNPB," kata Djoko pada Jumat, 12 Maret 2021.

Selain Mastindo, sejumlah perusahaan yang diketahui mendapat proyek pengadaan reagen dari BNPB ialah PT Makmur Berkah Sehat. Perusahaan ini mengantongi Rp7 miliar guna mendatangkan reagen Wizprep sebanyak 100 ribu unit, PT Sinergi Indomitra Pratama mendapatkan anggaran Rp199,9 miliar untuk menyediakan 559.020 reagen merek Liferiver dan PT Trimitra Sisesa Abadi mengadakan 441.832

reagen PCR, RNA dan VTM senilai Rp110,4 miliar. Sepanjang Juli-September 2020, BNPB tercatat membeli 1.956.644 unit reagen PCR, RNA dan *Viral Transport Medium* (VTM) dengan total anggaran mencapai Rp549 miliar.

Peneliti ICW, Wana Alamsyah menyarankan agar BNPB segera mendistribusikan reagen Covid-19 sebelum kedaluwarsa. "Selama ada barang dan bisa dipakai segera distribusikan," kata Wana. Namun ketika barang tersebut sudah tidak dapat digunakan, ICW meminta BNPB untuk lebih transparan dalam pengelolaan barang yang menggunakan duit negara.

Wana merujuk pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 04/2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan. Pada Pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa sistem manajemen logistik peralatan dalam penanggulangan bencana meliputi; perencanaan, pengadaan, pergudangan, pendistribusian dan penghapusan. "Kita tidak pernah tahu barang itu dimusnahkah atau tidak. Ketika dimusnahkan bagaimana pertanggungjawaban BNPB?" Wana mempertanyakan.

Dalam keterangan tertulis, BNPB menyebut bahwa masa kedaluwarsa reagen merek Sansure yang disediakan oleh PT Mastindo Mulia hingga April 2022. Sedangkan dalam penelusuran *Jaring.id*, merek lain seperti Liferiver hanya tahan sampai 19 Oktober 2020.

Karena alasan kedaluwarsa ini Rumah Sakit Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur mengembalikan reagen tersebut melalui surat Nomor 2095/UN3.0.1/TU/2020 pada 3 September 2020. Menurut Kepala Hubungan Masyarakat RS Unair, Brihastama Sawitri, reagen Liferiver yang dikembalikan saat itu sebanyak 1.850 unit. "Waktu itu memang kami kembalikan," kata Brihastama saat dihubungi tim KJI melalui sambungan telepon pada Jumat, 12 Maret 2021.

Unair bukan satu-satunya laboratorium di Jatim yang mengembalikan reagen BNPB. Balai Besar Penyehatan Teknik Kesehatan Lingkungan Pencegahan Penyakit (BBPTKLPP) Jawa Timur pun melakukan hal serupa. Laboratorium ini diketahui menerima 9.600 reagen merek Sansure dan Liferiver sepanjang April-Mei 2020.

Namun, laboratorium yang bertanggungjawab memeriksa spesimen dari Bali hingga Nusa Tenggara Barat (NTB) ini tidak bisa menggunakan reagen tersebut. Pasalnya menurut Koordinator Tata Usaha yang juga penanggung jawab penanggulangan Covid-19 dari BBPTKLPP Jawa Timur, Joko Kasihono, reagen yang berasal dari BNPB tidak cocok dengan mesin pengujian *Polymerase Chain Reaction* (PCR) bersistem

terbuka (*open system*) yang dipunya laboratorium BBPTKLPP Jawa Timur. “Kami tidak bisa menerima. Kalau pun ada kiriman, langsung dialihkan ke lab atau rumah sakit yang cocok,” ujarnya pada Kamis, 17 Desember 2020.

Kepala BNPB, Doni Monardo meyakinkan bahwa proses pengadaan reagen pada awal pandemi Covid-19 di Indonesia telah dikaji tim ahli dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Reagen merek Sansure dipilih karena sesuai dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Produk China ini telah mendapatkan sertifikat *Conformite Europeenne* (CE) dan *Food and Drug Administration* (FDA). “Itu salah satu produk yang telah direkomendasikan oleh WHO,” ujar Doni.

Meski begitu, BNPB mengakui bahwa belum ada pengujian terhadap kualitas produk. “Di dalam negeri belum ada lembaga yang melakukan uji validasi untuk PCR reagen *kit*,” demikian tertulis dalam jawab tertulis BNPB.

Menurut Doni, hal utama yang mendasari BNPB mengadakan reagen pada April 2020 ialah kondisi darurat. Saat itu, kata dia, pengujian Covid-19 yang direncanakan 10.000 per hari terancam berhenti karena jumlah reagen yang semakin menipis. Sementara jumlah alat dan material kesehatan (Almatkes) untuk menangani pandemi Covid-19 termasuk reagen di pasar dunia terbatas.

Oleh sebab itu, BNPB memutuskan untuk mengambil keputusan cepat ketika ada perusahaan yang berkomitmen menyediakan reagen dalam jumlah banyak. Salah satunya ialah PT Trimitra Wasesa Abadi. Bila PT Mastindo Mulia mengadakan hampir 500 ribu tes, PT Trimitra mendapat belasan paket pengadaan dengan total anggaran sebesar Rp427 miliar. “Mastindo menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan sampai 1 juta PCR reagen merek Sansure dalam waktu 10 hari,” kata Doni.

**Tim Jaring.id: Abdus Somad (penulis), Damar Fery Ardiyan (penyunting)
Kholikul Alim (infografis).**

Sumber: <https://jaring.id/peti-pendingin-reagen-retur/>.

DONI MONARDO: PANDEMI COVID-19 BUKAN SITUASI YANG NORMAL

Alinea.id edisi 15 Maret 2021.

Proses pengadaan alat tes Covid-19 sepanjang 2020 potensial merugikan negara hingga Rp170 miliar.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo membantah dugaan BNPB memberikan kemudahan bagi perusahaan tertentu mengimpor *kit* reagen dan media transfer virus untuk tes Covid-19 di Indonesia. Menurut Doni, semua proses pengadaan alat uji tes Covid-19 sudah sesuai prosedur.

"Proses pengadaan di BNPB terbuka untuk umum. Setiap penyedia yang memiliki produk sesuai spesifikasi kebutuhan dan memenuhi persyaratan sebagai penyedia dapat ditunjuk sebagai penyedia," kata Doni dalam keterangan tertulis yang diterima Klub Jurnalis Investigasi (KJI) di Jakarta, belum lama ini.

Sepanjang April-September 2020, sudah ada 1.956.664 unit *Polymerase Chain Reaction* (PCR), *Ribonucleic Acid* (RNA), dan *Viral Transport Medium* (VTM) yang diimpor perusahaan untuk kebutuhan tes Covid-19 di Indonesia. Nilai total pengadaan *kit* dan reagen mencapai Rp549 miliar.

Ada tujuh perusahaan yang ditunjuk sebagai pengimpor *kit* dan media transfer virus itu, yakni PT Mastindo Mulia, PT Sinergi Indomitra Pratama, PT Trimitra Wisesa Abadi, PT Bumi Resource Nusantara, PT Makmur Berkah Sehat, PT Next Level Medical, dan PT Harsen Laboratories.

PT Trimitra Wisesa Abadi dimiliki Budiyanto A. Gani. Sepanjang 2020, menurut catatan *Tempo*, nilai proyek pengadaan PT Trimitra Wisesa Abadi di BNPB diperkirakan mencapai Rp427 miliar. Budiyanto punya restoran padang di kawasan Jakarta Selatan yang dikelola bersama adik sepupu Doni, Inna Rossaria. Kepada tim KJI, Budi juga tak membantah soal kedekatannya dengan Doni.

Meski begitu, Doni menegaskan tidak ada yang salah dalam proses pengadaan. "Dari informasi yang kami peroleh, PT Trimitra Wisesa Abadi merupakan salah satu penyedia Almatkes (alat material kesehatan) dalam penanganan Covid-19," kata dia.

Dari hasil audit terhadap proyek tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan empat persoalan dalam proses pengadaan. *Pertama*, pengadaan tidak berbasis survei kebutuhan dan ketersediaan sumber daya rumah sakit dan laboratorium penerima bantuan. *Kedua*, penunjukan perusahaan tidak berbasis pengalaman. *Ketiga*, tidak ada pengecekan barang secara teliti saat serah terima sehingga sebagian alat sudah mendekati masa kedaluwarsa. *Terakhir*, belum ada uji coba terhadap *kit* yang diimpor.

Hasil analisis *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengindikasikan potensi kerugian negara senilai Rp170 miliar. Proyek tersebut dianggap merugikan negara terutama karena hampir 500 ribu unit alat reagen PCR, RNA, dan VTM dikembalikan puluhan rumah sakit dan laboratorium lantaran tidak bisa digunakan atau hasilnya tidak akurat.

Berikut isi jawaban tertulis Kepala BNPB Doni Monardo kepada tim KJI:

Berdasarkan dokumen yang kami peroleh, terdapat 498.644 PCR dan RNA yang dikembalikan oleh 78 laboratorium di 29 provinsi pada Mei-September 2020. Alasannya beragam, mulai dari peralatan deteksi Covid-19 yang tak akurat, tak sesuai dengan laboratorium, hingga mendekati masa kedaluwarsa. Mengapa hal tersebut bisa terjadi?

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Gugus Tugas Penanganan Covid-19 telah merespons rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP) terkait informasi adanya sejumlah 473.984 tes reagen RNA merek Sansure yang tidak dapat digunakan di beberapa laboratorium dengan melakukan penarikan (*recall*) seluruh produk RNA *kit* merek Sansure dan mengganti dengan produk sejenis, tetapi menggunakan merek berbeda. Selain itu, seluruh biaya kegiatan penarikan produk ditanggung oleh pihak penyedia.

Pengadaan reagen PCR, reagen *kit* merek Sansure dilakukan oleh PT Mastindo Mulia sebanyak 499.200 tes pada April 2020. Selain dari pengadaan, BNPB juga menerima donasi PCR reagen *kit* merek Sansure dari PT Mastindo Mulia sebanyak 50.000 tes pada awal terjadinya pandemi Covid-19.

Berdasarkan kajian dari tenaga ahli Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, produk Sansure telah mendapatkan sertifikasi CE dan FDA *approval* serta menjadi

salah satu produk yang direkomendasikan oleh WHO. Dari hasil penelitian dan pengamatan BNPB bersama tim pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19, diketahui bahwa produk RNA *kit* merek Sansure dapat digunakan oleh laboratorium yang memiliki dokter spesialis patologi klinik.

Sampai dengan Januari 2021, terdapat 27 laboratorium yang tidak bisa memanfaatkan 165.542 tes RNA merek Sansure. Langkah selanjutnya BNPB melakukan proses redistribusi ke laboratorium yang mampu memanfaatkan dan mengoperasikan produk tersebut. Terkait masa kedaluwarsa yang pendek, produk RNA *kit* merek Sansure yang diperoleh dari hasil pengadaan oleh PT Mastindo Mulia masa kedaluwarsanya hingga bulan April tahun 2022.

Produk merek Sansure yang paling banyak dikembalikan rumah sakit dan laboratorium. Apa alasan BNPB memilih produk itu?

Proses pengadaan produk RNA *kit* merek Sansure oleh PT Mastindo Mulia dilakukan pada periode awal terjadinya pandemi Covid-19, yaitu bulan April tahun 2020, di mana terjadi bukan hanya kenaikan harga, tetapi juga kelangkaan alat material kesehatan (Almatkes) di pasar karena diberlakukannya kebijakan *lockdown* di berbagai negara dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Indonesia. Di sisi lain, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersama BNPB beserta kementerian atau lembaga lainnya diperintahkan presiden untuk memenuhi target pemeriksaan berbasis PCR sejumlah 10.000 tes per hari. Tentunya ini memerlukan banyak penggunaan reagen PCR, RNA, dan VTM dalam waktu yang cepat dan dalam kondisi yang tidak normal.

Pengadaan PCR reagen merek Sansure merujuk sejumlah hal. *Pertama*, pada tanggal 20 April 2020, Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan (Penanganan Covid-19) menerima penawaran dari PT Mastindo Mulia yang menyatakan kesanggupan untuk menyediakan sampai dengan 1 juta PCR reagen merek Sansure dalam waktu 10 hari.

Selanjutnya, berdasarkan kajian dari tenaga ahli Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, diketahui bahwa produk Sansure telah mendapatkan sertifikasi CE dan FDA *Approval* serta menjadi salah satu produk yang telah direkomendasikan oleh WHO. Pemilihan atau penunjukkan PT Mastindo Mulia dilakukan karena PT Mastindo Mulia yang mampu menyediakan produk PCR reagen secara lengkap dalam jumlah banyak dalam waktu cepat.

Seluruh proses pengadaan dalam kondisi darurat bencana di BNPB, pejabat pembuat komitmen (PPK) didampingi oleh perwakilan LKPP dan merujuk pada Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah serta Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020. Selain pendampingan dari LKPP, dilakukan juga *post audit* oleh aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) atas penilaian kewajaran harga di mana pelunasan pembayaran kepada penyedia dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari APIP.

Merujuk pada Pasal 6 ayat 1 Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang PBJ dalam Penanganan Keadaan Darurat, pengadaan darurat meliputi tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian pembayaran. Bagaimana BNPB mengidentifikasi kebutuhan rumah sakit dan laboratorium sebelum proses pengadaan?

Dalam struktur organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, terlibat berbagai unsur mulai dari kementerian atau lembaga, TNI dan Polri, unsur aparat penegak hukum lainnya, yakni BPK, BPKP, KPK, dan Kejaksaan Agung, serta akademisi dan kalangan profesional. Terkait proses pengadaan produk reagen PCR, BNPB bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berkoordinasi dalam hal proses perencanaan kebutuhan dan proses distribusi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan yang memiliki wewenang dalam pengelolaan laboratorium kesehatan di seluruh Indonesia.

Berdasarkan dokumen pengadaan, sejumlah perusahaan penyedia bukan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang medis atau kesehatan. Padahal, menurut peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 dan surat edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengadaan Darurat, perusahaan penyedia barang disyaratkan memiliki pengalaman atau sedang melaksanakan proyek pengadaan sejenis. Bagaimana tanggapan Anda terkait ini?

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, maka pandemi Covid-19 bukan situasi yang normal, khususnya pada periode awal pandemi antara Maret sampai dengan April 2020 di mana banyak negara yang membutuhkan reagen PCR untuk pemeriksaan Covid-19 sehingga menyebabkan kelangkaan reagen PCR. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga di seluruh dunia.

Menindaklanjuti instruksi Presiden RI dalam rapat kabinet terbatas pada tanggal 13 April 2020, Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk segera melakukan tindakan dan upaya maksimal guna pemenuhan kebutuhan terkait Almatkes untuk menekan penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Dengan keterbatasan kondisi di atas, pertimbangan terpenting dalam

pemilihan penyedia adalah penyedia yang pada saat kondisi darurat Covid-19 memiliki sumber daya dan mampu melaksanakan pekerjaan dalam waktu cepat dengan jumlah barang yang banyak sesuai kebutuhan.

Berdasarkan dokumen kontrak, tidak terdapat poin yang menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan pengadaan barang harus bertanggung jawab jika barang tersebut tidak bisa digunakan. Mengapa hal tersebut tidak diatur dalam kontrak? Bagaimana mekanisme dan nasib barang-barang yang dikembalikan ke BNPB tersebut?

Dalam penyusunan surat pesanan, PPK didampingi oleh perwakilan LKPP yang ditugaskan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Surat pesanan tersebut merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Pada saat ditemukan terdapat beberapa laboratorium yang tidak bisa menggunakan RNA merek Sansure, pihak penyedia PT Mastindo Mulia ikut bertanggung jawab dalam pembiayaan, baik proses penarikan produk dari laboratorium yang tidak bisa menggunakan RNA Sansure maupun proses redistribusi kepada laboratorium yang mampu menggunakan RNA Sansure tersebut.

Kami mendapatkan informasi bahwa dalam proses pengadaan PCR/RNA belum terdapat uji coba atas kualitas produk. Tanggapan Anda?

Pengadaan reagen (PCR, RNA, dan VTM) oleh PT Mastindo Mulia dengan merek Sansure dilakukan pada awal pandemi bulan April 2020 dimana terjadi kelangkaan Almatkes, khususnya reagen PCR yang menjadi *high demand* di berbagai negara yang terdampak Covid-19. Keputusan pengadaan reagen merek Sansure tersebut didasari atas rekomendasi tim pakar yang telah mempertimbangkan adanya sertifikasi CE dan FDA *approval* serta produk reagen merek Sansure tersebut telah direkomendasikan WHO pada 25 Maret 2020. Di dalam negeri, ketika itu belum ada lembaga yang melakukan uji validasi untuk PCR reagen *kit*.

Bagaimana mekanisme dan nasib barang-barang yang dikembalikan ke BNPB tersebut?

Pada saat ditemukan terdapat beberapa laboratorium yang tidak bisa menggunakan RNA Merek Sansure, PT Mastindo Mulia ikut bertanggung jawab dalam pembiayaan baik proses penarikan produk dari laboratorium yang tidak bisa menggunakan RNA Sansure maupun proses redistribusi kepada laboratorium yang mampu menggunakan RNA Sansure tersebut.

Kami mendapat informasi bahwa perusahaan yang mendapat proyek pengadaan barang diminta untuk menyertakan 10 persen dari nilai proyek ke pejabat BNPB. Apakah Anda mengetahui hal tersebut?

Kami pastikan bahwa informasi tersebut tidak benar.

Anda dikenal dekat dengan pengusaha-pengusaha yang ikut terlibat dalam pengadaan tersebut, antara lain Budiyanto A. Gani, pemilik PT Trimitra Wisesa Abadi. Tangapan Anda?

Proses pengadaan di BNPB terbuka untuk umum. Setiap penyedia yang memiliki produk sesuai spesifikasi kebutuhan dan memenuhi persyaratan sebagai penyedia dapat ditunjuk sebagai penyedia. Dari informasi yang kami peroleh, PT Trimitra Wisesa Abadi merupakan salah satu penyedia Almatkes dalam penanganan Covid-19.

Kami juga mendapat informasi bahwa keluarga Anda pernah ikut terlibat dalam proses pengadaan alat kesehatan di BNPB. Apakah Anda mengetahui hal ini?

Kami pastikan bahwa informasi tersebut tidak benar.

Penulis: Achmad Al Fiqri.

Sumber: <https://www.alinea.id/nasional/doni-monardo-pandemi-covid-19-bukan-situasi-yang-normal-b2czD91HZ>

SEGUDANG PROBLEM DI BALIK RETUR RATUSAN RIBU UNIT REAGEN COVID-19

Alinea.id edisi 15 Maret 2021.



Periode Juli-September 2020, sejumlah rumah sakit dan laboratorium mengembalikan alat reagen Covid-19 ke BNPB.

Beberapa waktu lalu, Ketua Tim Layanan Pemeriksaan Molekuler Covid-19 Laboratorium Terpadu Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Erike Angraini resah dengan alat deteksi atau reagen *Polymerase Chain Reaction* (PCR) virus corona penyebab Covid-19 yang dikirim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Reagen PCR itu, menurutnya, saat digunakan ke beberapa sampel pasien, hasilnya kurang baik.

Akhirnya, pada Agustus 2020 sebanyak 1.200 reagen PCR merek Sansure Biotech diretur ke BNPB. Ia pun mengakui, reagen merek Sansure itu kurang cocok dengan mesin yang dimiliki Laboratorium Terpadu UIN.

“Karena kan tiap reagen itu punya kekhasan dan kecocokan terhadap mesin sendiri-sendiri,” ujar dia saat wawancara virtual dengan tim Klub Jurnalis Investigasi (KJI) pada Rabu, 17 Februari 2021.

Erike mengatakan, pihak BNPB tak pernah memastikan kecocokan mesin PCR yang ada di Laboratorium Terpadu UIN. Meski katanya, ada orang dari BNPB yang pernah berkunjung ketika laboratorium itu ditunjuk menjadi tempat pemeriksaan sampel Covid-19. “Tetapi apakah saat itu mengecek alat? Saya kurang tahu,” tutur dia.

Nasib serupa menimpa Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Papua, Antonius Oktavian. Rasa cemas dan khawatir campur aduk lantaran hasil 94 sampel yang diuji coba pakai reagen *Ribonucleat Acid* (RNA) merek Sansure keliru. “Jadi, (reagen) dia *negative false*-nya tinggi. Kalau kita banding-bandingkan ini positif, tetapi begitu kita pakai (reagen) itu negatif,” kata Antonius saat wawancara virtual pada Rabu, 23 Desember 2020.

Kecemasannya bertumpuk, takut ada salah satu sampel itu berasal dari pasien berstatus *cito*. *Cito* adalah istilah lain dari *immediately*, di mana pasien harus menerima hasil laboratorium segera, demi dilakukan tindakan medis lanjutan.

Antonius kemudian langsung mengembalikan sebanyak 12.997 reagen RNA merek Sansure itu ke BNPB pada 21 Agustus 2020, dengan alasan alat uji sampel itu tak punya sensitivitas tinggi.

Rupanya, masalah ini tak hanya dialami laboratorium tempat uji sampel virus corona. Rumah sakit yang ditunjuk melakukan tes sampel pun mengalaminya. Pihak Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) Surabaya misalnya, mengembalikan sebanyak 1.850 reagen PCR merek Liferiver ke BNPB pada September 2020. Menurut Kepala Humas Rumah Sakit Universitas Airlangga, Brihastama Sawitri, reagen PCR yang dihibahkan BNPB itu ternyata mendekati masa kedaluwarsa, yang jatuh pada 19 Oktober 2020.

Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta pun dilaporkan pernah meretur perangkat uji sampel Covid-19 merek Wizprep. Dalam surat F0.03.04/VIII.1/1640/2020 tertanggal 8 September 2020, RSCM menyebut, ribuan *kit* reagen itu tak bisa dipakai.

Kepala Laboratorium Patologi Klinik RSCM, Nuri Dyah Indrasari menerangkan, pengembalian itu dilakukan karena reagen merek Wizprep dalam proses

pemeriksaan, memakan waktu lama dan butuh perangkat pendukung yang lebih banyak. "Step-nya itu bisa sampai 12, sehingga membutuhkan pipet dan sebagainya itu cukup banyak. Dikerjakannya cukup lama dengan ekstraksi. Total bisa lima jam setengah," kata Nuri saat dihubungi, Kamis, 4 Maret 2021.

Nuri menjelaskan, pihaknya hanya mengambil 500 dari 10.000 reagen ekstraksi merek Wizprep. Kendati sudah mengajukan retur sejak September 2020, hingga kini belum ada petugas dari BNPB yang mengambil alat itu di gudang RSCM.

Keadaan Darurat

Boks dan kotak besi bertumpuk di sebuah peti kemas salah satu sudut kompleks pergudangan milik perusahaan jasa logistik terintegrasi PT Bhandha Ghara Reksa, Jakarta Utara. Berdasarkan penelusuran tim KJI, boks dan kotak besi itu berisi paket alat uji sampel Covid-19 hibah BNPB yang diretur beberapa rumah sakit dan laboratorium dari berbagai daerah.

Merujuk kajian *Indonesia Corruption Watch* (ICW), sebanyak 498.644 reagen diretur 78 rumah sakit dan laboratorium dari 29 provinsi, pada Juli hingga September 2020. Ada enam merek reagen yang diretur, yakni Intron sebanyak 1.000 unit, Wizprep 10.000 unit, Seegene 300 unit, Liferiver 2.825 unit, Kogene 700 unit, dan Sansure 482.819 unit.

"Potensi kerugian pengembalian barang ini sebesar Rp169,1 miliar. Paling besar jenis barang reagen RNA, 99 persen yang dikembalikan," kata peneliti ICW, Wana Alamsyah ditemui di kantornya di Jakarta, Jumat, 12 Maret 2021.

Menanggapi problem ini, Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan, PT Mastindo Mulia ikut bertanggung jawab. Ia menerangkan, perusahaan palugada itu punya kewajiban mendistribusikan dan menarik reagen, jika ada permintaan dari rumah sakit atau laboratorium.

Menurut dia, hal itu tertera di dalam klausul pemesanan pejabat pembuat komitmen, didampingi perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang ditugaskan Satgas Penanganan Covid-19 dengan PT Mastindo Mulia. "Pada saat ditemukan beberapa laboratorium yang tidak bisa menggunakan RNA merek Sansure, pihak penyedia PT Mastindo Mulia ikut bertanggung jawab dalam pembiayaan, baik proses penarikan produk maupun redistribusi," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis, 11 Maret 2021.

Doni menuturkan, pengadaan barang itu dilakukan di tengah kondisi serba sulit, ketika negara-negara di seluruh dunia berebut perangkat uji sampel Covid-19. Ia menjelaskan, upaya pengadaan itu merujuk pada instruksi Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas pada 13 April 2020.

“Dengan kondisi itu, pertimbangan terpenting dalam pemilihan penyedia adalah yang pada saat kondisi darurat Covid-19 memiliki sumber daya dan mampu melaksanakan pekerjaan dalam waktu cepat, dengan jumlah barang yang banyak,” kata dia.

Enam merek reagen RNA dan PCR itu dipasok tujuh perusahaan, yakni PT Mastindo Mulia, PT Sinergi Indomitra Pratama, PT Bumi Resource Nusantara, PT Makmur Berkah Sehat, PT Harsen Laboratories, PT Trimitra Wisesa Abadi, dan PT Next Level Medical.

Dari penelusuran KJI melalui dokumen administrasi hukum umum (AHU), ditemukan ada beberapa perusahaan yang diduga kurang kompeten dalam pengadaan barang medis. Salah satunya PT Mastindo Mulia. Perusahaan ini tercatat bergerak di sektor jasa keuangan, asuransi, dan *real estate*. PT Mastindo Mulia baru mengajukan usaha di sektor perdagangan besar alat laboratorium, farmasi, dan kedokteran pada perubahan akta tertanggal 31 Maret 2020.

ICW mengidentifikasi, penyedia pengadaan reagen merek Sansure adalah PT Mastindo Mulia. Perusahaan ini mendapat satu paket proyek pengadaan alat uji sampel Covid-19 berjumlah 500.000 unit, dengan nilai mencapai Rp172,5 miliar. Presiden Direktur Barito Pacific Group - yang merupakan induk PT Mastindo Mulia - Agus Salim Pangestu menjelaskan, penyediaan alat kesehatan di BNPB dilakukan untuk membantu pemerintah menangani pandemi. “Dengan studi kelayakan dan restu dari BNPB,” ujar Agus Salim melalui pesan singkat, Kamis, 11 Maret 2021.

Lalu, ada PT Trimitra Wasesa Abadi, yang tercatat sebagai perusahaan bidang konstruksi, transportasi, pertanian, dan pengelolaan air. Pada 22 Maret 2020, perusahaan ini menambah jaring usahanya di bidang medis. Direktur PT Trimitra Wisesa Abadi, Budiyanto Abdul Gani menilai, bisnis penyedia perangkat uji sampel merupakan peluang pada masa pagebluk. “Semua pengusaha sekarang ini, mau bergerak di bidang apapun juga, ini masalah naluri bisnis saja. Mau bertahan atau mati,” kata Budiyanto saat berbincang di Jakarta Selatan, Rabu, 10 Maret 2021.

Menurut Budiyanto, pengusaha yang kompeten di bidang penyedia alat medis, tak bisa mengikuti ritme pengadaan di BNPB saat masa darurat kesehatan. “Karena

pemain alat kesehatan lama itu, terbiasa main dengan sangat terproteksi. Enggak terbiasa dengan model BNPB yang begini,” tuturnya.

Rekomendasi untuk BNPB

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ikut mengendus adanya permasalahan dalam pengadaan paket reagen di BNPB. Hal itu diketahui dari adanya atensi kedua atas hasil audit tujuan tertentu atas tata kelola proses pengadaan barang/jasa terkait percepatan penanganan Covid-19, yang tercantum dalam surat nomor SR-472/D2/01/2020.

“Berdasarkan identifikasi surat, surat tersebut dari BPKP,” kata Kepala Biro Hukum dan Komunikasi BPKP, Eri Satriana, membenarkan surat atensi tersebut, saat ditemui di kantornya di Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021.

Setidaknya, ada dua masalah yang digarisbawahi BPKP dalam surat yang dilayangkan pada 4 Agustus 2020 itu. *Pertama*, dalam proses pengadaan reagen PCR, belum ada uji coba atas kualitas produk dari semua merek. *Kedua*, terdapat perubahan kebijakan distribusi reagen PCR oleh gugus tugas di daerah, tetapi tidak dikoordinasikan dengan gugus tugas pusat. Kondisi ini diperparah dengan sistem administrasi yang buruk. Akibatnya, sulit melakukan kontrol stok reagen PCR yang sudah dikirim BNPB.

Dari temuan tersebut, BPKP menyarankan empat hal kepada Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB. *Pertama*, melakukan identifikasi dan analisa stok PCR, RNA, dan *Viral Transport Medium* (VTM) hasil pengadaan BNPB yang tak terpakai. *Kedua*, menyusun tata cara pengembalian barang dari daerah-daerah yang tak tersedia *dry ice*. *Ketiga*, menarik seluruh reagen RNA dan VTM merek Sansure yang tak bisa digunakan dan mendistribusikan ulang pada Oktober 2020. *Keempat*, mendorong gugus tugas di daerah agar melengkapi dokumen BAST distribusi reagen PCR dan berkoordinasi dengan gugus tugas pusat dalam melakukan perubahan kebijakan distribusi barang.

Di samping itu, BPKP menyebut ada potensi pemborosan uang negara sebesar Rp39,2 miliar. Temuan itu berdasarkan hasil audit lima merek, yakni Sansure, Liferiver, Addbio, Zeesan, dan Kogene.

Di sisi lain, ICW menilai, retur alat uji sampel Covid-19 disebabkan kekeliruan proses pengadaan yang dilakukan BNPB. Dalam aturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018

Tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat disebutkan, kuasa pengguna anggaran menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.

Menurut Wana, absennya identifikasi kebutuhan dari kuasa pengguna anggaran akan berimbas pada kesalahan dalam melakukan identifikasi kebutuhan. "Pengguna anggaran di BNPB dijabat oleh Kepala BNPB. Sedangkan kuasa pengguna anggaran dijabat Sekretaris Utama BNPB," ucap Wana Alamsyah.

"Dengan melihat tanggung jawab yang diemban masing-masing pihak, patut diduga PAKPA (pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran) tidak menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki."

Redaksi Alinea.id

Sumber: <https://www.alinea.id/nasional/cerita-di-balik-retur-ratusan-ribu-unit-reagen-covid-19-b2czE91lh>.



RETUR REAGEN COVID-19

Alinea.id edisi 15 Maret 2021.

Ada enam merek alat deteksi sampel Covid-19 atau reagen yang dikembalikan ke BNPB.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Papua, Antonius Oktavian cemas dan khawatir campur aduk lantaran hasil 94 sampel yang diuji coba menggunakan reagen *Ribonucleat Acid* (RNA) merek Sansure keliru. "Jadi, (reagen) dia *negative false*-nya tinggi. Kalau kita banding-bandingkan ini positif, tetapi begitu kita pakai (reagen) itu negatif," kata Antonius saat wawancara virtual, Rabu, 23 Desember 2020.

Kecemasannya bertumpuk, takut ada salah satu sampel itu berasal dari pasien berstatus *cito*. *Cito* adalah istilah lain dari *immediately*, di mana pasien harus menerima hasil laboratorium segera, demi dilakukan tindakan medis lanjutan.

RETUR ALAT DETEKSI COVID-19

Ada 78 laboratorium dan rumah sakit di 29 provinsi yang mengembalikan reagen *polymerase chain reaction* (PCR), *ribonucleic acid* (RNA), maupun *viral transport medium* (VTM).

Dari Juli-September 2020, sebanyak **498.644** alat deteksi Covid-19 dikembalikan ke BNPB.

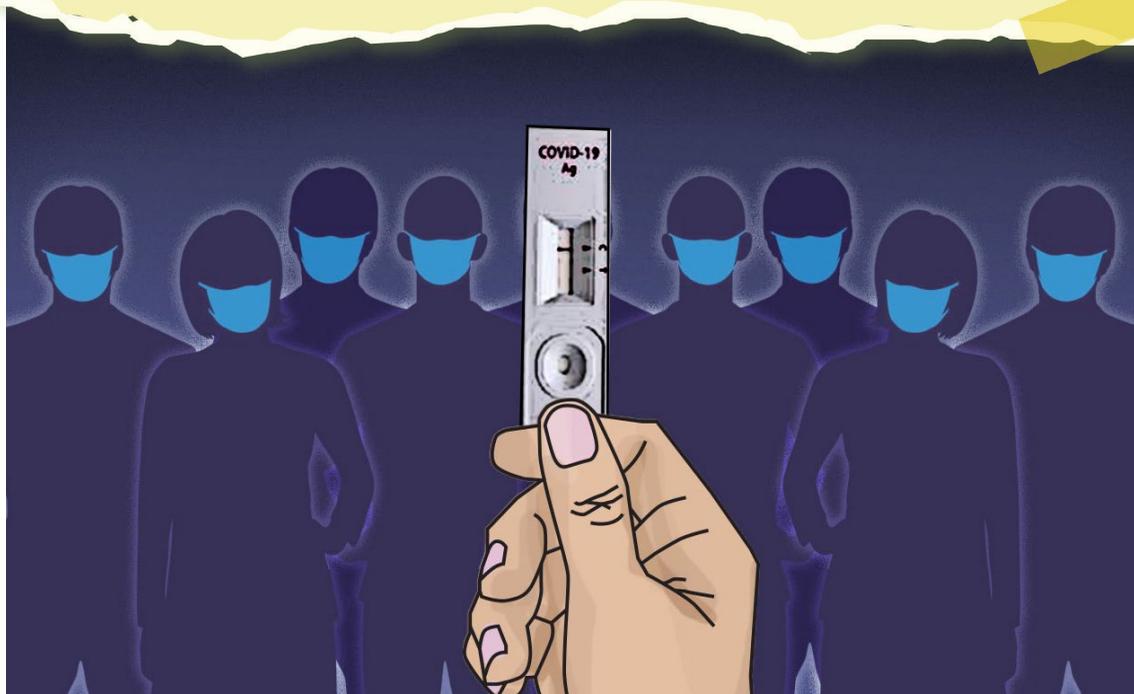


MEREK ALAT DETEKSI COVID-19 YANG DIKEMBALIKAN

- Intron: **1.000** unit,
- Wizprep: **10.000** unit,
- Seegene: **300** unit,
- Liferiver: **2.825** unit,
- Kogene: **700** unit,
- Sansure: **483.819** unit.

KONCO DONI MONARDO DI PROYEK PENANGANAN COVID-19 BNPB

Alinea.id edisi 15 Maret 2021.



Perusahaan milik orang dekat Doni Monardo diduga memonopoli proyek pengadaan alat tes usap Covid-19 di BNPB pada 2020.

Dua puluh hari setelah kasus Covid-19 pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020, PT Trimitra Wasesa Abadi menambahkan satu lagi jaring usahanya di dokumen administrasi hukum umum (AHU) yang terdaftar di Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).

Selain bergerak di bidang konstruksi, transportasi, pertanian, dan pengelolaan air, perusahaan yang dimiliki pengusaha Budiyanto A. Gani itu kini juga bergerak bidang medis. Pada dokumen AHU, ada pula nama Harmonisah sebagai komisaris dan Sutjiarto Abdul Gani sebagai direktur di Trimitra.

Tak lama setelah penambahan lini bisnis itu, Trimitra sukses mengantongi proyek pengadaan alat tes Covid-19 dan media transfer virus dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ditemui di restoran Sari Ratu Kitchen, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Maret lalu, Budiyanto mengonfirmasi keterlibatan perusahaannya dalam proyek-proyek di BNPB selama pandemi. Menurut Budi, ia didorong naluri bisnis saat memutuskan merambah ke dunia medis. "Mau bertahan atau mati?" kata Budi, sapaan akrab Budiyanto, kepada tim dari Klub Jurnalis Investigasi (KJI). Saat itu, tim KJI beranggotakan *Alinea.id*, *Tempo*, *Suara.com*, dan *Jaring.id*

Selain berstatus sebagai Direktur Utama Trimitra, Budi juga pemilik Sari Ratu Kitchen. Restoran itu didirikan Budi bersama Inna Rossaria, adik sepupu Kepala BNPB Doni Monardo. Dalam salah satu unggahan di Instagram @Sariratukitchen pada 2 Juli 2018, Doni terpotret berada satu *frame* dengan Budi.

Budi membenarkan Doni sempat berkunjung ke Sari Ratu Kitchen saat baru diresmikan pada 2018. Ketika itu, Doni baru saja menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Watannas) setelah sebelumnya bertugas sebagai Pangdam Siliwangi.

Budi juga tak membantah keakrabannya dengan Doni. Ia mengaku dikenalkan Inna pada 2014. Namun, ia menegaskan kedekatannya dengan Doni tidak ada sangkut pautnya dengan keterlibatan Trimitra dalam proyek-proyek BNPB selama pandemi. "Semua (urusan pengadaan) di deputi logistik (BNPB). Adik kandungnya saja tidak dibantu. Apalagi saya. Semua yang kenal Pak Doni pasti mengerti karakter beliau sejak jadi Pangdam," tutur Budi.

Selain Trimitra, menurut kajian *Indonesia Corruption Watch* (ICW), ada enam perusahaan lainnya yang telah meneken kontrak pesanan perangkat uji usap dengan BNPB, yakni PT Bumi Resource Nusantara, PT Harsen Laboratories, PT Makmur Berkah Sehat, PT Mastindo Mulia, PT Next Level Medical, dan PT Sinergi Indomitra Pratama. Dari pantauan pada periode Mei-Desember 2020, ICW mencatat Trimitra paling banyak dapat jatah proyek di BNPB. Nilai pengadaan oleh Trimitra ditaksir mencapai Rp427 miliar atau sekitar 49,5 persen dari total pengadaan alat usap Covid-19 sepanjang 2020.

Perusahaan itu tercatat mengadakan delapan merek perangkat uji usap dari negara Tiongkok dan Korea Selatan, yakni Beaver, Cellpro, Citoswab, Intron, Liferiver, Torax, Toyobo, dan Zybio. Berdasarkan surat bertanggal 20 Oktober 2020, lima dari delapan merek yang dipasok Trimitra disinyalir tidak direkomendasikan World Health Organization (WHO). Kelima merek itu ialah Beaver, Cellpro, Citoswab, Torax, dan Zybio.

"Kami pun juga menduga bahwa ada monopoli yang terjadi yang dilakukan oleh pihak swasta dalam konteks pengadaan alat kesehatan, terutama alat kesehatan reagen untuk pendeteksian Covid-19," ujar peneliti ICW, Wana Alamsyah kepada tim KJI di kantor ICW, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Februari 2021.

Selain Trimitra, PT Sinergi Indomitra Pratama juga tercatat menjadi salah satu pemenang proyek terbesar di BNPB. Sinergi mendapat paket pengadaan perangkat uji sampel Covid-19 merek Liferiver sebanyak 525.000 *pieces* senilai Rp196,8 miliar dari BNPB.

Proyek itu diperoleh Sinergi pada 17 April 2020 atau tepat ketika BNPB tengah mengadakan rapat pengadaan reagen PCR. "Itu sudah mengindikasikan bahwa ada satu perusahaan yang melakukan monopoli terhadap pembelian reagen tersebut yang dilakukan atau yang diadakan oleh BNPB," ujar Wana.

Turut Mewakili Sinergi

Berdasarkan dokumen absensi dalam rapat tersebut, nama Budiyanto tercatat sebagai perwakilan PT Sinergi Indomitra Pratama. Budi tak membantahnya. Ia bahkan mengakui hadir dengan atribut PT Sinergi ketika itu.

"Iya, betul saya ikutan di ruangan itu. Tapi, itu bukan PT saya. PT itu yang berhasil mendapatkan *slot* reagen pada saat satu dunia tidak ada barang. Yang punya (PT Sinergi Indomitra Pratama) itu hadir juga di rapat itu," ucapnya.

Menurut Budi, ia mengisi daftar hadir itu lantaran mendapat instruksi dari petugas. "Ya, saya tanda tangan aja. Karena saya datang dengan tim PT Sinergi ya saya tulis dari PT Sinergi juga," ucap dia.

Sebelum rapat tersebut digelar, menurut Budi, ia menghubungi sejumlah penyedia alat kesehatan uji sampel Covid-19 untuk dapat berpartisipasi dalam proyek pengadaan reagen BNPB, termasuk Sinergi. "Pada saat darurat itu, saya hubungi semua kawan-kawan yang bisa dapatkan reagen PCR. Mereka (Sinergi) yang bisa dapatkan," kata pria paruh baya tersebut.

Dalam laman *sinergiindomitrapratama.com*, Sinergi "memperkenalkan diri" sebagai perusahaan yang khusus bergerak di bidang pengembangan dan penyediaan berbagai peralatan dan perlengkapan untuk militer dan polisi. Tidak terdapat informasi jelas mengenai siapa pemilik perusahaan tersebut pada laman itu. Namun,

PARA PENGIMPOR KIT TEST COVID-19

BNPB menunjuk 7 perusahaan untuk pengadaan reagen kit dan media transfer virus Covid-19. Sepanjang April-September 2020, total sudah ada 1.956.664 unit *polymerase chain reaction* (PCR), *ribonucleic acid* (RNA) dan *viral transport medium* (VTM) yang diimport.

**NILAI TOTAL PENGADAAN
RP549 MILIAR**

DISTRIBUTOR

- PT Mastindo Mulia
500.000 PCR Sansure senilai **Rp172,5 miliar**
- PT Sinergi Indomitra Pratama
559.020 PCR Liferiver senilai **Rp199,9 miliar**
- PT Trimitra Wisesa Abadi
 - 441.832 PCR, RNA, VTM Intron senilai **Rp110,4 miliar**
 - 37.300 RNA Liferiver senilai **Rp3,3 miliar**
 - 24.000 VTM Beaver senilai **Rp980 juta**
 - 10.000 PCR Toyobo senilai **Rp2 miliar**
 - 5.000 VTM Cellpro senilai **Rp200 juta**
 - 2.500 VTM Citoswab senilai **Rp100 juta**
- PT Bumi Resource Nusantara
250.000 PCR SD Biosensor senilai **Rp487 miliar**
- PT Makmur Berkah Sehat
100.000 RNA Wizprep senilai **Rp7 miliar**
- PT Next Level Medical
 - 11.520 RNA Alphagen senilai **Rp576 juta**
 - 10.000 PCR Kogene senilai **Rp2,8 miliar**
- PT Harsen Laboratories
4.992 Maccura senilai **Rp399,3 juta**



Sinergi menyatakan Korps Peralatan Angkatan Darat dan Pusat Pembekalan Angkatan Darat sebagai dua klien utama mereka.

Pada dokumen bertajuk "Solusi *Real-Time* PCR Deteksi SARS-Cov-2" yang dilekatkan di situs itu, Sinergi diketahui berdiri pada 2019 dan berkantor di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Produk yang ditawarkan Sinergi dalam dokumen itu ialah *molecular diagnostic* (qPCR dan PCR) serta alat perlindungan diri (APD).

Menurut ICW, proyek pengadaan tak hanya bermasalah karena melibatkan orang dekat Doni saja. Proyek itu juga diduga merugikan negara karena banyak alat uji Covid-19 tak bisa digunakan atau mendekati masa kedaluwarsa, termasuk yang dipasok Trimitra.

Dalam kajiannya, ICW menemukan setidaknya ada 498.644 *pieces* alat kesehatan yang diretur oleh 78 rumah sakit dan laboratorium di 29 provinsi. Potensi kerugiannya diperkirakan mencapai sekitar Rp170 miliar.

Dalam keterangan tertulis yang diterima KJI, Doni membantah ada "permainan" dalam proyek pengadaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR), *Ribonucleic Acid* (RNA) dan *Viral Transport Medium* (VTM) BNPB sepanjang 2020. Menurut dia, proses pengadaan sudah sesuai prosedur.

"Proses pengadaan di BNPB terbuka untuk umum, setiap penyedia yang memiliki produk sesuai spesifikasi kebutuhan dan memenuhi persyaratan sebagai penyedia dapat ditunjuk sebagai penyedia," terang Doni. Tak hanya itu, Doni juga menepis dugaan adanya komisi dalam nilai tertentu yang diberikan perusahaan pemenang proyek kepada pejabat BNPB. "Kami pastikan informasi itu tidak benar," tegas mantan Danjen Kopassus tersebut.

Redaksi Alinea.id.

Sumber: <https://www.alinea.id/nasional/konco-doni-monardo-di-balik-layar-proyek-covid-19-bnpb-b2czE91I3>.



Reagen kit merek Sansure Biotech yang dikembalikan oleh pihak rumah sakit menumpuk di Gudang H BGR Kelapa Gading, Jakarta. Tempo..

KISRUH PENGADAAN ALAT TES COVID-19 DI BNPB

Majalah Tempo edisi 13 Maret 2021.

Potensi kerugian pembelian reagen mencapai Rp170 miliar. Perusahaan kolega Kepala BNPB Doni Monardo mendapat porsi terbesar.

Kegembiraan Antonius Oktavian hanya berlangsung sesaat. Pada pertengahan Agustus 2020, Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua ini menerima 12.997 unit alat deteksi virus corona. Kedatangan reagen itu, bagi Oktavian, seolah-olah pucuk dicita ulam tiba: ia kehabisan reagen sementara jumlah pasien Covid-19 di Papua terus menanjak.

Namun kegembiraannya sirna begitu ia menguji sampelnya ke spesimen positif Covid-19. Reagen Sansure buatan Cina itu malah menginformasikan hasilnya negatif. Bahan kimia itu juga menunjukkan hasil sebaliknya dari spesimen-spesimen yang mengandung virus pneumonia ini. "Kan, ajaib," kata Oktavian.

Daripada ragu dan khawatir salah diagnosis, Oktavian mengembalikan semua alat deteksi itu ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mengirimkannya. Oktavian dan stafnya kebingungan menangani pasien dengan

gejala covid yang membeludak dan keinginan menelusuri penularan dengan menetapkan sebanyak mungkin tes.

Menunggu reagen pengganti akan makan waktu. Maka Provinsi Papua memutuskan membeli sendiri reagen ke Singapura. Mereknya Fortitude karena spesifikasinya cocok dengan alat-alat uji kimia laboratorium dinas kesehatan. "Tapi pengadaan juga butuh waktu," ucap Oktavian. "Kami sempat kehabisan reagen sehingga disorot banyak orang. Kami dianggap tak peduli kondisi Papua."

Di tengah kelimpungan itu, seorang pasien yang diduga terinfeksi virus corona meninggal. Sampel dahaknya belum diuji karena masih menunggu reagen Singapura. Karena takut menularkan virus, pasien itu dikubur dengan protokol covid. Begitu reagen datang dan spesimen pasien itu diuji, ternyata hasilnya negatif. "Keluarga protes dan minta makam dibongkar," ujar Oktavian.

Rupanya, kekisruhan tak hanya terjadi di Jayapura. Dari ratusan dokumen yang diterima *Tempo*, setidaknya ada 78 laboratorium dan rumah sakit di 29 provinsi yang mengembalikan alat deteksi virus ke BNPB. Reagen *Polymerase Chain Reaction (PCR)*, *Ribonucleic Acid (RNA)*, ataupun *Viral Transport Medium (VTM)* tak bisa dipakai.

Sepanjang Juli-September 2020, ada 498.644 peralatan tes virus yang kembali ke BNPB. Dari jumlah tersebut, sebanyak 483.819 unit adalah reagen merek Sansure seperti yang diterima Papua. Sisanya merek Alphagen, Liferiver, Intron, Wizprep, dan Kogene. Dari enam merek ini, hanya dua merek pertama yang direkomendasikan Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam surat edaran mereka pada 20 April 2020.

Tempo mengecek sejumlah rumah sakit yang tercatat mengembalikan reagen. Laboratorium Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, salah satunya. Pengelola laboratorium mengembalikan 12.624 reagen RNA Sansure. "Reagen itu tidak sesuai dengan mesin yang kami punya," tutur Kepala Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran USU, Lia Kesumawati.

Menurut Lia, BNPB tak pernah bertanya spesifikasi mesin laboratorium USU sebelum mengirimkan reagen. Sebab, reagen Sansure, kata Lia, tergolong *close kit* atau harus dipakai dengan pasangannya. Sementara itu, mesin laboratorium USU tak didesain kompatibel dengan Sansure.

Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta juga mengembalikan 9.552 unit Sansure. Menurut Irene, Kepala

BBTKLPP, mereka hanya memakai 48 unit alat deteksi yang ternyata tak berfungsi di mesin laboratorium. “Sisanya kami kembalikan,” ujarnya. Dari Yogyakarta secara keseluruhan tercatat pengembalian reagen sebanyak 26.304 unit.

Dari Jawa Timur, sepuluh rumah sakit dan laboratorium juga mengembalikan reagen ke BNPB sebanyak 49.481 unit pada 3 September 2020. Koordinator Tata Usaha BBTKLPP Jawa Timur, Joko Kasihono beralasan reagen BNPB tidak memenuhi standar. Sementara itu, laboratorium Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya, mengembalikan 1.850 reagen PCR merek Liferiver pada 3 September 2020.

Berdasarkan dokumen surat pengembalian, Kepala Rumah Sakit Universitas Airlangga, Nasronudin mengatakan ia mengembalikan reagen Liferiver karena bahan kimianya mendekati masa kedaluwarsa pada 19 Oktober 2020. “Kami kembalikan supaya bisa segera didistribusikan ke laboratorium lain,” ujarnya saat diminta konfirmasi pada Jumat, 12 Maret lalu.

Dari Provinsi Banten tercatat ada pengembalian 12.952 unit reagen pada 19 dan 26 Agustus 2020. Alasannya, menurut Kepala Laboratorium Terpadu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Erike Anggraini, sama dengan Yogyakarta: tak cocok dengan mesin laboratorium.

Jakarta adalah provinsi yang paling banyak mengembalikan reagen BNPB. Dari 13 rumah sakit, ada 85.168 unit reagen yang dikirim balik atau meminta BNPB mengambilnya kembali. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Laboratorium mengembalikan 4.800 unit karena menilai akurasi rendah. Sebaliknya, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo cocok memakai Sansure.

Masalahnya, dalam pengiriman kedua pada September 2020, BNPB malah mengirim reagen merek Wizprep. RSCM, kata Kepala Laboratorium Patologi Klinik, Nuri Dyah Indrasari, tak memakai Wizprep karena ekstraksinya berbelit-belit sehingga pemeriksaan spesimen makan waktu enam jam dibanding Sansure, yang hanya empat jam. “Jadi kami minta BNPB menarik lagi reagen Wizprep dan menggantinya dengan Sansure,” ucap Nuri.

Tunggu punya tunggu, staf BNPB tak kunjung datang mengambil reagen Wizprep. Menurut Nuri pada Kamis, 4 Maret lalu, reagen tersebut masih menumpuk di gudang RSCM. Sewaktu *Tempo* mengecek gudang BNPB di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dus berisi reagen yang dikembalikan juga terlihat menumpuk. Kata petugas di sana, hingga Maret 2021, masih ada pengembalian reagen.

REAGEN MR RIGEN

Puluhan rumah sakit dan laboratorium di berbagai daerah mengembalikan ratusan ribu bahan uji spesimen Covid-19 sepanjang Juni-September 2020. Reagen kit dan media transfer virus dikembalikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPN) yang menyediakannya karena tidak bisa dipakai. Alasannya macam-macam, dari reagen tidak cocok dengan alat yang mereka punyai, bahannya kedaluwarsa, hingga petugas yang tak paham cara memakainya. Alat-alat tes virus corona itu kini menumpuk di gudang BNPN di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menghitung nilai barang yang dikembalikan ini mencapai hampir 40 miliar.

APRIL-DESEMBER 2020
1.956.664 UNIT

Pengadaan Alat *polymerase chain reaction (PCR)*, *ribonucleic acid (RNA)*, dan *viral transport medium (VTM)*.

ANGGARAN RP871 MILIAR

TAK KOMPATIBEL

Sebanyak 78 rumah sakit di 29 provinsi mengembalikan lebih dari 498.644 unit alat reagen PCR, RNA, dan VTM pada Mei - September 2020. **Kerugian hampir Rp170 miliar.**

- Aceh (2)
- Bali (1)
- Bangka Belitung (1)
- Banten (4)
- Bengkulu (1)
- Yogyakarta (3)
- Jakarta (13)
- Gorontalo (1)
- Jambi (1)
- Jawa Barat (4)
- Jawa Tengah (8)
- Jawa Timur (10)
- Kalimantan Selatan (1)
- Kalimantan Timur (2)
- Kepulauan Riau (1)
- Lampung (1)
- Maluku (1)
- NTB (3)
- NTT (1)
- Papua (1)
- Riau (1)
- Sulawesi Barat (1)
- Sulawesi Selatan (4)
- Sulawesi Tengah (1)
- Sulawesi Tenggara (1)
- Sulawesi Utara (2)
- Sumatra Barat (2)
- Sumatra Selatan (2)
- Sumatra Utara (3)

DISTRIBUTOR

PT Mastindo Mulia
500.000 PCR Sansure* dari Cina
Rp172,5 miliar

PT Sinergi Indomitra Pratama
559.020 PCR Liferiver dari Cina
Rp199,9 miliar

PT Bumi Resource Nusantara
250.000 PCR SD Biosensor
Rp487 miliar

PT Makmur Berkah Sehat
100.000 RNA Wizprep
Rp7 miliar

PT Harsen Laboratories
4.992 Maccura*
Rp399,3 juta

PT Trimitra Wisesa Abadi
441.832 PCR, RNA, VTM Intron* dari Korea Selatan
Rp110,4 miliar

37.300 RNA Liferiver* dari Cina
Rp3,3 miliar

24.000 VTM Beaver
Rp980 juta

10.000 PCR Toyobo
Rp2 miliar

5.000 VTM Cellpro
Rp200 juta

PT Next Level Medical
11.520 RNA Alphasen
Rp576 juta

10.000 PCR Kogene*
Rp2,8 miliar

Kepala BNPB Doni Monardo tak memungkiri ada ratusan ribu reagen yang dikembalikan rumah sakit dan laboratorium. Menurut dia, kekisruhan itu ditemukan tim inspektorat BNPB yang kemudian ditindaklanjuti dengan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap tujuh perusahaan penyedia reagen-reagen tersebut. "Perusahaan pemasok Sansure sudah mengembalikan uang Rp7 miliar," kata Doni.

Menurut Doni, begitu ada laporan pengembalian, perusahaan yang merek reagensya dikirim balik wajib membiayai pengembalian dan mendistribusikan ulang kepada rumah sakit atau laboratorium yang memiliki mesin yang cocok. Ketika dimintai konfirmasi soal reagen Wizprep masih menumpuk di gudang RSCM dan reagen Sansure di Kelapa Gading, Doni hanya mengatakan, "Seharusnya informasinya sampai ke BNPB."

Pemasok reagen Sansure adalah PT Mastindo Mulia, salah satu perusahaan milik taipan Prajogo Pangestu. Menurut Agus Salim Pangestu, anak Prajogo yang mengurus perusahaan itu, ia diminta BNPB menyediakan 500 ribu reagen Sansure setelah menghibahkan 50 ribu reagen sebagai bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Kontrak yang ditandatangani dalam penunjukan 22 April 2020 itu senilai Rp172,5 miliar. Pada hari yang sama, perusahaan itu memasukkan kategori usaha perusahaan sebagai penyalur alat laboratorium dan kesehatan. Aslinya Mastindo adalah perusahaan bidang keuangan, asuransi, dan griya tawang.

Dalam jawaban tertulis, Djoko Suyanto, pengurus Mastindo, mengatakan mereka tidak tahu bahwa Sansure bermasalah dan tak cocok dengan alat-alat laboratorium di hampir semua rumah sakit. "Kami hanya menjalankan penunjukan BNPB," tutur Djoko. "Pemahaman kami, BPNB sudah mengujinya."

Ketika ditanyai soal pengembalian Rp7 miliar sebagai ongkos redistribusi, Djoko juga mengaku tidak tahu. Hingga kini perusahaannya tak pernah mengurus pengembalian atau menerima reagen yang dikembalikan rumah sakit. "Uang Rp7 miliar adalah pengembalian selisih kurs pembelian reagen dan selisih volume PCR *kit*," katanya.

Sengkarut pengadaan reagen ini menjadi temuan BPKP. Dalam surat atensi kedua hasil audit atas tata kelola pengadaan barang di BNPB untuk pengembalian sebelum 4 Agustus 2020 disebutkan bahwa pengadaan PCR *kit* tak melalui uji coba kualitas

terhadap semua produk sehingga tak cocok dengan alat-alat yang ada. Total jumlah reagen yang tidak bisa dipakai menurut perhitungan BPKP mencapai 330.582 unit senilai Rp39,2 miliar.

Menurut Doni Monardo, di awal masa pandemi semua orang kelimpungan. Jumlah pasien covid yang melonjak dan permintaan Presiden Joko Widodo, yang awalnya longgar menangani pandemi menjadi perintah mengetes 10 ribu spesimen sehari, membuat BNPB kewalahan mencari reagen.

Dunia yang sedang dikepung virus juga berebut mendapatkan reagen. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 pada 23 Maret 2020 melapangkan jalan Doni mendapatkan reagen. Aturan di masa darurat itu mengizinkan pengadaan barang tanpa tender alias penunjukan langsung. Doni, yang mengumpulkan para ahli, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga pejabat Kementerian Kesehatan di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang ia pimpin, kemudian menunjuk delapan perusahaan penyedia reagen. PT Mastindo, yang awalnya menghibahkan Sansure, diminta menyediakannya hingga 10 kali lipat.

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Prasinta Dewi menambahkan, basis penunjukan adalah surat edaran WHO dan validasi perusahaan. Jika perusahaan memiliki kategori penyalur alat kesehatan dan bisa menyediakan reagen, validasi akan meloloskannya. "Kalau syarat tak cukup, proses tidak berlanjut," tuturnya. Masalahnya, dari sejumlah merek, ada yang tak direkomendasikan WHO menurut surat edaran 20 April 2020, seperti Intron, Wizprep, Citoswab, dan Cellpro.

Tak hanya mendapati kekisruhan dalam penunjukan langsung, BPKP juga menemukan kebijakan distribusi reagen di daerah tidak dikoordinasikan dengan Gugus Tugas pusat. Akibatnya, distribusi tak disertai administrasi memadai sehingga *monitoring* stok reagen susah terawasi.

Dari konfirmasi perwakilan BPKP, terdapat selisih data distribusi antara BNPB dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan sebanyak 212.537 unit. Dalam surat yang sama, BPKP memberikan sejumlah rekomendasi kepada Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, antara lain mengidentifikasi semua reagen yang tidak bisa digunakan, lalu mendistribusikan ulang ke laboratorium yang bisa memakainya. Agaknya, dengan penumpukan reagen di RSCM dan gudang Kelapa Gading, rekomendasi ini belum dilakukan BNPB.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi BPKP, Eri Satriana tidak banyak berkomentar soal temuan lembaganya. Ia hanya membenarkan isi dokumen surat BPKP ke BNPB tersebut. "Surat itu benar dari BPKP dalam rangka tugas evaluasi yang dimintakan oleh pihak terkait," ujarnya saat ditemui di kantornya pada Selasa, 9 Maret lalu.

Lain BPKP lain *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Lembaga swadaya masyarakat antikorupsi yang menelusuri kisruh pengadaan reagen ini menemukan jumlah reagen yang dikembalikan jauh lebih banyak. Para peneliti ICW menghitung jumlah reagen dari semua surat pengembalian. Menurut temuan mereka, sepanjang April-September 2020, reagen yang dikembalikan mencapai 498 ribu unit senilai Rp169,2 miliar. Distribusi reagen pada periode itu merupakan pengadaan pada akhir April 2020. Pada pengadaan waktu itu, BNPB menganggarkan Rp549 miliar untuk pembelian 1.956.664 unit reagen PCR, RNA, dan VTM berbagai merek.

Selain PT Mastindo Mulia, perusahaan lain yang paling banyak mendapatkan proyek adalah PT Trimitra Wisesa Abadi. Sama seperti Mastindo, pada 22 Maret 2020 perusahaan milik Budiyanto A. Gani ini juga menambahkan kategori penyalur alat kesehatan dalam akta perusahaan. Sebelumnya, mereka bergerak dalam pengadaan mesin dan menjadi pengembang perumahan.

Ketika ditanyai soal penambahan kategori tersebut, Budiyanto mengatakan bahwa itu adalah naluri bisnisnya karena reagen langka dan BNPB sedang membutuhkannya. Menurut dia, ada 80 persen perusahaan yang mengurus perubahan kategori agar bisa ikut menanggung kue darurat Covid-19. Dengan anggaran Rp3,3 triliun, BNPB punya kewenangan menyediakan alat-alat tes Covid untuk menelusuri penularan.

Pada periode pengadaan April-September 2020, Trimitra mendapatkan enam paket pengadaan reagen senilai Rp117 miliar untuk 620.632 unit merek Intron, Beaver, Toyobo, Cellpro, Citoswab, dan Liferiver. Dari enam produk tersebut, hanya Liferiver dan Toyobo yang mendapatkan rekomendasi WHO pada 20 April 2020.

Meski beberapa mereknya bermasalah, PT Trimitra kembali mendapatkan penunjukan kedua pada Oktober-Desember 2020. Paket proyeknya bertambah menjadi 14. Hebatnya lagi, Trimitra satu-satunya perusahaan yang luput dari pemeriksaan BPKP kendati reagen Intron yang dipasoknya dikembalikan rumah sakit.

Jadi total reagen yang dipasok Trimitra mencapai 4.632.136 unit senilai Rp310 miliar. Jika ditotal dari pengadaan pertama dan kedua, nilai proyek Trimitra mencapai Rp427 miliar atau 49,5 persen dari seluruh pengadaan reagen di BNPB sepanjang tahun lalu.

Di kalangan pengusaha dan staf BNPB, Budiyanto A. Gani dikenal sebagai orang dekat Doni Monardo. Budiyanto tak menyangkalnya. "Saya kenal Pak Doni sejak 2014," ucapnya. Karena pertemanan itu, ia kerap didatangi sesama pengusaha agar dibukakan jalan mendapatkan penunjukan alat uji virus corona di BNPB. Namun ia menolaknya.

Soal nilai proyek BNPB paling besar, Budiyanto merendahkan. Menurut dia, nilai besar itu dari sudut pandang orang yang iri saja. Lagi pula, kata dia, penunjukan perusahaannya bukan karena ia berteman dengan Doni. "Perusahaan saya paling siap," ujarnya.

Doni menjelaskan hubungannya dengan Budiyanto, juga anggota keluarganya yang menjalin bisnis dengan Budiyanto, tapi menolak pernyataannya dikutip. "Doni Monardo tak pernah terlibat dalam pengadaan," katanya.

Penulis: Agung Sedayu.

Penyumbang Bahan: Dini Pramita, Erwan Hermawan, Nurhadi (Surabaya), Alyaa Alhadjri dan Hariz Mohamad (Malaysia), Angel Pago (Filipina) dan Tim KJI.

Sumber: <https://majalah.tempo.co/read/investigasi/162767/proyek-tes-covid-19-bnpb>

BAGAIMANA BISA TES COVID-19 NEGATIF TAPI HASILNYA POSITIF

Majalah Tempo edisi 13 Maret 2021.

***Sejumlah merek alat tes Covid-19 bermasalah tak hanya di Indonesia.
Deteksi negatif hasilnya positif.***

Satu bulan sebelum pemerintah Indonesia menunjuk delapan perusahaan mendatangkan alat tes Covid-19 atau virus corona pada April 2020, Wakil Menteri Kesehatan Filipina Maria Rosario Vergeire mengumumkan penarikan alat deteksi merek Sansure. Dalam jumpa pers pada 28 Maret 2020, Vergeire menyatakan alat deteksi buatan perusahaan Tiongkok itu kurang akurat. "Akurasi hanya 40 persen sehingga kami tak memakainya," katanya.

Vergeire mengaku tak menyangka alat itu punya tingkat akurasi rendah karena ada dalam rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan mengantongi lisensi *China Food and Drug Administration*. Dengan dalih itu pula Kedutaan Besar Cina di Manila mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah pernyataan Vergeire.

Setelah muncul sanggahan itu, Vergeire menarik pernyataannya. Masalah baru muncul, Presiden Rodrigo Duterte menduga harga Sansure terlalu mahal. "Harga wajarnya 1,75 juta peso (sekitar Rp518 juta), tapi pemerintah harus mengeluarkan ongkos sebesar 4 juta peso per unit," tuturnya seperti dikutip CNN Philippines.

Dua bulan se usai pengumuman Vergeire, merek yang sama tiba di Indonesia. Distributornya PT Mastindo Mulia, perusahaan batu bara milik taipan Prajogo Pangestu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjuk perusahaan ini mendatangkan 500 ribu unit Sansure senilai Rp172,5 miliar. Karena semua rumah sakit menjerit kekurangan alat deteksi Covid-19, BNPB segera mendistribusikannya.

Salah satu yang menerima adalah Dinas Kesehatan Papua sebanyak 12.997 unit. Tapi, baru menguji sampelnya, laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua mengkonfirmasi apa yang diumumkan Filipina. "*False negative* begitu tinggi," ucap Kepala Balai Antonius Oktavian.

Pembuktian Oktavian dikuatkan Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Oktavian mendapat hasil uji coba Sansure yang menyatakan alat tersebut terlalu sensitif sehingga pembuktian perlu dilakukan berulang kali. Sebanyak 16 unit sampel spesimen gagal mendeteksi virus. "Sehingga sesungguhnya positif terbaca negatif," ujar Oktavian.

Karena ragu, Oktavian mengembalikan alat deteksi itu ke BNPB pada 21 Agustus 2020. Ia memilih memakai alat *Polymerase Chain Reaction* (PCR) merek Biosensor yang diproduksi SD Biosensor asal Korea Selatan karena lebih akurat. Akibatnya, dari 500 ribu barang impor tersebut, sebanyak 473.984 unit dikembalikan, yang menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp24 miliar.

Alat deteksi yang bermasalah bukan hanya Sansure. Dari pengadaan April hingga Desember 2020, sejumlah merek yang tiba di Indonesia, tidak mendapat rekomendasi WHO. Merek tersebut antara lain Alphagen, Beaver, Cellpro, Citoswab, Wizprep, dan Torax.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, sepanjang April-September 2020, sebanyak 78 laboratorium di 29 provinsi mengembalikan 498.644 unit alat tes Covid-19. Nilai pembelian unit sebanyak itu Rp169 miliar. Sansure paling banyak, 483.819 unit, sehingga alat ini hanya terpakai 16.181 unit.

Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan pada Maret-April 2020 terjadi kepanikan karena, dalam keadaan darurat, alat deteksi virus tidak ada. Semua rumah sakit mengajukan permintaan alat deteksi seiring dengan banyaknya pemeriksaan pasien untuk mendeteksi keberadaan virus corona. "Di awal semua bingung," kata Doni. Walhasil, alih-alih mengecek sebelum membeli, pemerintah menerima merek apa saja yang dipasok distributor.

Menurut peneliti ICW, Wana Alamsyah, semestinya, meskipun dalam keadaan darurat, ada uji teknis dan validasi alat deteksi virus sebelum pengumuman pengadaan. Setidaknya laboratorium dan rumah sakit diminta mengirimkan informasi spesifikasi alat PCR yang sesuai dengan alat yang mereka miliki. Sebelum pandemi Covid-19 merebak, alat PCR dipakai untuk mendeteksi virus apa saja dalam darah. "Apalagi beberapa negara sudah mengumumkan penarikan Sansure," tuturnya.

Malaysia menambah panjang daftar negara yang menarik Sansure dari laboratorium dan rumah sakit. Sebelumnya, Direktur Jenderal Kesehatan Malaysia, Noor Hisham

Abdullah menyatakan akan mengganti alat uji yang diimpor dari Cina dengan alat yang didatangkan dari Korea Selatan dan Singapura. “Akurasinya tidak sesuai dengan harapan,” ucapnya. Seorang sumber dari Kementerian Kesehatan Malaysia mengkonfirmasi alat tersebut adalah Sansure.

Milton Lum Siew Wah dari Malaysian Medical Council mengaku skeptis alat-alat deteksi Covid-19 yang datang ke negaranya melalui uji coba. Sebab, dia menjelaskan, standar akurasi minimal yang harus dipertahankan sebuah alat uji berada di angka 80 persen. “Jika hanya 40 persen, kamu akan kehilangan 60 persen,” ujarnya.

Pengujian akurasi Sansure sesungguhnya sudah dimulai pada awal Maret 2020 oleh beberapa universitas. Namun, karena dimuat di jurnal, laporannya baru terbit pada Juli 2020. Misalnya penelitian Bingqi Wang dari *Central South University*, Cina. Ia mempublikasikan hasil penelitian di jurnal *Jerman De Gruyter* dengan menyebutkan tingkat akurasi Sansure untuk mendeteksi N-Gene dalam virus corona hanya 28,31 persen.

Bingqi juga membandingkan Sansure dengan enam *kit* komersial lain, yaitu BGI Biotech, Outdo Biotech, Perkin Elmer, Daan Gene, Jiangsu Bioperfectus, dan Fosun. Menurut dia, hanya Perkin Elmer yang sesuai dengan standar *Chinese Center for Disease Control and Prevention*.



Reagen kit yang menumpuk di Gudang H BGR Kelapa Gading, Jakarta. Tempo.

Penelitian lain dilakukan oleh tim Mengmeng Wang, yang mengomparasi lima *kit* komersial. Salah satunya Liferiver. Ia menyebutkan level deteksi merek ini di bawah Daan Gene dan BioGerm dalam empat kali uji pelarutan alias di bawah 100 persen. Liferiver adalah salah satu *kit* yang masuk ke Indonesia lewat PT Trimitra Wisesa Abadi dan dikembalikan ke BNPB sebanyak 2.825 unit.

Adapun Intron, Wizprep, Liferiver, Kogene juga bermasalah karena beberapa unitnya dikembalikan ke BNPB. Merek-merek itu masuk ke Indonesia lewat Trimitra, PT Makmur Berkah Sehat, dan PT Next Level Medical. Dari merek tersebut, Wizprep tidak mendapat rekomendasi WHO.

Doni mengatakan unit alat deteksi yang dikembalikan didistribusikan ulang ke laboratorium yang cocok. Jika masih berlebih, kelebihannya dikembalikan ke perusahaan pemasok dengan membayarnya kembali. "Perusahaan bertanggung jawab dalam proses penarikan dan redistribusinya," katanya.

Namun, berdasarkan penelusuran, dus-dus unit *kit* merek Sansure terlihat menumpuk di gudang penyimpanan milik BNPB yang berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat dimintai konfirmasi, Kamis, 11 Maret lalu, BNPB tak dapat menunjukkan redistribusi telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Sedangkan PT Mastindo, yang mendatangkan Sansure, menyatakan tak mengetahui informasi tentang banyak negara yang melaporkan penarikan alat tes ini karena tingkat akurasi rendah. "Kami mendatangkan alat ini berdasarkan penunjukan BNPB," ucap Djoko Suyanto, perwakilan sementara manajemen PT Mastindo. "Pemahaman kami, BNPB sudah mengecek dan mengetes alat PCR tersebut." Kami sudah menghubungi Sansure Biotech untuk meminta konfirmasi, namun perusahaan yang berbasis di Hunan, Cina, ini tak merespons.

Penulis: Dini Pramita.

Penyumbang Bahan: Agung Sedayu, Erwan Hermawan, dan Tim KJI.

Sumber: <https://majalah.tempo.co/read/investigasi/162765/alat-tes-covid-19>.

SIAPA BUDIYANTO A. GANI, DISTRIBUTOR ALAT TES COVID-19 TERBESAR DI BNPB

Majalah Tempo edisi 13 Maret 2021.

Budyanto A. Gani menjadi distributor terbesar alat-alat tes Covid-19 di BNPB. Mengklaim bukan karena dekat dengan Doni Monardo.

Di kalangan pemain alat kesehatan selama pandemi Covid-19, nama Budyanto lumayan terkenal. Beberapa pengusaha menyebutnya “orang kepercayaan Doni Monardo”, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Mereka yang percaya acap mendatangnya untuk mendapatkan celah masuk ke pengadaan di lembaga ini.

Dengan anggaran Rp3,3 triliun khusus untuk penanganan pandemi melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, pengadaan alat-alat kesehatan di BNPB lumayan menggiurkan. Di lembaga baru ini, Doni juga menjadi ketua. Hingga Desember 2020, misalnya, nilai belanja alat-alat tes Covid-19 mencapai Rp871 miliar.

Karena anggaran besar itu, banyak pengusaha yang beralih menjadi distributor alat kesehatan. Tak terkecuali Budyanto A. Gani. Ia mengubah bidang usahanya dari penyedia alat mesin dan infrastruktur menjadi penyalur alat kesehatan pada 22 Maret 2020, sembilan hari setelah pemerintah menyatakan keadaan darurat. “Naluri bisnis,” katanya sewaktu ditemui di restoran Sari Ratu Kitchen di Blok M, Jakarta Selatan, pada Rabu, 10 Maret lalu. “Kalau tidak begitu bisa mati.”

Pandemi, ujar Budyanto, memukul semua bisnis. Ia baru saja menutup restoran Sari Ratu di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, yang menjadi zona merah karena merawat pasien Covid-19. Ia banting setir menjadi penyalur alat kesehatan karena proyek pemerintah berfokus pada penanganan pandemi. “Walaupun awalnya sama sekali tidak tahu apa itu reagen, apa itu PCR,” tuturnya menyebutkan metode deteksi virus, *Polymerase Chain Reaction*.



Laman Instagram Sari Ratu Kitchen yang menuliskan kunjungan Letnan Jenderal TNI Doni Monardo pada Juli 2018. Screenshot Instagram @sariratukitchen.

Meski baru menangani alat kesehatan, perusahaan Budi, PT Trimitra Wisesa Abadi, mendapat order mendatangkan alat PCR, reagen, dan media transfer virus yang sangat dibutuhkan Indonesia di awal pandemi. Nilai proyek pertama yang ia dapatkan langsung jumbo: Rp117 miliar untuk mendatangkan alat PCR merek Intron dari Korea Selatan.

Karena penunjukan dengan nilai yang langsung besar itulah para penyalur alat kesehatan acap mendatangi Budiyanto untuk meminta bantuan memperoleh proyek serupa. "Kalau saya bisa, saya bantu," ucapnya. "Tapi saya bukan pejabatnya."

Kabar kedekatannya dengan Doni Monardo bukan isapan jempol. Raut muka Budiyanto semringah ketika hubungannya dengan Doni disinggung. Dengan gamblang ia menceritakan pertemanannya dengan mantan panglima Pasukan Pengamanan Presiden berpangkat letnan jenderal itu.

Syahdan, sebelum mengenal Doni, Budiyanto bermitra dengan Inna Rossaria. Keduanya mendirikan perusahaan jasa perawatan kantor. Namun omzetnya yang hanya Rp10 juta sebulan membuat mereka menutup usaha itu. Hingga pada 2017, keduanya sepakat membesarkan Sari Ratu, restoran Padang yang didirikan Auwines, ayah Inna, pada 1984 dan memiliki cabang di Malaysia dan Singapura.

Ketiganya mendirikan PT Inti Nusa Abadi pada 18 Januari 2018. Di perusahaan yang menaungi Sari Ratu ini, Budiyanto menjadi direktur utama dengan saham 60 persen. Sedangkan Auwines menjadi komisaris dan Inna menjabat direktur dengan saham masing-masing 20 persen. Perkongsian dengan Inna ini yang membawa Budiyanto berkenalan dengan Doni Monardo.

Auwines tak lain paman Doni. Istri Auwines adalah adik ibu Doni. Budi bercerita, ia dibawa Inna berkenalan sewaktu Doni menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat pada 2014. Setelah itu, ia tak pernah bertemu lagi hingga Doni pindah ke Ambon menjadi Panglima Komando Daerah Militer Pattimura.

Di Ambon, pada Juli 2015, Doni membuat program “Emas Biru” dan “Emas Hijau” untuk merangkul perbedaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku. Emas Biru berupa program budi daya ikan laut hias. Sedangkan Emas Hijau adalah program pembibitan tanaman bernilai ekonomi, seperti cengkeh dan pala. “Saya tertarik karena konsep programnya bagus,” kata Budiyanto.

Budiyanto mengaku punya teman yang berhasil mengembangkan ikan nila di lahannya di Puncak, Bogor, Jawa Barat. Kotoran ikan nila diolah menjadi pupuk. Karena itu, pengetahuan mengelola ikan tersebut ia bawa untuk mengikuti program Doni di Ambon.

Doni, sementara itu, berpindah tugas lagi ke Jawa Barat. Terakhir, ia menempati kursi Kepala BNPB. “Sejak jadi Kepala BNPB belum pernah makan di sini lagi,” ujarnya, menunjuk Sari Ratu. Di akun Instagram Sari Ratu Kitchen, foto Budiyanto dan Doni berpose di teras Sari Ratu diunggah pada 22 Juli 2018.

Budiyanto menyangkal kabar bahwa kedekatan dengan Doni yang membuat ia mendapat proyek pengadaan alat tes Covid-19. Ia mengenal Doni sebagai orang yang pernah tak *cawe-cawe* dalam pengadaan di tempat-tempat penugasannya. “Pak Doni tidak pernah mengurus pengadaan, semua diurus deputy logistik,” ucapnya. “Mereka yang kenal Pak Doni pasti tahu karakter beliau. Adik kandung saya saja tidak dibantu, apalagi saya.”

Menurut data penelitian *Indonesia Corruption Watch* (ICW), PT Trimitra mendapat penunjukan dengan jumlah merek tes Covid-19 paling banyak. Hingga Desember 2020, setidaknya Budiyanto mendatangkan enam merek dari Cina dan Korea Selatan. Merek tersebut adalah Beaver, Cellpro, Citoswab, Intron, Liferiver, Torax,



Budiyanto [instagram.com/budiag21](https://www.instagram.com/budiag21).

Toyobo, dan Zybio, dengan nilai pengadaan Rp427 miliar atau 49,5 persen dari total nilai pengadaan.

Dari semua merek itu, hanya Liferiver, Toyobo, dan Intron yang direkomendasikan Badan Kesehatan Dunia (WHO) berdasarkan surat 20 Oktober 2020. "Patut diduga PT Trimitra memonopoli pengadaan di BNPB," tutur Wana Alamsyah, peneliti ICW.

Reagen merek-merek tersebut kemudian bermasalah. ICW menemukan banyak alat tes Covid yang dikembalikan rumah sakit dan laboratorium yang ditunjuk sebagai penelisik virus selama Juni-September 2020. Alasan pengembalian macam-macam: reagen tak cocok dengan alat yang ada, alat PCR memasuki masa kedaluwarsa, atau soal kepraktisan. ICW, misalnya, menemukan pengembalian 1.000 unit Intron dari beberapa laboratorium di seluruh Indonesia.

Anehnya, meski ada pengembalian, PT Trimitra tak masuk daftar perusahaan yang diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada Oktober 2020. Audit BPKP berfokus pada tujuh perusahaan yang memasok reagen tapi dikembalikan karena tak cocok.

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Prasinta Dewi juga menyangkal informasi bahwa Intron adalah salah satu merek reagen dan alat PCR yang bermasalah dan dikembalikan rumah sakit daerah. "Intron tidak ada keluhan atau pengembalian ke kami," katanya.

Ihwal Intron yang tak direkomendasikan WHO, Prasinta menyebutkan PT Trimitra sudah melewati validasi. PT Trimitra, dia menerangkan, adalah salah satu perusahaan yang lolos validasi karena terbukti bergerak di bidang pengadaan alat kesehatan. "Kalau, misalnya, syaratnya tidak memenuhi, tidak akan kami lanjutkan," ujar Prasinta.

Adapun BPKP membenarkan informasi bahwa mereka tak mengaudit Trimitra meski ada merek yang dikembalikan dan tak masuk rekomendasi WHO, yang menjadi syarat pengadaan di BNPB. "BPKP hanya melaksanakan tugas evaluasi yang diminta pihak terkait," ucap Kepala Biro Hukum dan Komunikasi BPKP Eri Satriana.

Ketika disinggung lagi ihwal kedekatannya dengan Doni Monardo, Budiyanto A. Gani mengatakan, "Setiap orang punya orang dekat, yang membuat dia nyaman, dia percaya." Adapun Doni meminta semua keterangan tentang hubungannya dengan Budiyanto tak dikutip. "Saya tidak mengurus pengadaan," katanya.

Penulis: Agung Sedayu.

Penyumbang Bahan: Erwan Hermawan, Riky Ferdianto dan Tim KJI.

Sumber: <https://majalah.tempo.co/read/investigasi/162759/profil-budiyanto-a-gani>.

DI AWAL PANDEMI KAMI BINGUNG

Majalah Tempo edisi 13 Maret 2021.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)/Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menjelaskan bagaimana dia harus mengambil keputusan terbaik dari sederet opsi terburuk termasuk soal pengadaan alat deteksi virus atau reagen. Seperti masker dan alat pelindung diri, reagen untuk mendeteksi virus jadi langka saat pandemi. Situasi darurat ini menjadi alasan pemerintah Indonesia membeli reagen apa saja yang tersedia.

Cara pemerintah, terutama Menteri Kesehatan, menyepelekan virus corona berimbas pada cara negara menghadapi pandemi ketika makhluk renik itu mulai memasuki Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana lalu mengambil alih penanganannya, termasuk pengadaan alat deteksi virus atau reagen.

Seperti masker dan alat pelindung diri, reagen untuk mendeteksi virus langka saat pandemi menyebar ke seluruh dunia pada Maret-April 2020. Semua negara berebut alat-alat kesehatan yang berhubungan dengan pandemi. Situasi darurat ini menjadi alasan pemerintah Indonesia membeli reagen apa saja yang tersedia. Belakangan, pengadaan tanpa tender itu bermasalah.

Pada April-Agustus 2020, lebih dari 300 ribu alat deteksi virus dikembalikan rumah sakit dan laboratorium karena tak bisa dipakai. Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mensinyalir ada kerugian negara akibat pengadaan grasa-grusu ini. "Barangnya kami tarik," kata Kepala BNPB Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Doni Monardo pada Kamis, 11 Maret lalu. Doni ditemani sembilan anak buahnya ketika wawancara berlangsung di kantornya di lantai 10 gedung BNPB, Jakarta.

Berapa banyak alat uji spesimen Covid-19 yang tak berfungsi?

Audit BPKP menemukan 473.984 unit reagen merek Sansure dari Tiongkok yang

tidak bisa dipakai laboratorium. Saya tanya ke mereka, apakah benar barang tidak berguna? Rupanya, hanya beberapa laboratorium yang enggak bisa pakai.

Mengapa?

Mungkin alat laboratorium enggak cocok dengan reagen atau persoalan sumber daya manusia. Laboratorium yang tak cocok alatnya kami tarik, lalu kami distribusikan ke laboratorium yang cocok. Reagen yang tak dikembalikan dimanfaatkan dinas kesehatan daerah masing-masing. Artinya, tidak ada barang yang terbuang sia-sia. Semua biaya penarikan ditanggung perusahaan penyedia.

Dua pekan lalu, kami mengecek gudang BNPB di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Reagen Sansure masih menumpuk...

Prasinta Dewi, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB: Sudah tidak ada. Sudah kosong.

Ada juga yang tak terpakai tapi tak diambil BNPB...

Kalau masih ada, harus segera diinformasikan.

Kenapa memilih merek Sansure?

Kami enggak mengerti. Kami baru tahu setelah ada pemeriksaan BPKP. Kami pikir semua merek sama.

BNPB tak meminta laboratorium mengirim spesifikasi alat mereka untuk mencari reagen yang cocok?

Di awal pandemi, semua masih bingung. Mana sempat bertanya? Tiap hari ada permintaan barang ini dari semua laboratorium.

Sebetulnya tidak hanya karena reagen tidak cocok dengan alat yang ada, banyak yang menjelang kedaluwarsa, seperti alasan Universitas Airlangga...

Prasinta Dewi: Reagen memang enggak tahan lama, paling lama setahun. Laboratorium juga belum tentu langsung memakainya ketika terima.

Bukan karena penyedia teman Anda? Pemilik PT Trimitra Wisesa Abadi terkenal dekat dengan Anda. Atau PT Mastindo Mulia, yang menjual Sansure, milik pengusaha Prajogo Pangestu...

Pengadaan di BNPB terbuka untuk umum. Setiap penyedia yang memiliki produk sesuai dengan spesifikasi bisa ditunjuk sebagai penyedia. Barang yang tidak sesuai kemudian dikembalikan ke pemasoknya. Atau jika harga terlalu mahal akan dikembalikan uangnya. Begitu perjanjiannya.

Egi Massadiah, tenaga ahli BNPB: Mastindo itu awalnya menyumbang, lalu pengadaan. Awalnya menyumbang 50 ribu, lalu pengadaan 500 ribu.

Tetty Saragih, Inspektur Utama BNPB: Tim kami menemukan di daerah reagen Sansure tidak bisa dipakai. Setelah audit, Mastindo mengembalikan uangnya sekitar Rp7 miliar.

PT Trimitra mendatangkan merek apa?

Prasinta Dewi: Intron.

Kami cek merek ini tak direkomendasikan Badan Kesehatan Dunia (WHO)...

Prasinta Dewi: Sudah ada uji validasi, persyaratan ada. Kalau tidak ada di WHO, BPKP akan mengauditnya.

Pemilik PT Trimitra, Budiyanto Gani, punya usaha bersama adik sepupu Anda. Apa benar Anda kenal dekat?

Soal ini sangat sensitif. (Doni menjawab pertanyaan-pertanyaan soal hubungannya dengan Budiyanto tapi menolak ucapannya dikutip). Saya tidak pernah terlibat dalam pengadaan barang dan jasa.

Penulis: Agung Sedayu.

Sumber: <https://majalah.tempo.co/read/investigasi/162724/penjelasan-doni-monardo-soal-keputusan-pengadaan-reagen-yang-belakangan-bermasalah>.

Budiyanto A. Gani saat ditemui
Tempo di kawasan Blok M,
Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021.
Tempo.



BAGAIMANA BUDIYANTO A. GANI MENDAPAT PROYEK ALAT TES COVID-19 DI BNPB

Majalah Tempo edisi 13 Maret 2021.

Budiyanto A. Gani menjelaskan kedekatan dengan Kepala BNPB Doni Monardo sampai ia mendapatkan proyek pengadaan alat tes Covid-19.

Begitu pandemi Covid-19 menghembalang Indonesia pada awal Maret 2020, Budiyanto A. Gani menambah jenis usaha PT Trimitra Wisesa Abadi. Semula perusahaan ini bergerak di bidang pengadaan mesin uap, turbin, pompa, kincir, generator, hingga konstruksi gedung dan griya tawang. Mulai 22 Maret 2020, Trimitra punya usaha baru: perdagangan alat laboratorium, farmasi, dan kesehatan.

Dengan status baru itu, pada 15 April 2020 perusahaan ini mendapat penunjukan langsung dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengimpor jutaan unit alat deteksi virus corona (reagen) dari Cina dan 18 paket pengadaan hingga November 2020. Nilai total pengadaan alat bermerek Beaver, Cellpro, Citoswab, Intron, Liferiver, Torax, dan Zybion itu sekitar Rp427 miliar. "Saya cuma

bantu BNPB karena (alat) PCR (*Polymerase Chain Reaction*) dan reagen langka,” kata pengusaha 44 tahun ini pada Rabu, 10 Maret lalu, di restoran Sari Ratu, Blok M, Jakarta Selatan.

Restoran Sari Ratu adalah bisnis lain Budiyanto. Di restoran masakan Padang yang didirikan Auwines—paman Kepala BNPB Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Doni Monardo—ini, ia punya saham bersama Inna Rossaria. Inna-lah yang mengenalkan Budiyanto kepada Doni saat ia menjadi panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat pada 2014.

Meski baru, perusahaan Anda mendapat banyak paket pengadaan di BNPB...

Tidak juga. Itu pandangan orang yang iri saja. Mereka tidak melihat risiko gagal mendapatkan barang di tengah kelangkaan yang besar. Saat susah kemarin, orang-orang ini ke mana?

Bagaimana Anda terlibat pengadaan alat uji Covid-19?

Pada April terjadi kelangkaan reagen. Stok di dunia menipis. Saya membantu BNPB mencari ke perusahaan di Cina dan dapat 500 ribu. Saat itu, namanya saja darurat, siapa saja yang memiliki barang akan dibeli dengan harga berapa saja.

Anda dekat dengan Doni Monardo?

Setiap orang pasti punya yang dia dekat, dia nyaman, dia percaya. Memang banyak orang datang, meminta tolong supaya saya membantu mendapatkan proyek di BNPB. Tapi saya bukan pejabatnya. Kalau saya bisa, ya saya bantu, tapi saya bukan pejabatnya. Pejabatnya itu beliau.

Kapan Anda mengenal Doni?

Sewaktu dia menjabat Komandan Jenderal Kopassus, sekitar 2014. Waktu itu dikenalkan oleh Inna Rossaria, adik sepupunya.

Bagaimana Anda mengenal Inna Rossaria?

Berawal dari bisnis *cleaning service* bersama teman-teman. Di situ masuk Inna Rossaria. Saya juga berbisnis restoran ini akhirnya pada 2017.

Anda tidak punya pengalaman dalam pengadaan alat kesehatan, mengapa bisa mengikuti pengadaan langsung?

Ini naluri bisnis pengusaha. Bertahan atau mati. Sekarang 80 persen pengusaha main di alat kesehatan. Kenapa? Karena pemain alat kesehatan lama terbiasa dengan proteksi, dengan katalog, dengan apalah, enggak terbiasa dengan model BNPB.

Obat dan alat kesehatan kita itu mahal, padahal ada yang generik. Coba bayangkan kalau peraturan tetap semua pemain alat kesehatan harus begini-begitu, berapa harga alat tes PCR kita beli di awal? Rp750 ribu, bahkan Rp1 juta! Di BNPB bisa Rp300 ribu.

Mengapa tetap bisa masuk menjadi penyalur?

Di tahap pertama boleh. Di tahap kedua, perusahaan harus punya izin penyalur alat kesehatan dan izin edar alat kesehatan untuk produk impor. Karena syaratnya harus begitu, semua perusahaan membuat sehingga rapi. Tidak sulit mengurusnya, semua orang bisa.

Beberapa laboratorium mengembalikan produk yang Anda impor karena tidak kompatibel dengan mesin mereka...

Alat PCR ini bukan alat gampang, tidak seperti antigen yang tinggal tempel jadi, dan bermacam-macam. Karena rumit, terkadang operator laboratoriumnya tidak mengerti sehingga dianggap tidak cocok dan dikembalikan.

Apakah barang yang telah dikembalikan bisa diganti dengan yang lain?

Tidak. Barang ini diberikan ke laboratorium lain yang merasa bisa menggunakannya karena tidak ada waktu untuk mengembalikannya.

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, barang yang Anda pasok belum lulus uji produk...

Kita tidak usah sok-sokan mengurus uji produk karena di awal pandemi situasinya darurat. Kalau produk dari Cina, yang penting ada di CFDA (*China Food and Drug Administration*). Menunggu uji produk dua bulan. Mau nungguin?

Penulis: Agung Sedayu.

Sumber: <https://majalah.tempo.co/read/investigasi/162736/wawancara-budiyanto-agani>.

CATATAN

PROGRAM KARTU PRAKERJA DAN M

ncurkan pada Maret 2020, Kartu
mengundang polemik. Banyak
ang belum bisa terjawab.

apes nasib Muhammad Ridwan,
Maret 2020,

“Menurut saya (informasi pembelian kelas)
kurang detail. Saya lebih banyak mendapat
informasi itu dari teman yang lolos dan ker
di (platform digital) yang kerja sama de
Kartu Prakerja,” ucap Ridwan kepada
Jurnal Investigasi



JURNALIS INVESTIGASI MELAWAN KORUPSI SERIES I

KOMPILASI LIPUTAN KLUB JURNALIS INVESTIGASI MENGUNGKAP DUGAAN KORUPSI DI PROGRAM KARTU PRAKERJA DAN DARURAT COVID-19

MEDIA KOLABORASI

SUARA.COM, JARING.ID, ALINEA.ID, TEMPO

PENYUNTING

AGUNG SEDAYU, WANA ALAMSYAH

DIPUBLIKASIKAN OLEH



INDONESIA CORRUPTION WATCH
JALAN KALIBATA TIMUR IV/D NO. 6,
JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA.

2024



DISALES NEGATIF HASIL

Tiga puluh menit setelah 12.997 alat p
spesimen Covid-19 (reagen) tiba di
pada 21 Agustus 2020, Antonius Okta
bergegas menguji sampel lendir yang didu
terjangkit virus SARS-CoV-2. Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
(Balitbangkes) Papua ini tidak ingin memba

